



SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/282/436.1.2/2023

TENTANG

MASTERPLAN *SMART CITY* KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai landasan materi dan panduan pembangunan konsep kota masa kini dan masa depan untuk membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan Kota Surabaya, perlu menetapkan Masterplan *Smart City* Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Masterplan *Smart City* Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG MASTERPLAN *SMART CITY* KOTA SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Masterplan *Smart City* Kota Surabaya yang terdiri dari:

- a. Analis Strategi *Smart City* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Masterplan *Smart City* Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. *Executive Summary Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. *Quickwins Smart City* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Masterplan *Smart City* Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2021 yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

KETIGA : Masterplan *Smart City* Kota Surabaya menjadi panduan dalam melakukan implementasi pembangunan berbasis *Smart City* dalam jangka waktu 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun kedepan yang akan di reviu setelah 5 (lima) tahun pertama dilaksanakan.

KEEMPAT : Masterplan *Smart City* Kota Surabaya disusun untuk jangka waktu periode 2023-2026.

KELIMA : Perubahan Masterplan *Smart City* Kota Surabaya hanya dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi penyesuaian atau perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. hasil pemantauan dan evaluasi Masterplan *Smart City* Kota Surabaya; dan/atau
- c. perubahan unsur Masterplan *Smart City* Kota Surabaya.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 September 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--



1. Analisis Masa Depan

1.1. Analisis Visi Pembangunan Daerah

Sejalan dengan amanat di dalam pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman RPJPD dan RPJMN.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (PILKADA). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kota Surabaya untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Surabaya mampu berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut:

- **Gotong Royong**

Nilai Gotong Royong merupakan nilai luhur yang tumbuh di kawasan desa di Jawa khususnya wilayah Jawa Timur. Gotong royong merupakan pengerahan tenaga tambahan terhadap kekurangan tenaga dalam menjalankan berbagai aktivitas. Gotong royong juga diyakini sebagai potensi sosial yang dapat dijadikan sebagai bagian yang signifikan dalam pemecahan berbagai masalah yang kemasyarakatan termasuk dalam upaya pembangunan daerah. Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur yang memiliki dinamika pembangunan yang sangat kompleks. Guna mencapai upaya pembangunan Kota Surabaya menjadi kota dengan tatanan yang dinamis kelas dunia maka dibutuhkan kerjasama dan semangat gotong royong dari berbagai elemen

masyarakat. Peran aktif serta gotong royong berbagai elemen tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pembangunan, mendukung program pembangunan sampai melestarikan hasil pembangunan.

- **Maju**

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu menjadi barometer perkembangan ekonomi bukan hanya di tingkat Jawa Timur namun juga di tingkat Nasional. Perwujudan pada Visi menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan tingkat Maju perekonomiannya adalah sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya.

Upaya pembangunan ekonomi Kota Surabaya kedepan harus berbasis kepada sektor potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Prioritas pembangunan ekonomi kedepan haruslah berbasis kepada sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencaharian masyarakat banyak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Surabaya. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi. Sebagai sentra ekonomi dan sentra penghubung ekonomi antar wilayah di Jawa Timur maupun di Nasional kebutuhan infrastruktur pendukung perdagangan menjadi faktor penting untuk terus dikembangkan di Kota Surabaya.

- **Humanis**

Implementasi Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan tujuan pemerintah daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejahtera direpresentasikan dengan konsep terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, rasa aman dan nyaman. Kesejahteraan mencakup unsur pembangunan kualitas manusia, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, rasa aman dan nyaman untuk tinggal dan bekerja, serta lingkungan hidup yang sehat berkelanjutan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan Kota Surabaya sebagai tempat yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman yang berarti kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan melakukan penataan ruang publik yang hijau sehingga nyaman dan ramah untuk anak, lansia serta difabel. Kemudian rasa nyaman, yang berarti menggambarkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, rekreasi dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.

- **Kota Dunia Berkelanjutan**

Pembangunan Kota Surabaya harus mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (Sustainability Development) yaitu bagaimana pembangunan yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kota Surabaya mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya.

Kota Surabaya akan menjadi kota yang sehat, indah, nyaman serta aman dengan memenuhi infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung warganya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat ekonomi serta mendukung kelancaran mobilitas warga serta bebas macet. Kota Surabaya harus mendukung dampak ekologi yang muncul dari aktivitas kota salah satunya dengan membangun tata kelola sampah dengan teknologi modern yang ramah lingkungan. Selain itu mengembangkan Kota Surabaya sebagai kota digital, membangun fasilitas dan ruang olahraga, ruang seni, dan ruang ekspresi bagi warganya. serta dapat terhubungnya tatanan landscape kota yang dapat mendukung konektivitas ekonomi dan sosial masyarakat Kota Surabaya secara berkelanjutan.

1.2. Analisis Kondisi Eksternal

Sebelum mulai menyusun Masterplan Smart City, daerah harus mengawalinya dengan melakukan analisis outlook atau analisis masa depan suatu daerah.

1.2.1. Analisis Tren dan Perubahan atau Perkembangan Kota

Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk terus mensinkronkan produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah

penyelesaian rancangan produk hukum dan evaluasi terhadap produk hukum yang sudah ada. Sejak tahun 2016 hingga 2020, setiap tahunnya terdapat 12 produk hukum yang dievaluasi. Kemudian dalam jangka waktu yang sama, total sebanyak 371 produk hukum baru yang berhasil diselesaikan.

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 telah mempengaruhi berbagai aspek, baik kesehatan, ekonomi maupun sosial. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami kontraksi sampai dengan $-4,85\%$. Seiring dengan perbaikan dalam penanganan pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya menunjukkan hasil yang positif sehingga tahun 2021 ekonomi tumbuh pada angka $4,29\%$. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 belum diiringi oleh perbaikan signifikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka yang berada pada angka $9,68\%$ dan persentase penduduk miskin yang meningkat menjadi $5,23\%$. Kondisi ini disebabkan karena sektor yang tumbuh cepat pada tahun 2021 berada pada sektor padat modal serta kondisi perekonomian utamanya sektor perdagangan dan jasa yang belum sepenuhnya pulih, oleh sebab itu pada tahun 2022 fokus pembangunan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang ditekankan pada perbaikan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sosial. Seiring dengan percepatan vaksinasi booster ke-3 serta berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali, yang menempatkan Kota Surabaya berada pada level 1, maka dalam penyusunan RKPD 2023 diarahkan untuk pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran terbuka serta peningkatan aspek pembangunan manusia yang disinergikan dengan arah kebijakan tahun 2023 yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021- 2026 “Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar berkelanjutan”.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni $5,01\%$ (yoy), di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan tahun 2022 tercatat $5,31\%$ (yoy), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar $3,70\%$ (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada kisaran $4,5-5,3\%$, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pascapenghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk

Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung oleh hampir seluruh komponen PDB dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,48% (yoy) sejalan meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta berlanjutnya penyaluran bantuan sosial. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 14,93% (yoy), didorong oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Pertumbuhan investasi nonbangunan juga tetap tinggi sejalan dengan kinerja ekspor, meskipun pertumbuhan investasi secara keseluruhan sedikit tertahan pada 3,33% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih rendah. Sementara itu, konsumsi Pemerintah berkontraksi 4,77% (yoy), namun lebih dipengaruhi oleh penurunan belanja barang untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) seiring dengan kondisi pandemi yang terus membaik.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat juga tercermin secara Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan IV 2022 juga menunjukkan kinerja positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. LU Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatat pertumbuhan yang tinggi didorong oleh berlanjutnya peningkatan mobilitas masyarakat dan naiknya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 tercatat tetap kuat di seluruh wilayah Indonesia, meskipun ada sebagian daerah yang melambat. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Kalimantan, Sumatera, dan Jawa.

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, diantaranya adalah:

- a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah:
 - Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun Ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada industri smart and clean dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.

- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan. Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940 hingga akhir 1970an dengan karakteristik shopping-street dan shopping arcade, sehingga dikenal dan menjadi salah satu icon kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.
- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak.
- Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Dengan adanya Sentra Ikan Bulak, kawasan ini, khususnya Kecamatan Bulak pada kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyumbang sebesar 33,36% dari total PDRB Kecamatan Bulak, diikuti kategori Perdagangan Besar&Eceran; Reparasi Mobil & Motor sebesar 26,53% dari total PDRB Kecamatan Bulak.
- Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan mixed-use pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal Multipurpose Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjalakng Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala nasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
 - Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
 - Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya.
- c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:
- Kawasan Kebun Binatang Surabaya di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo dengan luas lahan 15,3 Ha yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.
 - Kawasan Pantai Timur Surabaya di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai barrier alami dari proses abrasi dan intrusi air laut.
 - Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/ sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi Kawasan strategis dari sudut kepentinganpendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) da-tau teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/industrial estate di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: "Waste to Energy".

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.
3. Pengembangan jalur komuter/kereta api double track serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

1.2.2. Analisis Perilaku dan Harapan Masyarakat dan Stakeholder Daerah

Pada era globalisasi dan digital saat ini, pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan. Karena masyarakat sekarang adalah masyarakat yang butuh informasi, di mana ruang dan waktu bukanlah penghalang untuk mendapatkan segala

informasi yang dibutuhkan. Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pada era digital saat ini muncul konsep society 5.0, dimana konsep era society 5.0 adalah hasil perkembangan dari era revolusi industri 4.0. Konsep industri 4.0 mengedepankan manusia sebagai sumber inovasi dan tidak terlepas dari teknologi. Munculnya konsep ini membuat permasalahan manusia di perkotaan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan, salah satunya dengan konsep kota cerdas. Sedangkan revolusi industri 5.0 atau society 5.0 semua proses dilakukan secara sistem otomatis di dalam semua proses aktivasi. Perkembangan teknologi internet semakin berkembang tidak hanya menghubungkan manusia seluruh dunia. Konsep society 5.0 juga menjadi suatu basis bagi proses transaksi antara pemerintah dan masyarakat secara online. Oleh karena itu pemerintah diwajibkan cerdas untuk mampu menghadapi era globalisasi dan revolusi 5.0. Secara tidak langsung adalah bahwa tantangan globalisasi dan revolusi digital tidak mungkin dapat dihindarkan dari prinsip transparan dan akuntabilitas. Jika revolusi industri 4.0 memungkinkan siapapun untuk mengakses juga membagikan informasi di internet. Maka society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri.

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 telah mempengaruhi berbagai aspek, baik kesehatan, ekonomi maupun sosial. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami kontraksi sampai dengan -4,85%. Seiring dengan perbaikan dalam penanganan pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya menunjukkan hasil yang positif sehingga tahun 2021 ekonomi tumbuh pada angka 4,29%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 belum diiringi oleh perbaikan signifikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka yang berada pada angka 9,68% dan persentase penduduk miskin yang meningkat menjadi 5,23%. Kondisi ini disebabkan karena sektor yang tumbuh cepat pada tahun 2021 berada pada sektor padat modal serta kondisi perekonomian utamanya sektor perdagangan dan jasa yang belum sepenuhnya pulih, oleh sebab itu pada tahun 2022 fokus pembangunan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang ditekankan pada perbaikan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sosial.

Dalam mewujudkan konsep revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ketika Pandemi Covid-19 dalam lingkup Pemerintah Kota Surabaya, maka terdapat perubahan perilaku dan harapan masyarakat pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek kesehatan, dan aspek pelayanan publik. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan dan standar pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat atau stakeholder lainnya, antara lain:

1.2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Dilakukannya pembangunan terus menerus terhadap sarana dan prasarana pendidikan agar masyarakat terutama anak-anak dan pelajar memiliki harapan yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan lulus SMA/SMK/setara.
2. Aspek kesejahteraan yang terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga;
3. Harapan hidup saat lahir
4. Harapan sekolah
5. Harapan lama sekolah
6. Daya Beli atau Pengeluaran per Kapita
7. Indikator Persentase Penduduk Miskin
8. Indeks Pembangunan Manusia
9. Indeks Harmoni Sosial

1.2.2.2. Aspek Kesehatan

1. Harapan pola pangan
2. Kesehatan masyarakat yang diupayakan dengan terwujudnya rumah sehat. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
3. Penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas dan Posyandu) yang kemudian akan dilakukan evaluasi terkait persentase balita dengan gizi buruk dan stunting agar segera mendapatkan penanganan khusus.
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas kebutuhan dasar pangan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengkonsumsi pangan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Ketahanan pangan diukur dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor PPH menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.
6. Diperlukannya adanya peningkatan kerjasama dalam pengembangan pemasaran daur ulang maupun peningkatan gerakan terhadap pengelolaan sampah plastik sebagai wujud pengelolaan kebersihan.

7. Pemerataan sebaran prasarana olahraga di seluruh kelurahan dengan harapan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan dengan kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan menumbuhkan bibit-bibit atlet olahraga secara khusus.

1.2.2.3. Aspek Pelayanan Umum

1. Tingkat Pengangguran Terbuka serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan.
2. Adanya evaluasi terkait kepuasan pelayanan publik berdasarkan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Adanya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan.
4. Dilakukannya tinjauan dan evaluasi terhadap kawasan dengan kondisi lingkungan yang kurang memadai dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kelayakan bangunan rumah tempat tinggal serta fasilitas sarana dan prasarana seperti kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Maka dalam penyusunan Masterplan Smart City Tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran terbuka serta peningkatan aspek pembangunan manusia yang disinergikan dengan arah kebijakan tahun 2023 yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 “Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar berkelanjutan”.

Revolusi industri merupakan suatu perubahan besar di bidang teknologi yang menyebabkan perubahan cara hidup manusia dan proses kerja secara fundamental, dimana adanya kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak disiplin ilmu. Saat ini revolusi industri sudah mencapai tahap yang lebih tinggi yang disebut revolusi industri 4.0. Di era ini sistem diarahkan ke bentuk digital dibantu dengan jaringan. Di Indonesia revolusi industri 4.0 sudah merambah di berbagai bidang kehidupan seperti

pemerintahan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan ekonomi (Natalia dan Ellitan, 2018). Hal ini mengakibatkan perubahan dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, baik sebagai pelaku (dunia bisnis) maupun pengguna (konsumen). Dengan lahirnya teknologi digital saat ini pada revolusi industri 4.0 berdampak terhadap kehidupan manusia diseluruh dunia (Muljani dan Ellitan, 2019). Perkembangan teknologi informasi dengan pesat saat ini terjadi otomotisasi yang terjadi diseluruh bidang, teknologi dan pendekatan baru yang lebih memanfaatkan digitalisasi secara fundamental. Revolusi industri 4.0 memberikan tantangan yang harus dihadapi yaitu kurangnya keterampilan SDM yang memadai, masalah keamanan teknologi komunikasi, keandalan stabilitas mesin produksi, ketidakmampuan untuk berubah oleh pemangku kepentingan, serta banyaknya kehilangan pekerjaan karena berubah menjadi otomasi. Society 5.0 menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat menghubungkan melalui dunia maya dan dunia nyata. Konsep revolusi industri 4.0 dan society 5.0 tidak memiliki perbedaan yang jauh. Revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan (artificial intellegent) sedangkan society 5.0 memfokuskan kepada komponen manusianya.

1.2.3. Analisis Daya Saing Kota Dibandingkan dengan Kota-kota Lainnya dan Kota Lain Sebagai Pesaing di Tingkat Internasional

Untuk dapat menentukan visi, misi, dan arah kebijakan pemerintah daerah kedepan, pemerintah daerah harus senantiasa membuat analisis daya saing dibandingkan dengan beberapa daerah/kota lain atau kota di luar negeri yang akan menjadi benchmark dan tolok ukur keberhasilan pembangunan bahkan sebagai pesaing.

Kebijakan RT/RW Jawa Timur yang Terkait dengan Pengembangan Kota Surabaya

Kebijakan: Kawasan peruntukan industri dengan luas sekurang-kurangnya 69.288,52 Ha. (Pasal 80 ayat 1)

Peruntukan industri dikembangkan dan dioptimalkan sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Industri Kota Surabaya (RPIK). Pengembangan industri kota Surabaya diarahkan untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai pendukung industri nasional berbasis teknologi tinggi yang berdaya saing global. Hal tersebut akan dicapai dengan:

- a. Mendukung pengembangan nasional industry berbasis teknologi tinggi
- b. Mendukung pengembangan aktivitas bisnis untuk industri berbasis ekspor
- c. Mendukung pengembangan industri nasional dan berdaya saing global

Misi 1 Pemerintah Kota Surabaya

Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.

Sasaran pokok misi 4: (2 dari sasaran)

Terwujudnya peningkatan kemampuan dan skill pelaku Usaha Mikro-Koperasi dalam mengeksplorasi sekaligus memanfaatkan setiap peluang usaha baru melalui kerjasama sinergis dengan pelaku usaha besar nasional maupun internasional, konsisten pada peningkatan level standarisasi mutu, kualitas dan paten produk serta meningkatkan pengembangan inovasi produk untuk memperkuat daya saing di tingkat global;

Terwujudnya optimalisasi dan keserasian pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata dengan pengembangan kawasan pariwisata dan mengoptimalkan layanan pariwisata yang berdaya saing.

Sasaran pokok misi 6:

Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi fasilitas-fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat untuk meningkatkan aktifitas pengembangan budaya local yang berdaya saing;

Terwujudnya kemantapan peran lembaga / organisasi masyarakat dalam meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam seni dan budaya sehingga berjati diri dan berdaya saing;

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1.2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan	%	Non Makanan	%		
2017	758.750	39,88	1.143.770	60,12	1.902.520	100%
2018	776.985	40,94	1.120.876	59,06	1.897.861	100%
2019	742.013	36,60	1.285.586	63,40	2.027.599	100%
2020	777.725	41,39	1.101.421	58,61	1.879.146	100%
2021	810.743	41.52	1.141.846	54.48	1.952.589	100%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun pandemi 2020 dan 2021. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat. Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana berikut.

Tabel 1.2
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja (orang)	1.495.837	1.520.041	1.566.846	1.582.564	1.572.888
PDRB (Juta Rp)	493.026.305	538.845.465	580.488.529	554.509.457	590.227.967
Produktivitas (Juta Rp per orang)	329,60	354,49	370,48	350,39	375,25

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota Surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.

Tabel 1.3
Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB ADHK (miliar rupiah)	17.707,95	19.046,86	20.497,98	19.477,42	19.875,91
Laju Pertumbuhan (persen)	6,87	7,56	7,62	-4,98	2,05

Sumber : BPS Kota Surabaya diolah, 2022

1.2.3.2. Fokus Infrastruktur Kewilayahan

1.2.3.2.1. Indeks Infrastruktur Kota

Indeks infrastruktur kota merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan infrastruktur kota. Indeks ini juga digunakan untuk menunjang pemantapan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan. Komponen penyusun Indeks Infrastruktur Kota terdiri dari tiga komponen, yaitu Tingkat Mobilitas, Tingkat Konektivitas dan Tingkat Aksesibilitas. Indeks ini merupakan indikator yang baru mulai dihitung data dasarnya pada tahun 2020, yakni sebesar 0,95. Sedangkan pada tahun 2021, sebesar 0,995.

Tingkat Mobilitas didapatkan dari Layanan Kinerja Ruas Jalan di Kota Surabaya dengan melakukan survey lapangan pada ruas jalan protokol yang ada di Kota Surabaya. Layanan Kinerja Ruas Jalan tersebut berupa Derajat Kejenuhan (V/C Ratio), Level of Service (LOS) dan Lama Jam Sibuk. Kota Surabaya telah berhasil mengurai kepadatan lalu lintas dengan melakukan pengembangan infrastruktur kota, di antaranya menyediakan alternatif rute perjalanan karena memiliki kehandalan jaringan jalan, dan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Tingkat Konektivitas didapatkan dari Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah dan Penurunan Luas Kawasan Tergenang. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan telah melakukan berbagai upaya, di antaranya mempercepat waktu tanggap penanggulangan kejadian bencana alam kurang dari 24 jam dan waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit serta pencegahan kejadian kebakaran bangunan/lahan. Pembangunan, peningkatan, serta operasional sarana dan prasarana pematusan dalam rangka penanganan genangan juga berperan penting dalam capaian tingkat konektivitas.

Tingkat Aksesibilitas didapatkan dari Persentase Cakupan Penyebaran dan Layanan Jaringan Utilitas Kota dan Persentase Sinkronisasi Sistem Penataan Ruang dalam Kebijakan Satu Peta Tata Ruang Kota. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, di antaranya:

- a. Meningkatkan dan mengelola sistem jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) hemat energi melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
- b. Menyediakan layanan air bersih melalui Badan Usaha Milik Daerah PDAM Surya Sembada;

- c. Menyediakan layanan rekomendasi utilitas yang mencakup rekomendasi penempatan jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan gas, jaringan listrik maupun utilitas lainnya melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

1.2.3.2.2. Penataan Ruang

Pada tahun 2017, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel 1.4
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
Persentase luas wilayah produktif (persen)	93,27	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2021

Tabel 1.5
Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
Rasio luas wilayah industri (persen)	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2021

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2017 adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

Tabel 1.6
Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2021

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

1.2.3.2.3. Perhubungan

Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk terus menyediakan fasilitas jalan yang memadai dengan memperhatikan perkembangan volume lalu lintas harian pada ruas jalan utama di Kota Surabaya. Hal ini diukur melalui V/C ratio yaitu perhitungan volume per jam tertinggi untuk memperkirakan volume per jam desain (yaitu volume per jam tertinggi ke-n) untuk keperluan desain yang ideal. Pada tahun 2021, terdapat 49 jalan kewenangan kota dan nasional yang memiliki V/C Ratio $\leq 0,95$ dari total 51 ruas jalan yang disampling. Semakin kecil nilai V/C ratio pada suatu ruas jalan maka semakin baik pula fungsi jalan tersebut. Rata-rata V/C ratio di beberapa ruas jalan di Kota Surabaya terbukti semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 rata-rata V/C ratio di Kota Surabaya adalah 0,56. Kemudian turun menjadi 0,54 pada tahun 2019, dan turun lagi di tahun 2020 menjadi 0,47 dan di tahun 2021 menjadi 0,42. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas dengan melakukan pengembangan infrastruktur kota antara lain dengan menyediakan alternatif rute perjalanan serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Ratarata V/C ratio jalan di Kota Surabaya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.7
Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata V/C Ratio	-	0,56	0,54	0,47	0,42

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2021

Tabel 1.8
Derajat Kejenuhan Lalu Lintas (V/C Rasio) Kota Surabaya Tahun 2018 – 2021

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2018	2019	2020	2021
1	Jl. Adityawarman	kota	0,28	0,30	0,28	0,295
2	Jl. Bengawan	kota	0,15	0,16	0,13	0,155
3	Jl. Blauran	kota	1,03	0,95	0,72	0,57
4	Jl. Bubutan	kota	0,54	0,67	0,40	0,82
5	Jl. Citra Raya Unesa	kota	0,55	0,51	0,40	0,27
6	Jl. Darmo	kota	0,55	0,47	0,50	0,545
7	Jl. Dharmahusada Utara VIII	kota	0,17	0,14	0,12	0,065
8	Jl. Dharmawangsa	kota	0,32	0,38	0,34	0,27
9	Jl. Dinoyo	kota	0,25	0,13	0,28	0,195
10	Jl. Diponegoro	nasional	0,51	0,44	0,42	0,45
11	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno	kota	0,43	0,43	0,42	0,49
12	Jl. Dr. Soetomo	kota	0,37	3,19	0,42	0,3
13	Jl. Embong Malang	nasional	0,52	0,37	0,44	0,55
14	Jl. Gemblongan	kota	0,58	0,61	0,48	0,53
15	Jl. Gubeng Pojok	nasional	0,73	0,34	0,47	0,28
16	Jl. Gubernur Suryo	kota	1,59	0,91	0,67	0,32
17	Jl. Hayam Wuruk	kota	0,26	0,26	0,17	0,14
18	Jl. Indragiri	kota	0,27	0,20	0,18	0,375
19	Jl. Indrapura	kota	0,94	0,55	0,83	0,8
20	Jl. Jagir Wonokromo	nasional	0,32	0,29	0,18	0,315
21	Jl. Jakarta	kota	0,54	0,66	0,60	0,385
22	Jl. Joyoboyo	kota	0,46	0,64	0,22	0,545
23	Jl. Kapuas	kota	0,05	0,1	0,1	0,035
24	Jl. Kayun	kota	0,43	0,23	0,23	0,25
25	Jl. Kedung Doro	kota	0,29	0,23	0,27	0,41
26	Jl. Kejawan Putih Tambak	kota	0,31	0,13	0,27	0,2
27	Jl. Kembang Jepun	kota	0,75	0,36	0,57	0,55
28	Jl. Kertajaya Indah	kota	0,36	0,58	0,45	0,53
29	Jl. Kusuma Bangsa	kota	0,69	0,63	0,49	0,47
30	Jl. Laguna Kejawan Putih Tambak	kota	0,31	0,23	0,22	0,25
31	Jl. Mayjend HR Muhammad	kota	0,63	0,34	0,26	0,565
32	Jl. Mayjend Sungkono	kota	0,52	0,43	0,44	0,475
33	Jl. Ngagel	kota	0,44	0,46	0,50	0,27
34	Jl. Pahlawan	kota	1,09	0,74	1,11	0,53
35	Jl. Pemuda	kota	0,78	0,51	0,79	0,83
36	Jl. Perak Barat	nasional	0,68	0,85	0,63	0,71

No.	Lokasi Jalan	Kewenangan	2018	2019	2020	2021
37	Jl. Perak Timur	nasional	0,88	0,87	0,54	0,41
38	Jl. Polisi Istimewa	kota	0,19	0,19	0,16	0,22
39	Jl. Prof. Dr. Mustopo	kota	0,75	0,66	0,72	0,565
40	Jl. Rajawali	kota	0,96	0,85	0,83	0,51
41	Jl. Raya ITS	kota	0,34	0,58	0,19	0,23
42	Jl. Stasiun Wonokromo	nasional	0,51	0,29	0,50	0,42
43	Jl. Sumatera	nasional	0,55	0,52	0,37	0,02
44	Jl. Tunjungan	kota	0,85	0,82	1,03	0,58
45	Jl. Urip Sumoharjo	kota	0,66	0,89	0,55	0,475
46	Jl. Jendral Basuki Rahmat	kota	1,34	1,18	1,38	1,2
47	Jl. Jembatan Merah/Jl. Veteran	kota	0,95	0,86	1,01	1,05
48	Jl. Panglima Sudirman	kota	0,74	0,22	0,96	0,27
49	Jl. Keputran	kota	0,12	0,12	0,05	0,035
Rata-rata di jalan kewenangan kota			0,56	0,55	0,48	0,43
Rata-rata total			0,56	0,54	0,47	0,42

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Pada tabel di atas, meskipun rata-rata derajat kejenuhan menunjukkan tren yang semakin menurun, namun masih adanya beberapa ruas jalan yang derajat kejenuhannya lebih dari 0,95 menunjukkan masih diperlukannya upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui Traffic Demand Management yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Meningkatnya volume kendaraan di Kota Surabaya menyebabkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas semakin besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka kecelakaan dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat tetap tertib saat berkendara, pemasangan rambu dan lain-lain. Angka kejadian kecelakaan lalu lintas di Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.9
Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	1.349	1.191	1.345	874	932

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2022

Mengingat Kota Surabaya adalah kota besar dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, seringkali Kota Surabaya menjadi tempat jujukan bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut dapat terlihat pada jumlah kepadatan masyarakat di Kota

Surabaya antara siang hari dan malam hari. Pada malam hari, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2.970.932 jiwa, sementara pada siang hari bisa menjadi 2 kali lipat karena masyarakat dari Kabupaten/Kota sekitar yang memiliki pekerjaan di Kota Surabaya. Hal ini membuat akses keluar masuk Kota Surabaya sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar Surabaya agar dapat memberikan alternatif moda transportasi bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih moda transportasi.

1.2.3.2.4. Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya secara umum mengalami penurunan. Pada 2017 rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 25,03 menit, hingga Tahun 2021 ini rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,04 menit sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 1.10
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	25,03	22,43	22,01	22,22	22,04

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022

Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya secara umum juga mengalami penurunan. Pada tahun 2017, rata-rata tinggi genangan sebesar 13,37 cm. Hingga pada Tahun 2021 ini, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 10,92 cm sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 1.11
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	13,37	12,49	9,20	10,92	10,92

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022

Luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 765,12 ha. Hingga pada Tahun 2021, luas wilayah genangan Kota Surabaya terus menurun menjadi sebesar 452,57 hektar, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 1.12
Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Wilayah Genangan (ha)	765,12	697,79	688,96	462,64	452,57

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 56 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut. Hingga sekarang, smart water level telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokrembangan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan *smart water level* di rumah pompa lainnya.



Perangkat



Sensor dan Tiang Penyangga



Display Matrix

1.2.3.2.5. Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan

jaringan utilitas kota di antaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sampai dengan tahun 2021, jumlah PJU yang terpasang sebanyak 100.257 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel 1.13
Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tahun 2017– 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PJU terpasang (titik per tahun)	5.380	5.372	6.090	6.400	1.324

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan/ konservasi energi kota.

1.2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1.2.3.3.1. Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang terdiri dari:

1. Komponen Pengungkit (Enablers), yaitu penilaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain dengan melakukan penataan unsur dan fungsi manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Komponen Hasil (Results), merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penilaian BB (78,13). Sedangkan pada tahun 2021, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali memberikan nilai BB (78,38). Meski

mengalami peningkatan, nilai BB dapat dikatakan masih jauh harapan. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya peran ASN (Aparatur Sipil Negara) baik dalam pemahaman dan penerapan maupun pengawasan internal yang dilaksanakan. Di sisi lain, pentingnya peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi menjadi syarat mutlak bagi kepuasan masyarakat sekaligus semakin meningkatkan potensi masuknya investasi di Kota Surabaya.

1.2.3.3.2. Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.14
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bidang Politik	35	67	78	64	67
2	Bidang Ekonomi	84	64	68	81	142
3	Bidang Sosial Budaya	107	105	81	70	87
Jumlah unjuk rasa		226	236	227	215	296

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2017 ke 2018 mengalami sedikit kenaikan dan pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2021, terjadi kenaikan kejadian unjuk rasa sebanyak 296 kejadian dan didominasi oleh unjuk rasa di bidang ekonomi. Tetapi meskipun angka unjuk rasa di 2021 meningkat, keseluruhan unjuk rasa bisa tertangani dengan baik dan tidak menimbulkan korban jiwa. Hal ini menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan bisa dikendalikan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada tabel di berikut ini, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2018, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

Tabel 1.15
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Perda Terkait Perijinan	0	0	1	0	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	0	1	0	0	0
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2022

1.2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1.2.3.4.1. Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.16
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lulusan D4/S1	328.211	303.549	305.315	303.41	287.516
2	Jumlah lulusan S2	22.091	21.010	21.363	21.179	19.976
3	Jumlah lulusan S3	1.315	1.353	1.376	1.405	1.412
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3	351.617	325.912	328.054	325.994	308.904
5	Jumlah penduduk	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	0,114	0,105	0,104	0,109	0,104

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

1.2.3.4.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel 1.17
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk usia <15 tahun	713.916	672.334	700.826	688.478	675.558
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	232.830	216.158	229.491	186.272	193.749
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	946.746	888.492	930.317	874.750	869.307
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.395.881	2.206.240	2.229.164	2.095.980	2.101.645
5	Rasio ketergantungan	0,395	0,402	0,417	0,417	0,414

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Surabaya pada Tahun 2021 antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun dan usia lebih dari 64 tahun. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 70,71%. Sehingga rasio ketergantungan sebesar 0,414 yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 41 hingga 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

1.2.4. Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah yang Relevan dengan Kebutuhan Seluruh Stakeholder yang Ada

Selanjutnya pemerintah daerah perlu menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang relevan dengan keadaan di masa yang akan datang baik dalam hal tren perubahan kota/daerah, perilaku dan harapan masyarakat dan stakeholder lainnya, perkembangan kota lain serta strategi kota/daerah di dalam kancah persaingan atau kerjasama global dengan kota-kota di luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Organisasi Perangkat Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

No.	Perangkat Daerah (PD)	Bagian dari PD
1.	Sekretariat Daerah	a. Asisten Pemerintahan; • Bagian Administrasi Pemerintahan dan

No.	Perangkat Daerah (PD)	Bagian dari PD
		<p>Otonomi Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Hukum; • Bagian Organisasi.Asisten Perekonomian dan Pembangunan; <p>b. Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; • Bagian Administrasi Pembangunan; • Bagian Administrasi Kerjasama. <p>c. Asisten Administrasi Umum;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Umum dan Protokol; • Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset; • Bagian Hubungan Masyarakat; • Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
2.	Sekretariat DPRD	<p>a. Bagian Umum;</p> <p>b. Bagian Rapat dan Perundang-undangan;</p> <p>c. Bagian Informasi dan Protokol.</p>
3.	Dinas	<p>a. Dinas Pendidikan</p> <p>b. Dinas Kesehatan</p> <p>c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan</p> <p>d. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</p> <p>e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</p> <p>f. Dinas Pemadam Kebakaran</p> <p>g. Dinas Sosial</p> <p>h. Dinas Tenaga Kerja</p> <p>i. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>j. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>k. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah</p> <p>l. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>n. Dinas Perhubungan</p> <p>o. Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</p>

No.	Perangkat Daerah (PD)	Bagian dari PD
		Satu Pintu r. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan u. Dinas Perdagangan v. Satuan Polisi Pamong Praja
4.	Badan Daerah	a. Badan Perencanaan Pembangunan; b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah c. Badan Kepegawaian dan Diklat d. Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
5.	Kecamatan	31 Kecamatan
6.	Kelurahan	154 Kelurahan

2. Analisis Kesiapan Daerah

2.1. Nature (Analisis Kondisi Lingkungan)

Analisis Nature Daerah dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan alam di wilayah dan disekitar wilayah di mana smart city akan dikembangkan. Secara umum, pengukuran pada komponen nature ini melihat potensi dan tantangan apa saja yang terdapat di wilayah tersebut bagi pengembangan smart city dari aspek lingkungan hidup.

Tabel II. 1. Tabel Analisis Kesiapan Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			baik	sedang	buruk
1	[contoh] Kondisi I	300 km		✓	
2	[contoh] Kondisi II	Tidak ada			✓
3	[contoh] Kondisi III	Komunitas sudah berjalan dengan baik selama 3 tahun	✓		

2.1.1. Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan peningkatan penduduk dalam kota menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat memicu terjadinya pencemaran lingkungan antara lain meningkatnya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air. Untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditengah banyaknya pencemaran, dibutuhkan upaya

pengendalian pencemaran lingkungan melalui pengelolaan sampah dan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau.

2.1.1.1. Pengelolaan Sampah

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Hingga tahun 2021, Kota Surabaya telah memiliki 190 unit TPS dan 9 unit TPS 3R. Volume produksi sampah juga menurun sebanyak 470 ton/hari dari 2.222,62 ton/hari pada tahun 2020 dan 1.752,50 ton/hari pada tahun 2021.

2.1.1.2. Ruang Terbuka Hijau

Dalam mewujudkan kehidupan yang seimbang bagi warga kota baik seimbang secara fisik, ekologis, maupun sosial, diperlukan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dalam perkotaan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan, pengelolaan dan peningkatan RTH yang secara umum diarahkan ke optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi/peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai *stakeholder*. Pada tahun 2021 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 22 persen dari luas Kota Surabaya atau sebesar 7.356,96 Ha yang secara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2017 – 2021

No.	Jenis RTH Publik	2017	2018	2019	2020	2021
1	RTH makam	283,53	283,53	283,53	283,53	284,95
2	RTH lapangan dan stadion	355,35	355,86	359,86	360,58	361,08
3	RTH telaga/ waduk/ boezem	191,86	192,08	196,29	198,23	198,23
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4.548,59	4.548,59	4.570,33	4.570,33	4.570,33
6	RTH hutan	55,81	55,81	57,55	66,03	66,03
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1.646,10	1.646,10	1.672,75	1.672,75	1.672,75
Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha)		7.286,74	7.287,48	7.345,82	7.356,96	7.358,87
Luas Kota Surabaya		33.451	33.451	33.451	33.451	33.451
Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)		21,78	21,79	21,96	21,99	22,00

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2022

2.1.1.3. Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

Perlunya pengetahuan tentang peduli lingkungan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan pada peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang baik akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan jika dilihat pada tabel di bawah naik setiap tahunnya. Namun tetap diperlukan adanya peningkatan Kerjasama dalam pengembangan pemasaran daur ulang maupun peningkatan gerakan terhadap pengelolaan sampah plastik.

Tabel 2.2
Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan kebersihan	858	922	1.028	1.082	909

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

2.1.1.4. Konversi Energi

Konversi energi merupakan perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi melalui beberapa cara yaitu:

- Penerapan solar cell

- Pemasangan PJU dengan LED
- Mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo
- Penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat yang terdaftar
- Pembangunan kincir angin di beberapa titik lokasi

Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dengan mendorong pihak swasta atau masyarakat umum untuk ikut aktif berpartisipasi sehingga upaya pemanfaatan energi terbarukan ini dapat dilaksanakan oleh masyarakat Kota Surabaya secara keseluruhan.

2.1.1.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan indikator kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan hutan dan persampahan. Berikut pencapaian IKLHS Kota Surabaya pada tahun 2017-2021.

Tabel 2.3
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Indeks	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Air (IKA)	54,9	57,5	57,62	57,68	56,05	58,18
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,57	90,26	90,26	90,30	90,35	90,28
Indeks Tutupan Hutan (ITH)	42,38	42,38	42,44	42,45	42,63	42,63
Indeks Persampahan	69,27	74,96	74,98	75,09	75,84	76,62
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	62,09	64,88	64,91	64,97	65,08	65,71

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2022

2.1.1.6. Penghargaan

Pencapaian Pemerintah Kota Surabaya dalam Lingkungan Hidup baik nasional maupun internasional, yaitu:

- Penghargaan Adipura Kencana 2022 kategori Kota Metropolitan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI
- Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI
- Penghargaan Adiwiyata Nasional 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI

- Penghargaan Nirwasita Tantra 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI
- Penghargaan Program Kampung Iklim dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI pada tahun 2021
- Green Leadership “Nirwasita Tantra” tahun 2021 Kategori Kota Besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI
-
- Penghargaan Udara Terbersih se-Asia Tenggara

Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah permasalahan lingkungan	54	66	59	43	51
2	Jumlah permasalahan lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Kota	54	66	59	43	51
3	Persentase permasalahan lingkungan yang ditangani (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Dampak dari tercemarnya lingkungan hidup adalah rusaknya ekosistem alami, lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia, baik melalui kegiatan industri ataupun kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan sampah. Berikut merupakan ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan di kota Surabaya. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa dengan terus meningkatnya ketaatan/kepatuhan para pengusaha terhadap aspek lingkungan serta meningkatnya kualitas sistem pengawasan dampak lingkungan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Tabel 2.5
Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kegiatan usaha yang diawasi	200	200	200	200	200
Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi aspek administrasi dan teknis	100	200	200	180	190

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Pembuangan limbah domestik dan industri di sepanjang Kali Surabaya mengakibatkan kondisi fisik sungai mengalami pencemaran yang akan semakin berat. Keberadaan Kali

Surabaya penting bagi keberlangsungan perekonomian dan kelangsungan hidup bagi masyarakat, industri, dan niaga di sekitar bantaran kali. Selain itu Kali Surabaya menjadi sumber air baku PDAM Surabaya dan konsumen PDAM Surabaya bergantung pada kondisi kualitas air Kali Surabaya. Menurunnya kualitas air baku Kali Surabaya menyebabkan menurunnya kualitas air bersih dan menurunnya kualitas jaringan pipa distribusi air bersih yang mengakibatkan rawan kebocoran air, panjang pipa PDAM di Kota Surabaya adalah 5.812,62 km2.

Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan. Perhitungan IKLH terdiri atas tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Namun pada tahun 2018 terdapat surat edaran Menteri LHK Nomor 5.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH 2020-2024 dimana komponen IKTL digantikan dengan komponen IKL (Indeks Kualitas Lahan).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah dicapai kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 67,78. Sedangkan nilai IKLH Nasional sebesar 71,43. Berikut capaian nilai IKLH kota Surabaya, provinsi Jawa Timur dan Nasional dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2.6
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IKLH Kota Surabaya	61,30	61,34	61,43	60,96	67,78
IKLH Provinsi Jawa Timur	66,29	66,36	67,10	67,04	N/A
IKLH Nasional	66,19	71,67	66,55	70,27	71,43

Sumber data: DLH Surabaya, 2022

Kota Surabaya menambahkan indikator persampahan dalam perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup sehingga indeks menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS). Berikut merupakan pencapaian IKLHS Kota Surabaya pada tahun 2017-2021.

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya.

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Oleh karena itu indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya semakin membaik dari tahun 2017 sampai 2021, dimana pada tahun 2017 IKLHS sebesar 64,88, dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2021 IKLHS telah mencapai 65,71. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas lingkungannya, baik melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang bagus serta manajemen pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau dan pengawasan serta pengendalian dampak lingkungan yang sangat baik. Pada tahun 2021, IKLHS mengalami kenaikan yang signifikan karena salah satu unsur pembentuk nilai IKLHS yaitu kualitas udara mengalami kenaikan. Hal ini terjadi disebabkan berkurangnya pemakaian kendaraan di masa pandemi Covid-19.

2.2. Struktur

Analisis struktur daerah dilakukan untuk mengetahui kondisi dari unsur utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan sebuah daerah. Unsur-unsur tersebut adalah:

2.2.1. Analisis kualitas sumber daya manusia

2.2.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kota Surabaya sebesar 100 persen pada tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun ke atas tercatat sebanyak 2.408.552 jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 2.157.098 jiwa, pada tahun 2019 sebanyak 2.458.655, pada tahun 2020 sebanyak 2.460.443 jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 2.295.394 dan seluruhnya dapat membaca dan menulis. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya mulai tahun 2017 hingga tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bisa Membaca dan Menulis	2.408.552	2.157.098	2.458.655	2.460.443	2.295.394

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2023



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	2.408.552	2.157.098	2.458.655	2.460.443	2.295.394
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Dari data pada tabel di atas, penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

APM jenjang SD/MI pada tahun 2017 sebesar 95,02 persen dan jenjang SMP/MTS sebesar 85,06 persen. APM jenjang SD/MI pada tahun 2018 sebesar 97,24 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 87,17 persen. APM jenjang SD/MI pada tahun 2019 sebesar 98,88 persen dan jenjang SMP/MTS sebesar 84,58 persen. Sedangkan pada tahun 2020, APM jenjang SD/MI sebesar 98,46 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 87,58 persen. Kemudian pada tahun 2021 APM jenjang SD/MI sebesar 100,82 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 87,34 persen. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	APM SD/MI (persen)	95,02	97,24	98,88	98,46	100,82
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	282.604	274.104	291.907	295.357	299.814

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	281.089	286.373	303.021	299.966	297.369
2	APM SMP/MTs (persen)	85,06	87,17	84,58	87,58	87,34
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	108.231	118.636	123.398	126.874	129.763
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	144.127	141.554	146.952	144.872	148.573

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki Kota Surabaya Tahun 2017– 2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI (persen)	99,76	101,73	94,34	92,73	99,80
2.	Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/MTs (persen)	94,52	105,49	100,04	90,59	103,13

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APK PAUD (persen)	67,65	66,36	68,07	69,36	69,59
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan PAUD	119.747	119.047	125.941	124.883	123.269
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 Tahun	177.009	179.389	185.012	180.053	177.135
2.	APK SD/MI (persen)	104,46	103,79	105,86	104,30	106,90
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	287.406	287.830	310.982	312.873	317.885
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	281.089	286.373	303.021	299.966	297.369
3.	APK SMP/MTs (persen)	101,38	94,39	86,49	98,93	110,64
3.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	143.426	129.136	135.629	143.329	164.376
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	144.127	141.554	146.952	144.872	148.573

Sumber: Dinas Pendidikan, 2022

Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 21 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-Rata Lama Sekolah	10,45	10,46	10,47	10,49	10,5

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Lama Sekolah	14,41	14,78	14,79	14,8	14,81

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2021

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya di tahun 2021 berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA, yakni melebihi tingkat Diploma-3 (D3) namun masih belum mencapai Diploma-4 (D4) atau Strata-1 (S1).

Meski mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah masih belum dapat memenuhi harapan lama sekolah. Karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong pelaksanaan pemberian beasiswa bagi pelajar SMA/SMK, bahkan hingga Perguruan Tinggi, sehingga diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan indeks pendidikan bagi masyarakat/warga Kota Surabaya.

2.2.1.2. Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lulusan D4/S1	328.211	303.549	305.315	303.41	287.516
2	Jumlah lulusan S2	22.091	21.010	21.363	21.179	19.976
3	Jumlah lulusan S3	1.315	1.353	1.376	1.405	1.412
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3	351.617	325.912	328.054	325.994	308.904
5	Jumlah penduduk	3.074.883	3.094.732	3.159.481	2.970.730	2.970.952
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	0,114	0,105	0,104	0,109	0,104

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

2.2.2. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan

yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistim. Faktorfaktor yang berpengaruh dalam penyusunan pola karier PNS yang berhasil diidentifikasi meliputi pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, golongan ruang, pangkat dan tingkat jabatan serta kompetensi. Pemerintah Kota Surabaya juga telah merumuskan sistem pengembangan pola karier pegawai dan saat ini dalam proses pengesahan menjadi peraturan Kepala Daerah.

Selain itu, pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tak kalah pentingnya dalam memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui off the job dan on the job training. Pada tahun 2017, jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.508 pegawai, kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 4.834 pegawai. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 5.803 pegawai, pada tahun 2020 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.503 pegawai dan di tahun 2021 jumlah pegawai yang berkompeten sebanyak 4.725 pegawai. Di bawah ini terdapat jumlah data pegawai yang kompeten.

Tabel 2.12

Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pegawai kompeten	4.508	4.834	5.803	4.503	4.725
2	Jumlah pegawai belum kompeten	3.060	3.341	2.734	2.033	1.636

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

Dari data di atas, sejak tahun 2018-2021, jumlah pegawai belum kompeten menurun setiap tahunnya. Namun pegawai yang belum kompeten masih relatif tinggi. Mengingat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berperan penuh dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis, diupayakan untuk memperkecil jumlah pegawai yang belum kompeten.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pejabat struktural, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pejabat struktural	1.577	1.577	1.580	1.461	1.414
2.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	1.134	1.255	1.174	1.048	944
3.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	71,91%	78,24%	74,30%	71,73%	66,76%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

2.2.3. Analisis Kapasitas Keuangan Daerah

2.2.3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya tahun 2023 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 192 menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku maka untuk tahun 2022 dan 2023 Pemerintah Kota Surabaya mempersiapkan penyesuaian regulasi pemungutan pendapatan berdasarkan Undang-undang tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai

penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.2.3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2023 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek meliputi:

- a. Pajak Daerah yaitu:
 - 1) mengoptimalkan penerimaan pajak melalui perluasan basis data pajak
 - 2) mengembangkan layanan pajak on line untuk mempermudah pembayaran pajak
- b. Retribusi daerah yaitu Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu
 - 1) peningkatan koordinasi dengan PD terkait terkait optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan obyek lainnya.
 - 2) koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Penganggaran dana transfer dari provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tentang alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa Hibah Bos yang semula pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 ada pada kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka berdasarkan peraturan tersebut masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Surabaya sebagaimana terlihat pada Tabel III.8.

Tabel III.8
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2020 s.d Tahun 2024

Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2020 dikelola oleh 18 Perangkat Daerah dan Tahun 2021 dikelola oleh 18 Perangkat Daerah. Realisasi pendapatan tahun 2020 dan tahun 2021 disajikan pada tabel III.9

Tabel III.9
Realisasi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2020 dan Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya maka proyeksi pendapatan pada tahun 2022 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel III.10

Tabel III.10
Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2022 s.d Tahun 2024

2.2.3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Arah kebijakan dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada berbagai aspek perlu ditindaklanjuti dengan pemulihan kinerja pada berbagai sektor utamanya pada pemulihan ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan dan sistem sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan tema pembangunan pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 yaitu ***“Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Menuju Kota Surabaya Yang Humanis dan Berkelanjutan”*** diprioritaskan untuk:

- 1) Pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan wisata, dan padat karya;
- 2) Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota;
- 3) Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;
- 4) Penguatan nilai budaya lokal, partisipasi kepemudaan, serta ekonomi kreatif;
- 5) Peningkatan ketahanan pangan;

- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;
- 7) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik.

Belanja Daerah memperhatikan hal-hal khusus lain, sebagai berikut:

- 1. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan;
- 2. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagai upaya peningkatan bidang kesehatan, termasuk didalamnya anggaran penanggulangan stunting;
- 3. Mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
- 4. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan data realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021, Tahun 2022 serta proyeksi Tahun 2023 dan Tahun 2024 maka Belanja Daerah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel III.11

Tabel III.11

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Surabaya Tahun 2020 s.d Tahun 2024

2.2.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2023 diperoleh dari SILPA dan diarahkan untuk penempatan modal / penyertaan modal bagi badan usaha milik negara / daerah dan / atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Sisa penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada BUMD (sesuai dengan pencapaian tujuan pembangunan di tahun 2023) berdasarkan:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
- 2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama melalui

Pengalihan Saham dari PT. Surya Karsa Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya

- 3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel III.12

Tabel III.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 s.d Tahun 2024

2.2.3.5. Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, pemerintah daerah telah menyusun program-program perencanaan, baik perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian, jika dilihat dari sisi fiskal daerah, kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya masih cukup rentan. Mengingat besarnya rencana program pembangunan Pemerintah Kota Surabaya baik infrastruktur maupun non infrastruktur maka anggaran belanja yang dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan pemerintah Kota Surabaya untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya.

Alternatif-alternatif kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut: (1) fiscal engineering yaitu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep expenditure reform melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan cost recovery. (2) Creative Financing yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor swasta dalam melalui beberapa skema yakni skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui sinergi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya, antara lain yakni:

1. Kemitraan Pembiayaan Daerah antara Pemerintah dan swasta, melalui

- a. Peningkatan kerjasama swasta dan pemerintah melalui Kerjasama pemerintah swasta (KPS) / Public Private Partnership (PPP). Bentuk kerjasama PKS dapat dilakukan dengan berbagai skema Kerjasama seperti Build Operate and Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO) maupun bentuk lainnya.
 - b. Optimalisasi partisipasi dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan dan terlibat aktif dalam program pembangunan melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Pembiayaan pembangunan di Kota Surabaya melalui CSR dipandang potensial untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya. Potensi tersebut didukung oleh tingginya peran sektor industri pengolahan, dimana sektor industri pengolahan merupakan sektor kedua dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya.
2. Pengembangan kerjasama antar daerah. Kerjasama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya tersebut meliputi Kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan. Kerjasama antara daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas guna mendorong pembangunan suatu daerah.
 3. Kerjasama kemitraan dengan lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi maupun ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan daerah.
 4. Pengembangan kerjasama melalui pinjaman maupun hibah luar negeri yang digunakan pada bidang-bidang strategis utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota memiliki beberapa program pembangunan yang direncanakan dibiayai dari non APBD, antara lain:

1. Dalam rangka program pengembangan Kawasan Wisata Religi, Pemerintah Kota Surabaya berencana untuk melakukan pengembangan Terminal melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur transportasi darat di Kota Surabaya. Di samping itu, Pemerintah Kota Surabaya juga akan mengubah pola terminal menjadi sistem pengembangan berbasis kawasan Transit Oriented Development (TOD) sehingga dapat menjadi simpul transportasi yang terintegrasi. Dengan demikian, keberadaan terminal akan meningkatkan potensi kunjungan yang

dapat mendorong peningkatan produk UMKM Kota Surabaya, terutama yang diproduksi oleh masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

2. Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran menyuguhkan keindahan dan pesona kawasan pesisir pantai di timur laut Kota Surabaya dengan pemandangan berlatar belakang Jembatan Suramadu. THP Kenjeran yang memiliki luas 15.153,5 M2 di sisi utara dan 23.220 M2 di sisi Selatan masih memiliki potensi yang harus dikembangkan. Program penataan dan pengembangan THP Kenjeran dengan beragam fasilitas penunjang seperti playground, gazebo, anjungan, stan souvenir produk UMKM dan foodcourt yang menawarkan berbagai pilihan kuliner khas pesisir diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitarnya. Pemerintah Kota Surabaya berencana untuk melakukan pengembangan dengan skema APBD maupun dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). Dengan adanya rencana skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) diharapkan progres pengembangan akan lebih efisien dan efektif.
3. Sarana dan prasarana pelayanan dasar yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dimungkinkan dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) maupun Build Operate and Transfer (BOT).

2.3. Infrastruktur

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur daerah dilakukan untuk mengukur kesiapan kondisi infrastruktur daerah yang dikategorikan ke dalam tiga dimensi, yaitu infrastruktur fisik, infrastruktur digital, infrastruktur sosial.

2.3.1. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur fisik daerah dilakukan untuk mengukur kondisi sarana dan prasarana fisik daerah yang menjadi titik tolak dalam pembangunan smart city daerah. Dengan mengetahui posisi saat ini dalam hal infrastruktur fisik, maka pemerintah kota surabaya dapat mengukur seberapa banyak pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mencapai visi smart city daerah.

1. Persentase Jalan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan

kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2021, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 0,54 dimana jalan Kota Surabaya sepanjang 1.697.39 meter melayani jumlah penduduk sebesar 2.970.952 orang dengan persentase 99,38% kondisi jalan kondisi baik, atau sepanjang 1.686,88 meter.

2. Persentase Panjang Pedestrian (Fasilitas Pejalan Kaki) per Panjang Jalan Beraspal

Pedestrian di Kota Surabaya memiliki beberapa fasilitas yang ramah untuk pejalan kaki yakni bernama bollard yang memiliki fungsi sebagai pembatas antara jalan dan trotoar serta memiliki fungsi untuk menunjang keamanan juga kenyamanan para pejalan kaki. Bentuk bollard yang ada di pedestrian memiliki fungsi sebagai estetika jalanan. Hingga tahun 2022 telah mencapai 99.453 meter dan akan terus bertambah setiap tahunnya untuk menciptakan keamanan dan nyaman bagi pejalan kaki.

Selain bollard beberapa pedestrian dilengkapi dengan guiding block atau jalur pemandu bagi tunanetra untuk memberikan rasa aman dan nyaman melintasi pedestrian di Kota Surabaya. Untuk pengguna kursi roda Pemerintah Kota Surabaya melengkapi jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan lift sehingga penyandang disabilitas dengan mudah beraktifitas dengan aman dan nyaman.

3. Persentase Lampu Jalan yang Berfungsi dengan Baik

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota di antaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sampai dengan tahun 2021, jumlah PJU yang terpasang sebanyak 100.257 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik dan beberapa diantaranya menggunakan konsep hemat energi untuk mendukung upaya penghematan atau konservasi energi kota.

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Penghematan Pemakaian Listrik. hingga tahun 2021 Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan konversi PJU menjadi LED sebanyak 82.411 unit

4. Persentase Rambu dan Petunjuk Jalan dalam Kondisi Baik

Untuk memberikan kenyamanan demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu. Baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, maupun rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Surabaya selalu meningkat dari tahun ke tahun, hingga tahun 2021, pemasangan rambu yang meningkat menjadi 18.140 unit semenjak tahun 2017. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Mengacu pada undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik. hingga tahun 2021 Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan konversi rambu peringatan dan lampu lalu lintas dengan solar cell. hingga tahun 2021 terdapat total 69 unit lampu peringatan dan 240 unit lampu lalu lintas yang telah dikonversi menggunakan solar cell. dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk melanjutkan upaya konversi dan konservasi energi dengan mendorong pihak swasta atau masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi.

5. Adanya Kawasan Perkantoran untuk Kegiatan Bisnis

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung meningkat hingga tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, yaitu sebesar menjadi 1.582.564 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan menjadi 1.572.888 hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada peningkatan pengangguran terbuka. untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi, pemagangan, bimbingan keterampilan softskill, bursa kerja, dan sebagainya.

hingga tahun 2019 terdapat 9.235 pencari kerja yang telah difasilitasi dan 6.065 pencari kerja yang difasilitasi dan berhasil ditempatkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Salah satu hal yang masih menjadi fokus Pemerintah Kota Surabaya adalah penempatan peserta pelatihan pada pasar kerja sehingga diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi, pencari kerja juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya khususnya yang terdampak pandemi covid-19.

6. Adanya Kawasan Perbelanjaan untuk Kegiatan Perdagangan Masyarakat

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melalui peningkatan produktivitas usaha. hingga tahun 2021 terdapat total 26.854 usaha mikro kecil dan menengah.

Untuk meningkatkan kegiatan perdagangan di masyarakat Pemerintah Kota Surabaya memberikan pendampingan merek dagang, pendampingan produk halal, pelatihan UMKM, fasilitas kemitraan, serta bazar pada waktu tertentu. Hingga tahun 2019 terdapat total 2.237 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, namun pada tahun 2020 terdapat penurunan kegiatan karena adanya pandemi dan kebijakan social distancing sehingga beberapa pelatihan dimampatkan menjadi satu dan dilakukan secara daring.

7. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan dalam Kondisi Baik

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar. Pemerintah kota surabaya memiliki sarana prasarana pendidikan meliputi gedung sekolah dan tenaga pengajar.

Pada tahun 2021 jumlah gedung sekolah tingkat SD/Mi sebanyak 831 bangunan dengan jumlah pelajar sebanyak 297.369 jiwa sedangkan untuk tingkat SMP/MTs

sebanyak 399 bangunan dengan jumlah pelajar sebanyak 148.573 jiwa. selain gedung sekolah kebutuhan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. jumlah guru tingkat SD/Mi sebanyak 13.725 jiwa sedangkan pada tingkat SMP/MTs sebanyak 6.862 jiwa dengan jenjang pendidikan tenaga pengajar yang didominasi Strata 1 dan Strata 2.

8. Persentase Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan dalam Kondisi Baik

Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. fasilitas kesehatan meliputi 63 posyandu, puskesmas, klinik, puskesmas pembantu. Hingga tahun 2021 terdapat fasilitas kesehatan yang terdiri dari 63 posyandu, 358 klinik, 60 puskesmas pembantu. Selain itu terdapat fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, yakni rumah sakit yang berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif.

Terdapat total 60 rumah sakit di Kota Surabaya dengan kepemilikan Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus Penyakit, Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI, Rumah Sakit Daerah dan Swasta, dengan memiliki 7.484 orang tenaga kesehatan. Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Pencapaian SPM di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yakni RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie dengan rata-rata 84,37 untuk IKM sedangkan 85,62 untuk rata-rata SPM.

2.3.2. Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur digital daerah diperlukan untuk mengukur kesiapan daerah dalam melaksanakan program smart city, mengingat di dalam konsep smart city, teknologi merupakan enabler yang dapat memberikan percepatan terhadap hasil capaian dari smart city.

1. Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G

Di kota Surabaya terdapat 4 (empat) provider jaringan komunikasi yang menyediakan jaringan hingga 5G. namun untuk saat ini jaringan data seluler yang tersedia didominasi oleh 4G dan 4G+. jaringan 4G+ dinilai lebih cepat dibandingkan dengan jaringan 4G sehingga memudahkan masyarakat di Kota Surabaya untuk mengakses berbagai situs maupun layanan pemerintah dengan cepat dan lancar. berbagai layanan pemerintah dapat diakses melalui website

maupun aplikasi mobile, seperti layanan kependudukan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, serta layanan administratif lainnya. Tersedianya jaringan broadband access untuk masyarakat.

2. Tersedianya jaringan broadband access untuk masyarakat

Selain jaringan 4G dan 4G+ yang telah tersedia di Kota Surabaya. jaringan broadband yang disediakan oleh berbagai penyedia layanan internet. secara global hingga tahun 2021 terdapat 611 perusahaan penyedia layanan internet (internet service provider / ISP). Secara rinci, jumlah pelanggan ISP di Indonesia didominasi oleh pelanggan perorangan. Proporsinya mencapai 91,53% dari seluruh pelanggan ISP. Sebanyak 8,45% pelanggan ISP merupakan perusahaan. Sementara, hanya 0,02% pelanggan ISP yang berasal dari penyedia jasa warung internet (warnet). Jumlah pelanggan ISP pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan dikarenakan dampak pandemi Covid19 yang mengharuskan karyawan untuk bekerja di dalam rumah (Work From Home / WFH) serta pelajar yang melakukan pembelajaran secara daring.

3. Jumlah Lokasi Wireless untuk Publik

Selaras dengan ketersediaan jaringan internet di area Surabaya, untuk menunjang pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah Kota Surabaya telah menambah jaringan internet di kantor kecamatan, kelurahan dan puskesmas yang dapat diakses secara publik, sehingga masyarakat dapat melakukan pendaftaran pelayanan publik yang dibutuhkan dengan mudah, selain menggunakan mesin pendaftaran yang telah disediakan. Selain kantor kecamatan, kelurahan dan puskesmas pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan jaringan internet secara publik (gratis) pada beberapa fasilitas yakni ruang terbuka hijau, taman-taman kota, gedung balai RW untuk mendukung proses pembelajaran masyarakat yang tidak memiliki akses internet dan percepatan proses pelayanan public

4. Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Listrik

Total 31 kecamatan di Kota Surabaya telah terlayani listrik dengan pemanfaatan industri rumah tangga melalui program yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya maupun untuk keperluan rumah tinggal. Hingga tahun 2022 daya listrik yang terpasang di Kota Surabaya sebesar 5.466 KW dengan jumlah pelanggan mencapai 1.417.485 pengguna. Dengan daya listrik yang tersedia di Kota Surabaya golongan menjadi 3 (tiga) Unit Pelayanan Pelaksana Pelanggan

(UP3) yakni di Surabaya Selatan, Surabaya Utara, dan Surabaya Barat dengan total daya listrik yang terjual sebesar 9.040.611 MWh.

5. Jumlah Kejadian Pemadaman Listrik Setiap Bulan (Dalam Jam)

6. Jumlah Sekolah yang Memiliki Akses Internet

Di Kota Surabaya terdapat 3.921 sekolah yang terdiri dari beberapa tingkat pendidikan yakni taman kanak-kanak hingga tingkat atas. Dari banyaknya jumlah sekolah yang ada di Kota Surabaya terdapat beberapa tingkat pendidikan yang memiliki akses internet pada sekolahnya baik itu penyediaan secara mandiri maupun merupakan fasilitas dari Pemerintah Kota Surabaya. akses internet pada sekolah dimanfaatkan oleh guru, staf maupun siswa untuk menunjang beberapa kegiatan di sekolah. Diantaranya ujian sekolah, keperluan administrasi sekolah hingga kegiatan sekolah lainnya.

7. Jumlah Rumah Sakit yang Menggunakan Sistem Layanan Elektronik/Online

Untuk mendukung percepatan pelayanan kesehatan, sebanyak 51 rumah sakit yang ada di Kota Surabaya telah memiliki sistem layanan elektronik berupa sistem informasi rumah sakit. beberapa diantara rumah sakit tersebut memiliki sistem informasi rumah sakit tersebut telah terintegrasi dengan layanan BPJS Kesehatan dan menggunakan jaringan internet yang disediakan oleh pemerintah kota surabaya maupun menggunakan jaringan internet secara mandiri. dengan terintegrasinya layanan BPJS Kesehatan membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan nyaman.

2.3.3. Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Analisis kesiapan infrastruktur sosial di daerah dilakukan untuk mengukur kondisi kesiapan infrastruktur di daerah yang terkait dengan kewargaan. Kebutuhan akan sarana prasarana sosial merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan partisipasi dan keguyuban warga kota disaat smart city akan dan mulai dilaksanakan.

1. Adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Tingkat Kelurahan/Desa

Pada masing-masing Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) hingga di kelurahan di terdapat lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK), Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Untuk pusat kegiatan layanan kemasyarakatan dilakukan di aula/balai warga pada masing-masing wilayah. Namun untuk layanan kemasyarakatan yang memiliki anggota

dan tujuan yang kompleks dilakukan pada kantor kelurahan setempat. Lembaga LKMK di Kota Surabaya berjumlah sebanyak 154 lembaga.

2. Adanya Ruang Terbuka Publik di Tingkat RW

Optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Luasan RTH publik Kota Surabaya hingga tahun 2021 mencapai 22,00 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.356,96 Ha yang terdiri 7 (tujuh) jenis RTH publik yakni RTH makam, RTH lapangan dan stadion, RTH telaga / waduk / bozem, RTH dari fasilitas umum dan fasilitas sosial permukiman, RTH kawasan lindung dan pesisir timur, RTH hutan, serta RTH taman dan jalur hijau.

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih perlu untuk dimanfaatkan atau difungsikan secara optimal sebagai paru-paru kota. Optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional serta melibatkan partisipasi/peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai stakeholder merupakan salah satu upaya pengelolaan dan peningkatan RTH.

3. Adanya Aula/Balai Warga di Tingkat Kelurahan/Desa

Masing-masing Rukun Warga (RW) yang berada di Kota Surabaya memiliki gedung pertemuan yang digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan pelayanan warga, diantaranya kegiatan posyandu, kegiatan pemilu, serta kegiatan rutin yang diadakan warga lainnya. Terdapat 1.360 balai RW yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Surabaya. Selain itu masing-masing balai RW telah difasilitasi oleh jaringan internet yang dapat digunakan secara gratis oleh warga sekitar.

4. Jumlah Fasilitas Olahraga di Tingkat Kelurahan/Desa

Sampai dengan tahun 2017, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya adalah sejumlah 393 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan dan permukiman maupun di tanah aset BTKD di wilayah kota Surabaya. Pada tahun 2018, jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota mengalami peningkatan menjadi 479 lapangan olahraga. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 630 lapangan olahraga. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah tersebut kembali mengalami peningkatan

menjadi 665 lapangan olahraga. Untuk tahun 2021, jumlah lapangan olahraga tersebut masih sejumlah 665 lapangan olahraga.

Namun sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya memang belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa wilayah kota. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya untuk mewujudkan pemerataan sebaran prasarana olahraga di seluruh kelurahan di wilayah Kota Surabaya dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan pengadaan lahan.

5. Ketersediaan Perpustakaan Umum yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah

Untuk mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat telah tersedianya layanan perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal yang tersebar secara merata di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Selain menyediakan layanan perpustakaan dan TBM, Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk perpustakaan dan TBM diantaranya, pendingin udara, Sumber Daya Manusia kompeten dan handal yang sigap membantu pengunjung.

Untuk menjangkau masyarakat lebih dekat, tersedia perpustakaan keliling untuk melayani sekolah dan taman kota menggunakan sarana angkutan umum. Layanan perpustakaan dan TBM melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemyarakatan perpustakaan. hingga saat ini terdapat 2 perpustakaan dengan kepemilikan Pemerintah Kota Surabaya. dan 61 Perpustakaan milik non Pemda yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi.

2.4. Suprastruktur (Kebijakan & Kelembagaan)

Suprastruktur atau aspek kelembagaan dan kebijakan di daerah merupakan suatu perangkat yang akan menjamin lancar atau tidaknya pelaksanaan smart city, yang dimulai dan didorong dari inisiatif pemerintah daerah seperti yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap dimensi suprastruktur atau kebijakan dan kelembagaan dilakukan terhadap tiga aspek, yaitu:

2.4.1. Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

Aspek kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Begitupun dengan inisiatif smart city yang dilaksanakan di daerah, memerlukan seperangkat kebijakan

untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan berkelanjutan. Untuk itu, analisis terhadap aspek kebijakan di daerah perlu dilakukan.

- a. Peraturan Daerah tentang Dewan Smart City Kota Surabaya telah diputuskan oleh Walikota pada tanggal 10 februari 2023 dengan nomor surat keputusan 100.3.3.3/46/436.1.2/2023 serta ditentukan pula susunan keanggotaan dewan smart city di Kota Surabaya. Yang terdiri beberapa jabatan diantaranya pengarah, ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3, sekretaris 1, sekretaris 2, dan anggota.
- b. Peraturan Kepala Daerah tentang Tim Pelaksana Smart City Kota Surabaya telah diputuskan oleh Walikota pada tanggal 10 februari 2023 dengan nomor surat keputusan 100.3.3.3/47/436.1.2/2023 serta ditentukan pula susunan tim pelaksanaan smart city di Kota Surabaya. Yang terdiri dari kelompok kerja smart governance, kelompok kerja smart society, kelompok kerja smart economy, kelompok kerja smart branding, kelompok kerja smart environment, kelompok kerja smart living.
- c. Masterplan smart city Kota Surabaya saat ini dalam tahap penyusunan, namun pada tahun 2018 telah disusun buku master plan smart city dan telah dilakukan roadmap smart city pada tahun 2019 dan 2020 yang melibatkan seluruh perangkat daerah untuk melakukan reviu terkait program smart city yang telah dibuat sebelumnya dalam keadaan terlaksana maupun tertunda.
- d. Program smart city disusun berdasarkan program kerja masing-masing perangkat daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Sehingga keberlangsungan program smart city dalam jangka panjang akan tetap terlaksana.

2.4.2. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

Kelembagaan daerah merupakan perangkat non-fisik selanjutnya setelah kebijakan yang sangat menentukan keberlanjutan pelaksanaan smart city di daerah dari sisi pengelola kota, yaitu pemerintah daerah. Di dalam aspek kelembagaan ini, nantinya akan diatur pembagian peran dalam pelaksanaan smart city. Oleh karena itu, aspek kelembagaan menjadi salah satu bagian dari analisis kesiapan smart city di daerah.

- a. SOP smart city daerah
- b. Tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana Smart City di setiap OPD

2.4.3. Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

Disamping aspek kebijakan dan kelembagaan, terdapat satu aspek non-fisik selanjutnya yang akan menjadi penentu dari keberlanjutan smart city di daerah. Aspek

tersebut adalah aspek organisasi di masyarakat sipil. Aspek ini menjadi salah satu aspek dalam kesiapan smart city karena di dalam sebuah smart city, aspek partisipasi masyarakat yang digerakkan di dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu inti dari smart city.

- a. Lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dilaksanakan dalam bentuk praktek kerja lapangan yang biasanya dilaksanakan pada mahasiswa tingkat semester akhir. Praktek kerja lapangan dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok pada salah satu perangkat daerah di Kota Surabaya yang selaras dengan program studi atau jurusan yang sedang ditempuh mahasiswa tersebut.
- b. Masing-masing program smart city didukung oleh forum-forum yang berada dimasyarakat pada tingkat kecamatan, kelurahan. Rukun warga, dan rukun tetangga untuk saling bersinergi dalam pencapaian program smart city.
- c. Partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal dalam program Smart City Kota Surabaya dilakukan pada saat penyusunan masterplan smart city sehingga strategi-strategi yang tercipta merupakan bentuk strategi terbaru.

2.5. Culture

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

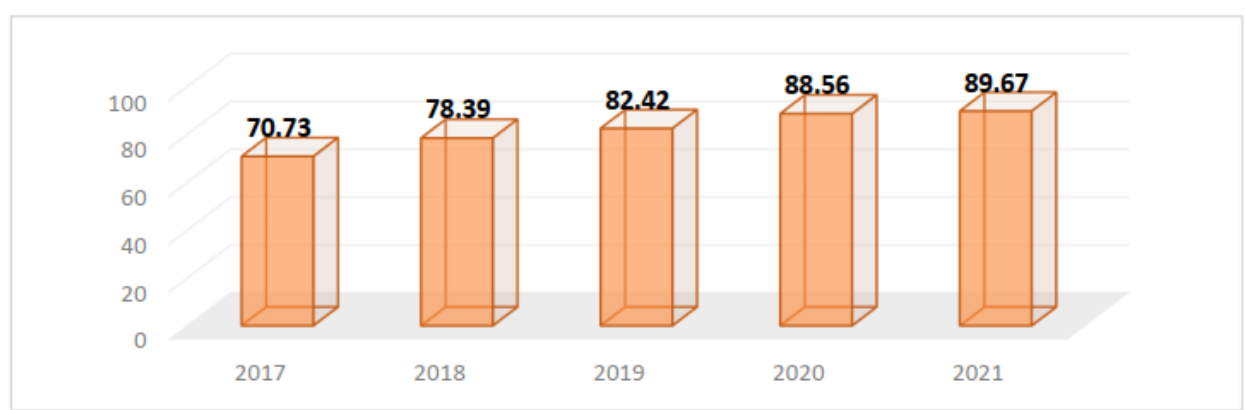
No.	Capaian Pembangunan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Grup Kesenian	591	611	731	771	743
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	42	42	42	42	42
4	Jumlah Gedung Olahraga	4	4	4	4	5

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2022

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup

kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2017 sebanyak 591 grup kesenian, tahun 2018 meningkat menjadi 611 grup kesenian dan sampai dengan tahun 2021 meningkat menjadi 743 grup kesenian. Pembinaan seni dan budaya juga dilakukan dengan kegiatan pelatihan dan pelaksanaan penampilan/pertunjukan seni di ruang publik. Adapun even pertunjukan seni dan budaya yang diadakan di antaranya Surabaya Vaganza, Mlaku-mlaku Nang Tunjungan, Festival Rujak Uleg, Festival Cipta Karya Tari serta Festival *Cross Culture*.

Selain itu, dalam melestarikan budaya lokal, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan menciptakan rasa memiliki disertai kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan. Hal ini diukur dalam indeks budaya lokal yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari hasil survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal, serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatankegiatan bernilai kebangsaan. Adapun pencapaian indeks budaya lokal pada tahun 2017 hingga 2021, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.13 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2017–2021
(sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2022)

Pencapaian Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya tahun 2021 realisasinya 89,67%. Angka realisasi tersebut terus meningkat dari realisasi tahun 2017 sebesar 70,73%. Peningkatan Indeks Budaya Lokal tersebut menunjukkan penguatan nilai-nilai budaya lokal yang semakin membaik.

Jumlah cabang olahraga yang dibina sampai dengan tahun 2021 sebanyak 42 cabang olahraga. Pada tahun 2021 sejumlah 416 orang atlet dari 31 cabang olahraga meraih prestasi di kejuaraan skala provinsi, nasional dan internasional. Dengan keterbatasan even kejuaraan pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19, capaian tersebut cukup memuaskan. Untuk memberikan fasilitasi pembinaan cabang olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Sampai dengan tahun 2021, gedung olahraga yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 5 unit antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo, dan gedung indoor *Surabaya Sport Center* (SSC), serta Gelora Pancasila.

Selain itu, lapangan olahraga juga tersebar di permukiman penduduk maupun sekolah-sekolah, baik itu lapangan olahraga yang dibangun pemerintah kota maupun milik swasta. Sampai dengan tahun 2021 lapangan olahraga yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya berjumlah 586 lapangan terdiri dari lapangan berbagai macam cabang olahraga termasuk olahraga renang dan menembak. Pembinaan atlet juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan, pemusatan latihan dan pelaksanaan even kejuaraan tingkat kota seperti Piala Walikota.

3. Analisis Strategi Pembangunan Smart City (SWOT)

3.1. Smart Governance

Analisis SWOT - Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<div>Faktor Internal</div> <div>Faktor Eksternal</div>	Kekuatan	Kelemahan
	1. Penyediaan peningkatan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta website pemerintah 2. Peningkatan ketersediaan dokumen data dan informasi pembangunan Kota Surabaya 3. Peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP 4. Rasio ketersediaan jumlah pamong praja di Kota Surabaya meningkat	1. Kurang optimalnya pengelolaan data investasi serta data potensi investasi Kota Surabaya yang dapat di promosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
1. Adanya kebijakan nasional mengenai penyederhanaan regulasi untuk mendorong investasi daerah lebih cepat 2. Adanya kepastian penegakan sistem hukum perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga serta penegakan bebas korupsi 3. Adanya PP No 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan	1. Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia 2. Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa	1. Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
1. Besarnya afirmasi dan tuntutan masyarakat Kota Surabaya dan Jawa Timur terhadap reformasi birokrasi	1. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul,	1. Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan

dan kualitas layanan public 2. Tuntutan SNI ISO 37122	Bermartabat dan Mandiri	publik berbasis digital
--	-------------------------	-------------------------

3.2. Smart Branding

Analisis SWOT - Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<div>Faktor Internal</div> <div>Faktor Eksternal</div>	Kekuatan	Kelemahan
	1. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tetap stabil dari tahun 2016-2020 dan menjadi tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur dan nasional 2. Tingkat rasio ketergantungan sebesar 36% yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur 3. Capaian perkembangan untuk bidang kesenian, budaya dan olahraga menunjukkan peningkatan 4. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan	1. Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
1. Momentum peningkatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing utamanya dari usaha mikro kecil menengah karena adanya perkembangan platform ekonomi digital yang massif 2. Adanya kebijakan nasional mengenai penyederhanaan	1. Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia 2. Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor	1. Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan

Analisis SWOT - Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>regulasi untuk mendorong investasi daerah lebih cepat</p> <p>3. Keberadaan bandar udara, pelabuhan besar dan terminal yang ada di area jangkauan Kota Surabaya menempatkan Kota Surabaya sebagai hub arus orang dan barang yang memiliki dampak ekonomi besar, antara lain meningkatkan sektor transportasi dan pariwisata</p>	<p>perdagangan, industri dan jasa</p> <p>3. Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta</p>	
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
<p>1. Dibutuhkan karakter masyarakat yang egaliter, inklusif dan ramah untuk mendukung Surabaya sebagai kota perdagangan nasional dan Asia</p> <p>2. Guna mendukung peran Kota Surabaya sebagai pusat industri, perdagangan dan jasa diperlukan kerjasama dengan daerah sekitar secara berkelanjutan</p>	<p>1. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri.</p>	<p>1. Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik</p>

3.3. Smart Economy

Analisis SWOT - Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<div>Faktor Internal</div> <div>Faktor Eksternal</div>	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tetap stabil dari tahun 2016-2020 dan menjadi tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur dan nasional 2. PDRB per kapita setiap tahunnya mengalami peningkatan 3. Peningkatan persentase koperasi aktif 4. Penduduk usia angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan penduduk yang bukan usia angkatan kerja 5. Rasio sengketa tenaga kerja menurun di setiap tahunnya 6. Jumlah kasus pelanggaran K3 menurun di setiap tahunnya dan tingkat penyelesaian pelanggaran mencapai target 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya 2. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum optimal 3. Masih kurang optimalnya lembaga pertanian atau kelompok tani dalam mengembangkan budidaya, distribusi dan pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan 4. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan serta belum optimalnya pengolahan produk unggulan hasil perikanan
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Momentum peningkatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing utamanya dari usaha mikro kecil menengah karena adanya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi

Analisis SWOT - Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>perkembangan platform ekonomi digital yang massif</p> <p>2. Keberadaan bandar udara, pelabuhan besar dan terminal yang ada di area jangkauan Kota Surabaya menempatkan Kota Surabaya sebagai hub arus orang dan barang yang memiliki dampak ekonomi besar, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan perdagangan dan pergudangan b. Peningkatan perhotelan dan kuliner c. Peningkatan ekonomi kreatif d. Pengembangan usaha mikro 	<p>2. Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa</p>	<p>terhadap pengentasan kemiskinan</p>
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
<p>1. Guna mendukung peran Kota Surabaya sebagai pusat industri, perdagangan dan jasa diperlukan kerjasama dengan daerah sekitar secara berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri 2. Pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah serta pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak 3. Diversifikasi pangan berkelanjutan 	<p>1. Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik</p>

3.4. Smart Living

Analisis SWOT - Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<div>Faktor Internal</div> <div>Faktor Eksternal</div>	Kekuatan	Kelemahan
	<div>1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan</div> <div>2. Peningkatan jumlah rumah layak huni, akses sanitasi layak dan air bersih</div> <div>3. Prevalensi balita gizi buruk dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Surabaya menurun di setiap tahunnya</div> <div>4. Surabaya memiliki landscape tata kota yang nyaman, bersih dan utilitas sarana prasarana layanan publik yang terintegrasi</div> <div>5. Capaian perkembangan untuk bidang kesenian, budaya dan olahraga menunjukkan peningkatan</div>	<div>1. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan hidup sehat masih rendah</div> <div>2. Pencegahan dan penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan</div> <div>3. Masih terdapat kawasan yang masih belum sesuai standar kualitas lingkungan permukiman</div>
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
<div>1. Adanya program strategis nasional yang menempatkan Kota Surabaya sebagai kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah</div>	<div>1. Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Sistem Transportasi Perkotaan Terpadu</div> <div>2. Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta</div> <div>3. Peningkatan jangkauan akses kesehatan khususnya pada masyarakat miskin pengembangan sistem data terintegrasi</div>	<div>1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran</div> <div>2. Diversifikasi pangan berkelanjutan</div>

Analisis SWOT - Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
1. Dibutuhkan desain tata kota dan utilitas publik yang nyaman berbasis Information and Communication Technology (ICT) 2. Besarnya afirmasi dan tuntutan masyarakat Kota Surabaya dan Jawa Timur terhadap reformasi birokrasi dan kualitas layanan publik	1. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri	1. Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik

3.5. Smart Soceity

Analisis SWOT - Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<div>Faktor Internal</div> <div>Faktor Eksternal</div>	Kekuatan	Kelemahan
	1. IPM Kota Surabaya meningkat dari tahun 2017-2019 dan merupakan tertinggi dibandingkan IPM provinsi Jawa Timur dan Nasional 2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya relatif stabil di tahun 2016-2018 dan meningkat di tahun 2019 3. Peningkatan response time rate Kota Surabaya atas layanan bencana kebakaran	1. Kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik yang belum memenuhi dan bersertifikat 2. Partisipasi warga dalam mewujudkan kampung tangguh belum optimal 3. Pencegahan dan penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
1. Adanya kepastian penegakan sistem hukum perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga serta penegakan bebas korupsi	1. Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa 2. Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
1. Potensi lonjakan kasus Covid-19 dikarenakan mutasi varian virus serta pasca mobilitas pada hari libur 2. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum berbasis masyarakat untuk menjamin stabilitas sosial sebagai	1. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri 2. Pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta secara berkelanjutan	1. Peningkatan sumberdaya dan jangkauan penanggulangan bencana berbasis spasial

Analisis SWOT - Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
dasar meningkatkan daya saing Surabaya sebagai kota investasi		

3.6. Smart Environment

Analisis SWOT - Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<div>Faktor Internal</div> <div>Faktor Eksternal</div>	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah rumah layak huni, akses sanitasi layak dan air bersih 2. Peningkatan persentase penanganan sampah setiap tahunnya 3. Peningkatan persentase luas RTH setiap tahunnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan hidup sehat masih rendah 2. Masih terdapat kawasan yang masih belum sesuai standar kualitas lingkungan permukiman
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program strategis nasional yang menempatkan Kota Surabaya sebagai kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah 2. Proses aglomerasi pertumbuhan Kawasan di Jawa Timur yang memposisikan Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan yang sangat penting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta 2. Penguatan konsep gerakan Surabaya Green City melalui lembaga formal dan nonformal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibutuhkan karakter masyarakat yang egaliter, inklusif dan ramah untuk mendukung Surabaya sebagai kota perdagangan nasional dan Asia 2. Dibutuhkan desain tata kota dan utilitas publik yang nyaman berbasis Information and Communication 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik

Analisis SWOT - Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Technology (ICT)		

4. Analisis Visi Pembangunan Smart City

4.1. Visi, Misi, Smart City

4.1.1. Visi Smart City

Dalam menetapkan visi Smart City, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemetaan terhadap visi Kota Surabaya agar visi tersebut relevan dengan pembangunan Kota Surabaya. Selain itu, visi Smart City juga mencakup visi dari semua dimensi Smart City yang telah ditentukan. Oleh karena itu, usulan visi Smart City Kota Surabaya adalah sebagai berikut.

“Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan dalam Pembangunan Multi Sektor dan Pelayanan Publik yang Cerdas”

Visi Smart City tersebut memiliki 4 poin utama yaitu Maju, Berkelanjutan, Multi Sektor, dan Cerdas yang memiliki makna berikut:

1. Maju menunjukkan bahwa Kota Surabaya berupaya mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah.
2. Berkelanjutan
3. Multi Sektor
4. Cerdas menunjukkan bahwa Kota Surabaya berupaya melakukan pemanfaatan berbagai macam bentuk teknologi, komunikasi, informasi di dalam mewujudkan visi kota yang tertuang di RPJMD.

4.1.2. Misi Smart City

1. Memperkuat perekonomian dan daya saing kota melalui kemandirian ekonomi lokal dan peningkatan investasi multisektor.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya serta penciptaan keamanan dan keadilan yang holistik.
3. Memantapkan tata ruang kota yang terintegrasi, modern, berkelas dunia, dan berkelanjutan.
4. Memantapkan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, dinamis dan tangkas.

4.1.3. Tagline Smart City

Surabaya Smart City mengusung tagline berikut:

“SINERGI KUAT, SURABAYA HEBAT”

Memasuki era revolusi industri 5.0, Kota Surabaya bersiap dengan meningkatkan konektivitas, interaksi dan konvergensi antar manusia, mesin dan sumber data lainnya melalui pemanfaatan TIK secara utuh demi mewujudkan Kota Surabaya yang kuat melalui

Masyarakat Kota Surabaya yang terdiri dari berbagai budaya, agama, suku dan ras.

Sedangkan revolusi industri 5.0 atau society 5.0 semua proses dilakukan secara sistem otomatis di dalam semua proses aktivasi. Perkembangan teknologi internet semakin berkembang tidak hanya menghubungkan manusia seluruh dunia. Konsep society 5.0 juga menjadi suatu basis bagi proses transaksi antara pemerintah dan masyarakat secara online. Oleh karena itu pemerintah diwajibkan cerdas untuk mampu menghadapi era globalisasi dan revolusi 5.0. Secara tidak langsung adalah bahwa tantangan globalisasi dan revolusi digital tidak mungkin dapat dihindarkan dari prinsip transparan dan akuntabilitas. Jika revolusi industry 4.0 memungkinkan siapapun untuk mengakses juga membagikan informasi di internet. Maka society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri.

4.2. Sasaran Smart City Daerah

Penetapan sasaran Smart City dilakukan dengan cara menganalisis visi dan misi Kota Surabaya yang kemudian dipetakan ke dalam 6 dimensi Smart City. Sasaran Smart City dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Sasaran Smart City

No	Misi Smart City	Dimensi Smart City	Sasaran Smart City
1.	Memperkuat perekonomian dan daya saing kota melalui kemandirian ekonomi lokal dan peningkatan investasi multisektor	Smart Economy	Meningkatnya sektor strategis perekonomian dan investasi berbasis kemandirian lokal dan multisektoral
		Smart Branding	Meningkatkan daya tarik investasi dan wisata berbasis potensi lokal

No	Misi Smart City	Dimensi Smart City	Sasaran Smart City
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya serta penciptaan keamanan dan keadilan yang holistik	Smart Society	Mewujudkan masyarakat yang unggul, berkarakter, dan berbudaya
		Smart Living	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kebutuhan dasar dan tata ruang terintegrasi
	Memantapkan tata ruang kota yang terintegrasi, modern, berkelas dunia, dan berkelanjutan	Smart Environment	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
	Memantapkan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, dinamis dan tangkas	Smart Governance	Mewujudkan transformasi digital untuk tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

0. Pendahuluan

0.1. Latar Belakang

Revolusi industri merupakan suatu perubahan besar di bidang teknologi yang menyebabkan perubahan cara hidup manusia dan proses kerja secara fundamental, dimana adanya kemajuan teknologi dapat mengintegrasikan dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak disiplin ilmu. Saat ini revolusi industri sudah mencapai tahap yang lebih tinggi yang disebut revolusi industri 4.0. Pada era digital sekarang muncul konsep society 5.0. Munculnya konsep era society 5.0 adalah hasil perkembangan dari era revolusi industry 4.0. Konsep industry 4.0 yang mengedepankan manusia sebagai sumber inovasi dan tidak terlepas dari teknologi. Munculnya konsep ini membuat permasalahan manusia di perkotaan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan, salah satunya dengan konsep kota cerdas. Sedangkan revolusi industri 5.0 atau society 5.0 semua proses dilakukan secara sistem otomatis di dalam semua proses aktivasi. Teknologi informasi saat ini semakin berkembang, sehingga tidak hanya menghubungkan manusia seluruh dunia. Konsep society 5.0 juga menjadi suatu basis bagi proses transaksi antara pemerintah dan masyarakat secara online. Oleh karena itu pemerintah diwajibkan cerdas untuk mampu menghadapi era globalisasi dan revolusi 5.0. s memungkinkan siapapun untuk mengakses juga membagikan informasi di internet. Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan (artificial intellegent) sedangkan society 5.0 fokus pada komponen manusianya. Pada era globalisasi dan digital saat ini, pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan. Karena masyarakat sekarang adalah masyarakat yang butuh informasi, di mana ruang dan waktu bukanlah penghalang untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan. Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.

0.2. Tujuan

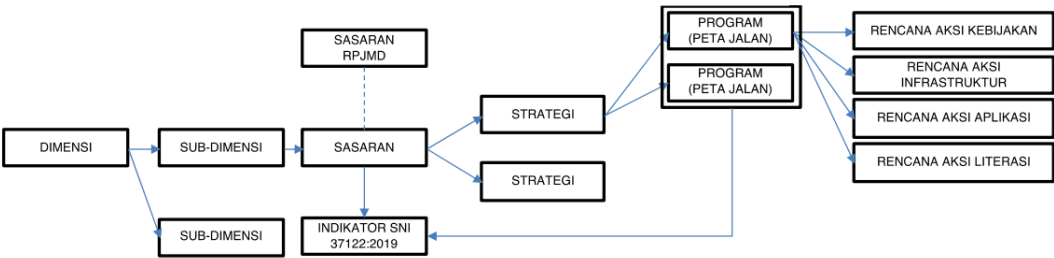
- a. Mewujudkan kota yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga
- b. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan kota cerdas
- c. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pembangunan kota cerdas sebagai penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan kota cerdas

0.3. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
- i. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- k. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- l. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;

- n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- o. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- p. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- q. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
- r. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- s. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- t. Nota Kesepakatan Antara Ditjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan 48 Kepala Daerah Tahun 2021 Tentang Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) Kota/ Kabupaten Pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Kawasan Ibu kota Negara Baru;
- u. SNI ISO 37120:2018 tentang pembangunan Perkotaan dan Masyarakat yang Berkelanjutan – Indikator-Indikator untuk Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup;
- v. SNI ISO 31712:2019 tentang Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas;
- w. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

0.4. Kerangka Pikir



Dalam penyusunan masterplan smart city, tentu saja tidak bisa terlepas dari arah kebijakan dan rumusan perencanaan yang telah ada dan ditetapkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku di daerah, khususnya RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan kepala daerah yang sedang menjabat. Untuk itu diperlukan peta keterkaitan antara masterplan smart city dengan dokumen perencanaan pembangunan tersebut.

Keterkaitan antara masterplan smart city dan RPJMD dapat terjadi pada tingkat sasaran, yaitu antara sasaran smart city daerah dan sasaran RPJMD. Sasaran smart city daerah dimiliki oleh masing-masing sub-dimensi smart city dari 6 dimensi smart city yang ada. Sasaran smart city daerah kemudian dicapai melalui serangkaian strategi dan program smart city, baik program pada peta jalan smart city daerah, maupun program pada rencana aksi pembangunan smart city daerah.

1. Arah Pembangunan Smart City Daerah

1.1. Visi, Misi dan Sasaran Smart City Daerah

1.1.1. Visi

Visi Pembangunan Kota Cerdas Kota Surabaya untuk periode tahun 2023 - 2026 yang selaras dengan visi pembangunan daerah Kota Surabaya, yaitu:

Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan dalam Pembangunan Multi Sektor dan Pelayanan Publik yang Cerdas

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Surabaya mampu berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan

penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut:

- **Maju**

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu menjadi barometer perkembangan ekonomi bukan hanya di tingkat Jawa Timur namun juga di tingkat Nasional. Perwujudan pada Visi menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan tingkat Maju perekonomiannya adalah sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya.

Upaya pembangunan ekonomi Kota Surabaya kedepan harus berbasis kepada sektor potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Prioritas pembangunan ekonomi kedepan haruslah berbasis kepada sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencaharian masyarakat banyak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Surabaya. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi. Sebagai sentra ekonomi dan sentra penghubung ekonomi antar wilayah di Jawa Timur maupun di Nasional kebutuhan infrastruktur pendukung perdagangan menjadi faktor penting untuk terus dikembangkan di Kota Surabaya

- **Humanis**

Implementasi Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan tujuan pemerintah daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejahtera direpresentasikan dengan konsep terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, rasa aman dan nyaman. Kesejahteraan mencakup unsur pembangunan kualitas manusia, kesejahteraan ekonomi,

kesejahteraan sosial, rasa aman dan nyaman untuk tinggal dan bekerja, serta lingkungan hidup yang sehat berkelanjutan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan Kota Surabaya sebagai tempat yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman yang berarti kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan melakukan penataan ruang publik yang hijau sehingga nyaman dan ramah untuk anak, lansia serta difabel. Kemudian rasa nyaman, yang berarti menggambarkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, rekreasi dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.

- **Berkelanjutan**

Pembangunan Kota Surabaya harus mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (Sustainability Development) yaitu bagaimana pembangunan yang menedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kota Surabaya mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya.

Kota Surabaya akan menjadi kota yang sehat, indah, nyaman serta aman dengan memenuhi infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung warganya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat ekonomi serta mendukung kelancaran mobilitas warga serta bebas macet. Kota Surabaya harus mendukung dampak ekologi yang muncul dari aktivitas kota salah satunya dengan membangun tata kelola sampah dengan teknologi modern yang ramah lingkungan. Selain itu mengembangkan Kota Surabaya sebagai kota digital, membangun fasilitas dan ruang olahraga, ruang seni, dan ruang ekspresi bagi warganya, serta dapat terhubungnya tatanan landscape kota yang dapat mendukung konektivitas ekonomi dan sosial masyarakat Kota Surabaya secara berkelanjutan.

- **Pembangunan Multisektor**

Proses Pembangunan Kota Surabaya dilakukan dengan melakukan pendekatan pembangunan yang multisektor. Pendekatan multisektor mulai dirintis untuk memantapkan arah tata kelola skala landscape (landscape governance). Artinya adalah, proses pembangunan dilakukan dengan adanya kolaborasi antar sektor. Kolaborasi perlu dibangun agar proses pembangunan pada satu sektor tidak mematikan sektor lainnya. Pembangunan multisektor merupakan pembangunan yang memberikan perspektif yang lebih baik dalam melakukan identifikasi dan evaluasi pada berbagai faktor yang dapat menciptakan daya saing pada perekonomian wilayah.

Melakukan identifikasi secara menyeluruh pada setiap sektor sangatlah diperlukan dalam melakukan pembangunan daerah. Hal ini untuk mengetahui potensi apa yang dapat menjadi sektor unggulan yang dapat lebih dikembangkan. Dan sektor apa yang menjadi sektor pendukung yang juga dikembangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan mengetahui sektor unggulan maka pemerintah akan lebih mudah dalam menentukan arahan pengembangan daerah dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong sektor unggulan daerah untuk lebih berkembang dan lebih dikenal banyak orang. Dengan begitu diharapkan kedepannya dapat menjadi contoh pertumbuhan yang dapat meningkatkan daya tarik daerah lainnya untuk mengembangkan daerahnya.

- **Pelayanan Publik yang Cerdas**

Pelayanan Publik yang Cerdas menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan Kota Cerdas (Smart City). Smart Governance adalah salah satu dimensi yang terdapat pada Smart City. Smart Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan, kinerja efisiensi kebijakan publik serta kinerja dan kualitas pelayanan publik. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas diawali dengan menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai serta adanya keterlibatan antara masyarakat dan pemerintah. Tata kelola pemerintahan berbasis digital pun saat ini mulai dikembangkan. Penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk melakukan berbagai inovasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelayanan kepada publik. Kunci Kota Cerdas adalah integrasi, dimana sektor-sektor yang terkait dengan pelayanan publik saling terhubung

satu sama lain. Serta mulai menerapkan konsep sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku walidata dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan/kebijakan.

Pelayanan publik diharapkan cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel dan transparan sehingga pelayanan publik semakin hari semakin dinamis. Pelayanan yang dulunya berminggu-minggu, kini hanya hitungan hari. Bahkan tidak menutup kemungkinan, nantinya pelayanan hanya dalam hitungan jam. Ini berkembang seiring tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat. Saat ini, Kota Surabaya telah menerapkan pelayanan yang bisa diakses secara elektronik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan dimanapun dan kapanpun. Untuk kelengkapan persyaratan dokumen dapat dilengkapi secara online.

1.1.2. Misi

Pembangunan Kota Cerdas Surabaya Tahun 2023 - 2026 mendukung visi **Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan dalam Pembangunan Multi Sektor dan Pelayanan Publik yang Cerdas**. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Cerdas Surabaya Tahun 2023 - 2026, maka berikut ditetapkan misi yang selaras dengan misi pembangunan Kota Surabaya yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya 2021 - 2026:

a. Misi 1: Memperkuat perekonomian dan daya saing kota melalui kemandirian ekonomi lokal dan peningkatan investasi multisektor

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran bahwa pemerintah mampu mengelola potensi ekonomi daerah untuk menjadi pilar pembangunan khususnya untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan ekonomi Kota Surabaya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan dampaknya mampu dirasakan oleh masyarakat banyak. Lokomotif perekonomian Kota Surabaya merupakan sektor potensial yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat namun mengedepankan potensi lokal sebagai

motor dan pilar utama perekonomian guna kemandirian ekonomi lokal dan daya saing daerah. Selain itu, pilar ekonomi hendaknya mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat sehingga mampu menunjang upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan daerah. Penciptaan iklim investasi menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan ekonomi Kota Surabaya tentunya dengan dukungan sistem birokrasi yang efektif dan efisien mendukung perijinan yang cepat dan murah. Penguatan daya saing daerah Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi di Jawa Timur serta di nasional dalam sektor perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional melalui peningkatan infrastruktur pendukung yang berkualitas dan terintegrasi.

b. Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya serta penciptaan keamanan dan keadilan yang holistik

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal perlu didukung modal manusia (*human capital*) yang unggul yaitu sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki ketrampilan tinggi dan produktif, sehat jasmani dan rohani serta berkarakter. Maka dari itu investasi manusia (*human investment*) menjadi misi penting dalam mendukung tercapainya visi Kota Surabaya kedepan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota Surabaya perlu didukung oleh peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.

Masyarakat yang bermukim di Kota Surabaya terdiri dari beragam suku, agama dan budaya yang menjadi identitas dari Bangsa Indonesia. Kemajemukan dan Keberagaman masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Surabaya tentunya akan membawa kepada dinamika kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Diperlukan suatu perekat social (*Social Glue*), jembatan social (*Social Bridging*), dan pelumas social (*Social Oil*) dalam modal sosial masyarakat agar tercipta tatanan harmonis dalam kehidupan masyarakat yang multi kultur di Kota Surabaya. Untuk mewujudkan sebagai Kota Dunia maka ketertiban dan keamanan menjadi isu penting yang harus dijaga di Kota Surabaya. Upaya pencegahan dan penanggulangan konflik dan pelanggaran perda yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat harus

ditingkatkan. selain itu potensi yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman lainnya adalah potensi bencana yang mungkin timbul di Kota Surabaya. Peningkatan ketahanan bencana Kota Surabaya menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan kota melalui perbaikan kualitas mitigasi dan penanganan bencana ditingkat masyarakat.

c. Misi 3: Memantapkan tata ruang kota yang terintegrasi, modern, berkelas dunia, dan berkelanjutan

Kota dalam struktur ruang menjadi pusat perekonomian wilayah dan memiliki peran penting bagi pembangunan. Pembangunan perkotaan menjadi bagian bagi pembangunan nasional, maka dari itu harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara berbagai kebutuhan baik kebutuhan untuk ekonomi maupun kebutuhan mendasar masyarakat akan infrastruktur kota yang menjamin hidup masyarakat yang berkualitas. Pembangunan Kota Surabaya berusaha untuk mewujudkan kota yang indah dan nyaman dengan terpenuhinya infrastruktur yang berkualitas dunia dan merata yang mendukung konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat yang berkelanjutan dengan melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin keberlanjutan sumber daya daerah serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

d. Misi 4: Memantapkan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, dinamis dan tangkas

Pemerintah daerah memegang peranan penting bagi perkembangan daerah melalui fungsi sebagai regulator serta fasilitator. Dukungan pemerintah dalam pembangunan daerah harus didukung oleh layanan publik yang prima. Untuk mencapai kondisi layanan prima tersebut perlu terwujud pemerintahan yang baik (good government) dan tata kelola yang baik (good governance). Layanan publik perlu didukung birokrasi yang bersih agar tidak menimbulkan biaya birokrasi tinggi. Pelayanan publik juga diharapkan mampu dinamis dan tangkas menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi dilapangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin bervariasi kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah

yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien dengan melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi sehingga tata kelola pemerintah dapat berjalan efektif.

1.1.3. Sasaran Smart City

Dalam mewujudkan visi Kota Cerdas Surabaya tahun 2023-2026 melalui misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi yang merupakan perumusan prioritas dalam 6 dimensi perencanaan pembangunan kota cerdas untuk selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tabel 1. Sasaran Smart City

Misi	Tujuan	Sasaran	Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Society	Smart Living	Smart Environment
Misi 1 Memperkuat perekonomian dan daya saing kota melalui kemandirian ekonomi lokal dan peningkatan investasi multisektor	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Meningkatnya sektor strategis perekonomian dan investasi berbasis kemandirian lokal dan multisektoral						
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan daya tarik investasi dan wisata berbasis potensi lokal						
Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan						

Misi	Tujuan	Sasaran	Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Society	Smart Living	Smart Environment
melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya serta penciptaan keamanan dan keadilan yang holistik	kebutuhan dasar lainnya	kebutuhan dasar dan tata ruang terintegrasi						
	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum							
	Pembentukan karakter masyarakat	Mewujudkan masyarakat yang unggul, berkarakter, dan berbudaya						
Misi 3 Memantapkan tata ruang kota yang terintegrasi, modern, berkelas dunia, dan berkelanjutan.	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan						
Misi 4 Memantapkan transformasi	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan	Mewujudkan transformasi digital untuk tata kelola						

Misi	Tujuan	Sasaran	Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Society	Smart Living	Smart Environment
digital untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, dinamis dan tangkas	pelayanan publik yang efektif dan inovatif	pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif						

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa misi, tujuan dan sasaran Smart City Kota Surabaya telah mencakup keseluruhan dimensi smart city. Kemudian pada setiap sub dimensi juga ditentukan sasarannya sebagai berikut:

a. Smart Governance

Sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Pembangunan Smart Governance dapat dilakukan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Smart Governance

No	Sub Dimensi	Sasaran Sub Dimensi
1.	Pelayanan Publik	Meningkatkan efektivitas pelayanan perijinan dan penanaman modal
		Meningkatkan akurasi dan kecepatan pelayanan administrasi kependudukan
		Meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
2.	Manajemen Birokrasi Yang Efisien	Meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel
		Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah

		Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi pembangunan
3.	Efisiensi Kebijakan Publik	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika yang handal dan efektif

b. Smart Branding

Sasaran dari smart branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Pembangunan Smart Branding dapat dilakukan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Smart Branding

No	Sub Dimensi	Sasaran Sub Dimensi
1.	Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata	Meningkatkan daya tarik destinasi wisata melalui promosi secara digital
		Meningkatkan pemasaran pariwisata berbasis digital
		Meningkatkan akses jalan melalui pembangunan panjang jalan dan prasana pejalan kaki
2.	Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah	Meningkatkan pelayanan penanaman modal
		Mengembangkan iklim penanaman modal
		Meningkatkan promosi penanaman modal melalui potensi investasi
		Meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk usaha mikro kecil menengah
		Meningkatkan sarana distribusi perdagangan
3.	Membangun dan Memasarkan Wajah Kota	Meningkatkan penataan bangunan gedung
		Meningkatkan akses jalan
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

c. Smart Economy

Sasaran dari dimensi smart economy di dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program

diantaranya mewujudkan less-cash society. Pembangunan Smart Economy dapat dilakukan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran Smart Economy

No	Sub Dimensi	Sasaran Sub Dimensi
1.	Membangun dan Memasarkan Wajah Kota	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
		Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui penyediaan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi
		Meningkatkan perencanaan dan pembangunan industri multisektoral berbasis kemandirian ekonomi lokal
		Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian berbasis perkotaan (urban agriculture)
		Meningkatkan kualitas dan produktivitas pengelolaan perikanan tangkap
		Meningkatkan kualitas dan produktivitas pengelolaan perikanan budidaya
		Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
2.	Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera
		Meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Meningkatkan pengembangan UMKM berbasis pada potensi lokal
3.	Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan	Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk hasil olahan usaha menengah, kecil dan mikro
		Meningkatkan sarana distribusi perdagangan

d. Smart Society

Sasaran dari smart society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Pembangunan Smart Society dapat dilakukan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran Smart Society

No	Sub Dimensi	Sasaran Sub Dimensi
1.	Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien	Meningkatkan pengembangan kapasitas daya saing masyarakat dalam bidang keolahragaan
		Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		Meningkatkan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Meningkatkan pengembangan UMKM
		Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika
2.	Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien	Meningkatkan pengelolaan pendidikan
		Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika yang mendukung sistem pembelajaran bagi masyarakat
3.	Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat	Meningkatkan penanggulangan bencana
		Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
		Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum

e. Smart Living

Sasaran dari smart living di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Pembangunan Smart Living dapat dilakukan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran Smart Living

No	Sub Dimensi	Sasaran Sub Dimensi
1.	Harmonisasi Tata Ruang Wilayah	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang
2.	Mewujudkan Prasarana Kesehatan	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		Meningkatkan pengembangan kapasitas daya saing dalam bidang keolahragaan
		Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Meningkatkan pengawasan keamanan pangan

No	Sub Dimensi	Sasaran Sub Dimensi
3.	Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi	Meningkatkan kehandalan dan kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

f. Smart Environment

Sasaran dari smart environment adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Pembangunan Smart Environment dapat dilakukan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 7. Sasaran Smart Environment

No	Sub Dimensi	Sasaran Sub Dimensi
1.	Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan	Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
		Meningkatkan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
		Meningkatkan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
		Meningkatkan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Meningkatkan penanganan pengaduan lingkungan hidup
2.	Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah	Meningkatkan pengelolaan persampahan
		Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
3.	Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya air

1.2. Indikator Utama Smart City Daerah

Indikator Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan kota cerdas yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi dan juga dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang diukur setiap tahunnya. Indikator utama Smart City Daerah sejalan dengan indikator utama pembangunan daerah yang ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
- b. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan
- c. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan
- d. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 8. Indikator Utama Smart City Tahun 2023 - 2036

Misi	Tujuan	Indikator	Target Indikator			
			2023	2024	2025	2026
Misi 1 Memperkuat perekonomian dan daya saing kota melalui kemandirian ekonomi lokal dan peningkatan investasi multisektor	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,21 %	3,46 %	3,71 %	3,96 %
		Indeks Gini	0,323	0,319	0,315	0,311

Misi	Tujuan	Indikator	Target Indikator			
			2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,26 %	6,93 %	6,50 %	6,00 %
		Persentase Penduduk Miskin	4,31 %	4,01 %	3,71 %	3,42 %
Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya serta penciptaan keamanan dan keadilan yang holistik	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	82,50	83,50	83,50	83,50
	Pembentukan karakter masyarakat	Indeks Harmoni Sosial	79,41	82,13	84,85	87,57
	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota	0,85	0,87	0,90	0,92
Misi 3 Memantapkan tata ruang kota yang terintegrasi, modern, berkelas dunia, dan berkelanjutan.	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks Infrastruktur Kota	0,678	0,734	0,793	0,854
Misi 4 Memantapkan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas birokrasi	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	83,41	84,21	85,01	85,81

Misi	Tujuan	Indikator	Target Indikator			
			2023	2024	2025	2026
dan pelayanan publik yang bersih, dinamis dan tangkas						

2. Strategi Pembangunan Smart City

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran pembangunan kota cerdas. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal dilingkungan Pemerintahan Kota Surabaya. Rumusan strategi menunjukkan bagaimana pemerintah daerah berupaya dalam menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah.

Penentuan alternatif strategi ditentukan berdasarkan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats atau yang dikenal dengan Analisis SWOT. Alat analisis ini merupakan rujukan utama Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Sesuai dengan prinsip perencanaan publik, alat analisis ini sederhana, mudah tetapi memiliki hasil yang kuat apabila dilaksanakan sesuai prosedur teoritik. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dijelaskan pada Buku I, maka ditetapkan strategi kota cerdas setiap dimensi sebagai berikut:

2.1. Strategi Smart Governance

- a. Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia
- b. Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa
- c. Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan
- d. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri
- e. Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital

2.2. Strategi Smart Branding

- a. Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia
- b. Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa
- c. Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta
- d. Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan
- e. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri
- f. Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik
- g. Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia
- h. Pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah serta pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
- i. Diversifikasi pangan berkelanjutan

2.3. Strategi Smart Economy

- a. Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia
- b. Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa
- c. Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan
- d. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri
- e. Pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah serta pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
- f. Diversifikasi pangan berkelanjutan
- g. Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik

2.4. Strategi Smart Society

- a. Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa
- b. Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital
- c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
- d. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri
- e. Pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta secara berkelanjutan
- f. Peningkatan sumberdaya dan jangkauan penanggulangan bencana berbasis spasial

2.5. Strategi Smart Living

- a. Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Sistem Transportasi Perkotaan Terpadu
- b. Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta
- c. Peningkatan jangkauan akses kesehatan khususnya pada masyarakat miskin pengembangan sistem data terintegrasi
- d. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
- e. Diversifikasi pangan berkelanjutan
- f. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri
- g. Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik

2.6. Strategi Smart Environment

- a. Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta
- b. Penguatan konsep gerakan Surabaya Green City melalui lembaga formal dan nonformal
- c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

- d. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri
- e. Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik

3. Rencana Aksi Smart City Daerah

Rencana Aksi Smart City menjadi arah dan pedoman bagi Kota Surabaya dalam menjalankan inovasi untuk mencapai tujuan dan sasaran Smart City. Rencana aksi dikategorikan menjadi 4 aspek yaitu Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Infrastruktur Pendukung, Perangkat Lunak Pendukung dan Penguatan Literasi. Pada setiap inovasi setidaknya mencakup 4 aspek rencana aksi tersebut dan terdapat target tahun pelaksanaannya. Adapun Rencana Aksi Smart City Kota Surabaya pada setiap dimensi adalah sebagai berikut:

3.1. Smart Governance

3.1.1. Efisiensi Kebijakan Publik

Tabel 9. Rencana Aksi Smart Governance - Efisiensi Kebijakan Publik

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital											
1	Aplikasi Planning	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring 21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk	Penyusunan perencanaan dan pendanaan berbasis TIK	2023 - 2026	1. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana TIK pendukung 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana TIK pendukung	2023 - 2026	1. Pemutakhiran data perencanaan dan pendanaan pada aplikasi e-Planning 2. Pengembangan fitur aplikasi e-Planning	2023 - 2026	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi e-Planning	2023 - 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
		per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan									
2	Aplikasi Satu Data, Informasi dan Administrasi (ADINDA)	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Koordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika terkait pengembangan aplikasi	2024-2026	1. Pembuatan desain pengembangan fitur pada aplikasi ADINDA 2. Peningkatan kapasitas ruang penyimpanan aplikasi ADINDA	2024-2026	Aplikasi ADINDA	2024-2026	Sosialisasi aplikasi adinda kepada pengguna baik internal maupun pihak yang terlibat (sekolah, lembaga olahraga)	2024-2026	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
3	SUSAN MAS-E (SURvei kepuasan Masyarakat Elektronik)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Menyusun petunjuk teknis pedoman pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara online 2. Membentuk SK Tim Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemkot Surabaya 3. Melakukan reviu terkait substansi dari instrumen Survei pada aplikasi	2025 2024 2024	Peningkatan kapasitas SDM pengelola aplikasi SUSAN MAS-E	2024	1. Melakukan evaluasi dari sisi user experience secara berkala 2. Pengembangan aplikasi SUSAN MAS-E	2024 2024	Melakukan sosialisasi secara masif kepada pengguna aplikasi SUSAN MAS-E	2024	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

3.1.2. Layanan Publik

Tabel 10. Rencana Aksi Smart Governance - Layanan Publik

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital											
1	Klampid New Generation (KNG)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Review Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 2. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan Administrasi Kependudukan	2025	Peningkatan kapasitas sarana prasarana pendukung aplikasi KNG	2023 - 2026	Pengembangan aplikasi Klampid New Generation (KNG) dengan menambahkan fitur dan jenis layanan sesuai perkembangan, serta penambahan fasilitas keamanan	2023 - 2026	Sosialisasi penggunaan aplikasi Klampid New Generation (KNG) untuk warga melalui media sosial	2023-2026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	LONTONG BALAP (Layanan Online Terpadu One Gate System Bersama Disdukcapil dan Pengadilan Negeri)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Review Nota Kesepakatan Bersama (NKB) dengan Pengadilan Negeri	2025	Peningkatan kapasitas sarana prasarana layanan Administrasi Kependudukan	2023-2026	Pengembangan aplikasi pendukung LONTONG BALAP dengan menambahkan fitur dan jenis layanan sesuai perkembangan, serta penambahan	2023 - 2026	Sosialisasi kepada warga melalui media sosial serta bimbingan teknis kepada petugas Kelurahan dan Pengadilan Negeri terkait inovasi Lontong Balap	2023-2026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
							fasilitas keamanan				
3	LONTONG KUPANG (Layanan Online dan Terpadu Melalui One Gate System Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Review Nota Kesepakatan Bersama (NKB) dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama	2026	Peningkatan kapasitas sarana prasarana layanan Administrasi Kependudukan	2023-2026	Pengembangan aplikasi pendukung LONTONG KUPANG dengan menambahkan fitur dan jenis layanan sesuai perkembangan, serta penambahan fasilitas keamanan	2023 - 2026	Sosialisasi kepada warga melalui media sosial serta bimbingan teknis kepada petugas Kelurahan, Pengadilan Agama dan Kementerian Agama terkait inovasi Lontong Kupang	2023-2026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Aplikasi PUNTADEWA	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Review Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2025	Peningkatan kapasitas sarana prasarana pendukung aplikasi KNG	2023 - 2026	Pengembangan aplikasi pendukung PUNTADEWA dengan menambahkan fitur dan jenis layanan sesuai perkembangan, serta penambahan	2023 - 2026	Sosialisasi kepada warga melalui media masa dan media sosial terkait pencatatan penduduk non permanen	2023-2026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
							fasilitas keamanan				
5	SATE KERANG (Sistem Arsip TERpadu KEpendudukan secara diGital)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Review Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2023-2026	Peningkatan kapasitas sarana prasarana pendukung aplikasi SATE KERANG	2023 - 2026	Pengembangan aplikasi SATE KERANG dengan menambahkan fitur baru dan fasilitas keamanan	2023 - 2026	Bimbingan teknis untuk SDM pengelola arsip	2023-2026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Aplikasi TAKON KLAMPID	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Review Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2025	Peningkatan kapasitas sarana prasarana pendukung aplikasi Takon Klampid	2023 - 2026	Pengembangan aplikasi Takon Klampid dengan menambahkan fitur sesuai kebutuhan	2023 - 2026	Sosialisai penggunaan aplikasi Takon Klampid melalui sosial media	2023-2026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Review Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2025	Peningkatan kapasitas sarana prasarana pendukung aplikasi KNG	2023 - 2026	Pengembangan aplikasi Klampid New Generation (KNG) dengan menambahkan fitur dan jenis layanan sesuai perkembangan, serta penambahan	2023 - 2026	Sosialisasi penggunaan aplikasi Klampid New Generation (KNG) untuk warga melalui media sosail serta Bimbingan teknis untuk ketua RT	2023-2026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
							fasilitas keamanan				
8	Aplikasi SSW Alfa	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Reviu Perwali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan 2. Melakukan koordinasi tentang alur perijinan yang terdapat pada SSW Alfa dengan PD terkait	2023 - 2026	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung aplikasi SSW Alfa	2023 - 2026	Pengembangan dan Pemeliharaan aplikasi SSW Alfa	2023 - 2026	1. Sosialisasi pemanfaatan aplikasi SSW Alfa melalui media sosial	2023 - 2026	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Aplikasi Media Center	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Menindak lanjuti keluhan yang disampaikan oleh pelapor dengan cara berkoordinasi dengan PD yang bersangkutan	2026 - 2026	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi media center	2023-2026	Pengembangan aplikasi media center	2023-2027	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial terkait prosedur durasi waktu penyelesaian pengaduan (pengaduan harus selesai di tindak lanjut maksimal 7 hari kerja)	2023-2026	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
10	Backoffice Webprofile	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Melakukan koordinasi kepada seluruh PD yang belum memiliki website profil, untuk memanfaatkan website backoffice webprofil 2. Perancangan alur aplikasi backoffice webprofil	2023-2026	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi backoffice webprofile	2023-2026	-	-	Sosialisasi kepada seluruh PD terkait pentingnya website profil, sehingga untuk PD yang tidak memiliki website profil dan terkendala SDM yang dapat mengembangkan, maka dapat menggunakan aplikasi backoffice webprofil	2023-2026	Dinas Komunikasi dan Informatika
Strategi: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa											
11	Aplikasi Amelia (Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pasar)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Reviu Perwali Nomor 83 Tahun 2021 2. Penyusunan Surat Edaran Harga pokok dan barang penting 3. Penyusunan SK Tim Pengelola data harga dan stok	2023	Peningkatan kapasitas perangkat komputer	2023 - 2026	1. Pemeliharaan Aplikasi Amelia 2. Pemanfaatan aplikasi pendukung Google Workspace sebagai pendukung 3. Optimalisasi Aplikasi Amelia	2023 - 2026	Sosialisasi pemanfaatan Aplikasi Amelia bagi pedagang pasar	2023 - 2026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
12	Sistem Informasi Report Perizinan Dinas	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi dengan Dinkominfo dan pelaku usaha	2023	Penyiapan Server dan komputer yang memadai	2023-2026	Database Perizinan yang telah dikeluarkan	2023-2029	Sosialisasi dan Bimtek pemanfaatan aplikasi	2023-2026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan											
13	Mall Pelayanan Publik	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	<ul style="list-style-type: none"> -Koordinasi dengan Dinkominfo Kota Surabaya terkait pengembangan website MPP, -Koordinasi terkait Nota Kesepahaman Kerjasama dan Memorandum of Understanding dengan Stake holder, -Koordinasi layanan dengan PD Teknis, -Pembaharuan dokumen terkait Standar Pelayanan. 	2023	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pada MPP	2023-2026	Pengembangan aplikasi mpp.surabaya.go.id	2023 - 2026	Sosialisasi pemanfaatan MPP melalui media sosial	2023 - 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital											

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
14	Pembayaran non tunai retribusi	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	1. Penyusunan Raperda Transportasi 2. Evaluasi dan Optimalisasi sistem	2023-2025	1. Penyediaan barrier gate di semua terminal 2. Upgrade perangkat dan penambahan Reader	2023-2025	Integrator pembayaran	2024	Sosialisasi pembayaran non tunai melalui banner dan media sosial	2023-2025	Dinas Perhubungan
15	Aplikasi PMKS	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Pembaruan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Nomor secara berkala 300.1/2500/436.7.18/2023 2. Ditentukannya Admin PMKS (input data ke aplikasi) 3. Anggota Satpol PP yang melaksanakan penjangkauan PMKS	2023	Pemeliharaan sistem keamanan aplikasi secara berkelanjutan	2023 - 2026	Pengembangan Aplikasi PMKS antara lain: 1. Perubahan tampilan dashboard aplikasi 2. Penambahan fitur google maps untuk mengetahui lokasi titik penjangkauan PMKS 3. Membuat versi android	2023-2026	Adanya sosialisasi internal dengan tujuan: 1. Memberikan pemahaman kepada admin yang melaksanakan penginputan data penjangkauan PMKS terkait pentingnya kerahasiaan data 2. Memberikan pemahaman Perda/aturan hukum kepada Jajaran Anggota Satpol PP dalam melaksanakan penjangkauan PMKS sesuai dengan SOP	2023 - 2026	Satuan Polisi Pamong Praja

3.1.3. Manajemen Birokrasi yang Efisien

Tabel 11. Rencana Aksi Smart Governance - Manajemen Birokrasi yang Efisien

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital											
1	E-SDM	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Penyusunan Surat Edaran pemanfaatan E-SDM	2024	Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi	2023 - 2026	Pengembangan Modul Integrasi (E-SDM dan E-docu) diaplikasi Web Service Mesemku 2023	2024	Sosialisasi sistem terbaru melalui : 1. Surat Edaran 2. Media Sosial	2023 - 2026	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	E-SKP	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan terkait integrasi aplikasi 2. Penyusunan Surat Edaran terkait penilaian kinerja ASN menggunakan SKP	2023 2023-2026	Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi	2023 - 2026	Integrasi E-SKP dengan Mesemku	2023	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi	2023 - 2026	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	E-Learning	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pembuatan SK Kepala BKPSDM tentang pelaksanaan Diklat ELearning	2023 - 2026	Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi	2023 - 2026	Pengembangan Aplikasi E-Learning	2023	Sosialisasi penambahan modul materi	2023 - 2026	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
4	Aplikasi Diklat	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pembuatan surat edaran terkait teknis usulan Ijin Belajar, Penelitian Ijazah, Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) dan Evaluasi Dampak Diklat (EDD)	2023 - 2026	Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi	2023 - 2026	Pengembangan aplikasi Diklat	2023	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi diklat	2023 - 2026	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Sijaka	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait integrasi aplikasi	2023	Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi	2023 - 2026	Pengembangan Aplikasi Sijaka	2023	Sosialisasi penggunaan Fitur-fitur pada Sijaka	2023 - 2026	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Sinora	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait integrasi dengan e-Surat	2023	Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi	2023 - 2026	Pengembangan Aplikasi Sinora	2023	Sosialisasi penggunaan Sinora	2023 - 2026	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Aplikasi SIGASDA	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Koordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika 2. Revisi manual book aplikasi SIGASDA	2023	1. Penambahan jumlah penyimpan pada server 2. Peningkatan keamanan aplikasi	2023	Penambahan fitur pada aplikasi SIGASDA	2023	Pendampingan penggunaan aplikasi SIGASDA	2023 dst	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
8	Aplikasi Epayment	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Koordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika 2. Penyusunan manual book SKPP	2023	1. Penambahan jumlah penyimpan pada server 2. Peningkatan keamanan aplikasi	2023	Penambahan fitur pada aplikasi epayment	2023	Pendampingan penggunaan aplikasi ePayment	2023 dst	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemanfaatan TIK	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Reviu Fitur dan Penyesuaian pada Aplikasi Monev TIK	2023 - 2026	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung Monev Pemanfaatan TIK	2023 - 2026	Pengembangan aplikasi Monev TIK	2023- 2026	Adanya video tutorial pada homepage aplikasi Monev TIK	2023 - 2026	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Optimalisasi Pusat Data	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga terkait pengadaan perangkat pada pusat data (TKDN) 2. Dilakukan kajian terhadap pusat data terkait relokasi pusat data	2023- 2026	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung pusat data (server, PC, jaringan)	2023- 2026	Melakukan maintenance terhadap seluruh software yang mendukung proses kinerja pusat data	2023- 2026	Melakukan sosialisasi kepada PD yang database aplikasinya terletak pada Pusat Data, perlu melakukan konfirmasi kepada Dinkominfo apabila aplikasi sudah tidak aktif digunakan	2023- 2026	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Aplikasi E-Surat	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Adanya pembaruan surat edaran penggunaan e-surat	2023	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi e-surat	2023- 2026	Pengembangan aplikasi e-surat	2023- 2024	Sosialisasi pemanfaatan e-surat ke semua Perangkat Daerah	2023 - 2026	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
12	Pengaduan Keluhan TIK (Service Desk)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Reviu Petunjuk Teknis Service Desk 2. SOP Service Desk	2023 - 2026	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung Layanan Service Desk Operator (Telepon, Headphone, PC, dll)	2023-2026	Pengembangan aplikasi service desk	2023-2024	1. Sosialisasi adanya layanan service desk kepada seluruh PD 2. Pelatihan terkait penanganan awal petugas service desk yang terdapat pada masing-masing PD (Service Desk Tier 1)	2023-2024	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Aplikasi Dashboard Kinerja	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Melakukan koordinasi dengan PD yang terlibat dalam proses penampilan data pada aplikasi dashboard kinerja	2024 - 2026	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi dashboard kinerja	2023-2026	Pengembangan aplikasi dashboard kinerja	2023-2026	Menampilkan data yang dimiliki oleh PD pada aplikasi dashboard kinerja	2023-2026	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Aplikasi Sapu Jagad	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Melakukan koordinasi dengan PD yang akan menggunakan aplikasi sapu jagad (Petugas Lapangan Satpol PP, Satgas DLH)	2025 - 2026	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi sapu jagad	2023-2026	Pengembangan aplikasi sapu jagad	2023-2026	Sosialisasi kepada PD yang menggunakan aplikasi sapu jagad	2023-2026	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Aplikasi Satu Peta	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000	1. Reviu Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia tingkat Kota Surabaya	2026	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi satu peta	2023-2026	Pengembangan aplikasi satu data	2023-2026	Sosialisasi kepada seluruh PD terkait pengembangan aplikasi satu data	2024-2026	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
		penduduk	2. Melakukan koordinasi dengan Bapeddalitbang dan Perangkat Daerah tertentu yang memiliki wewenang atas data yang ditampilkan pada aplikasi satu data 3. Melakukan konsultasi dengan narasumber terkait pengembangan aplikasi satu peta								
16	Elektronik Arsip (e-Arsip)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Melakukan koordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2. Melakukan koordinasi dengan Dinkominfo Kota Surabaya terkait integrasi aplikasi dengan e-Surat dan penggunaan server 3. Pemenuhan SDM diantaranya Programmer, Database Administrator, Network Administrator, System Administrator, Web Master, Web Designer	2024	Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung aplikasi e-Arsip, di antaranya : 1. Web Server 2. Database Server 3. Jaringan Internet FTP 4. Alihmedia Arsip : a. Micro Prosesor b. Micro Writter c. Micro Reater d. Micro Printer e. Kamera Digital	2024	Pengembangan aplikasi Elektronik Arsip (e-Arsip)	2024	1. Sosialisasi pemanfaatan aplikasi Elektronik Arsip (e-Arsip) melalui media sosial 2. Sosialisasi pemanfaatan aplikasi Elektronik Arsip (e-Arsip) melalui Broadband Learning Center	2023 - 2026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
					(Mirrolles) 5. Digitalisasi Arsip : a. Scan Snap b. Komputer c. Harddisk						
17	Si ToMaS PeDe (Sistem moniToring reforMasi birokraSi Perangkat Daerah)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tenaga ahli dalam rangka mengembangkan substansi aplikasi	2025	Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi Si TomaS PeDe	2024	Pengembangan aplikasi Si TomaS PeDe	2024	Melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi Si TomaS PeDe kepada PD secara berkala	2024	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
18	Telaga Asia (sisTem Evaluasi KeLembaGaan kotA SurabayA)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Menyusun petunjuk teknis pedoman pengisian evaluasi mandiri pada aplikasi Telaga Asa	2024	Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi TELAGA ASA	2024	Pengembangan aplikasi TELAGA ASA	2024	Melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi TELAGA ASA kepada PD secara berkala	2024	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
19	Aplikasi Penganggaran (eProject, eControlling, eDelivery, ePerformance)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya, pihak Penyedia Barang / Jasa dan jajaran samping lainnya	2023	Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung aplikasi Penganggaran	2023	Pengembangan aplikasi penganggaran	2023	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi penganggaran melalui media Zoom	2023	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan)

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
20	Klinik Pengadaan Barang/Jasa	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	2023	Penambahan dan Peningkatan SDM dan Titik Pelayanan	2023 - 2026	Penambahan aplikasi eGuest dan Indeks Kepuasan Masyarakat	2023	Sosialisasi pemanfaatan klinik pengadaan melalui media elektronik	2023 - 2026	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan)

3.2. Smart Branding

3.2.1. Ekosistem Bisnis Daerah

Tabel 12. Rencana Aksi Smart Branding - Ekosistem Bisnis Daerah

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa											
1	Operasi Pasar dan Pasar Murah	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Penyusunan Surat Keputusan Tim Pelaksana Operasi Pasar Murah	2023	Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah (Meja, Kursi, ATK)	2023 - 2026	Pemanfaatan aplikasi pendukung Ms. Office	2023 - 2026	Sosialisasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah bagi distributor dan pedagang pasar serta	2023 - 2026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
									warga masyarakat		
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan											
2	PESONA BUAYA (Pendampingan Sinergi dan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMK Surabaya	-	1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 100.3.5.4/476/436.7.15/ 2023 tentang Penetapan Inovasi dan Pembentukan Tim Teknis Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Koordinasi terkait Pengembangan Kegiatan dengan Pakar Praktisi dan Akademisi UNAIR, UMS, ITS, dan UNESA, 3. Koordinasi layanan	2023	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung, bersinergi dengan lebih banyak pihak yang kompeten di bidang upgrade skill UMK	2023- 2026	-	-	Sosialisasi kegiatan PESONA BUAYA melalui media Instagram @dpmptpsby, @pelayanan_perizinan berusaha, chanel Youtube DPMPTSP Kota Surabaya, dan tiktok @ppb_surabaya	2023 - 2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
			dengan Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi-Perdagangan, Bank Jatim, dan Kantor Pajak Pratama								

3.2.2. Wajah Kota

Tabel 13. Rencana Aksi Smart Branding - Wajah Kota

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa											
1	Festival Rujak Uleg	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Koordinasi dengan seluruh PD terkait pelaksanaan festival rujak uleg serta tim keamanan dan kebersihan	2024-2026	Penyiapan lokasi festival rujak uleg, perlengkapan rujak uleg, dan fasilitas pengamanan acara (pembatas jalan dengan masyarakat)	2024-2026	Media sosial	2024-2026	Pemasangan iklan kegiatan festival rujak uleg	2024-2026	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
2	Surabaya Vaganza	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Koordinasi dengan PD dan Stakeholder peserta acara surabaya vaganza serta tim keamanan dan kebersihan	2024-2026	Penyiapan lokasi surabaya vaganza, penyiapan fasilitas pengamanan acara (pembatas jalan acara dengan masyarakat)	2024-2026	Media sosial	2024-2026	Pemasangan iklan kegiatan surabaya vaganza	2024-2026	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
Strategi: Pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah serta pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak											
3	Sistem Informasi Gender Arek Suroboyo (SIGAS)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika	2024	Pembaruan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi SIGAS	2023 - 2026	Sistem Informasi Gender Arek Suroboyo (SIGAS)	2023-2026	Sosialisasi pemanfaatan fungsi aplikasi SIGAS kepada seluruh Perangkat Daerah	2023-2026	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Strategi: Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta											
4	Transportasi Umum Terintegrasi melalui feeder wira wiri dan Surabaya Bus	19.6. Persentase layanan transportasi umum kota yang dicakup oleh sistem pembayaran terpadu	Berkoordinasi dengan tim tenaga ahli terkait penyediaan peralatan pendukung	2023-2026	Penyediaan perangkat Long Range RFID On board unit yang akan dipasangkan pada kendaraan.	2023-2026	Pengembangan Sistem pada On Board Unit yang terpasang dalam kendaraan	2023-2026	Sosialisasi penggunaan angkutan umum trunk dan feeder kepada masyarakat melalui sosial media yang dikelola oleh Dinas Perhubungan	2023 - 2026	Dinas Perhubungan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
									Kota Surabaya		
5	Desain pedestrian	7.7. Persentase penerangan jalan yang telah dipugar dan yang baru dipasang	-	2023	Mengembangkan desain lantai pedestrian	2023	Pemanfaatan aplikasi Desain berlisensi	2023 - 2026	Sosialisasi program melalui media sosial	2023 - 2026	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

3.2.3. Wisata

Tabel 14. Rencana Aksi Smart Branding - Wisata

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa											
1	e-Ticketing Destinasi Wisata Surabaya	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas terkait pembentukan POKDARWIS di beberapa lokasi di Kota Surabaya	2023-2026	Pengembangan objek wisata dan sekitaran objek (Rintisan, Pemantapan, Revitalisasi)	2023-2026	Aplikasi Tiket wisata	2024-2026	Sosialisasi objek wisata yang ada disurabaya kepada masyarakat melalui event-event kota	2024-2026	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan											
2	Adventure Land Romokalisari	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Pengembangan kebijakan & Kelembagaan pengelolaan Adventure Land Romokalisari	2023 - 2024	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pendukung wisata	2024	Pembayaran wahana wisata melalui transaksi digital	2024 - 2026	Promosi wisata melalui media sosial	2023 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

3.3. Smart Economy

3.3.1. Industri Berdaya Saing

Tabel 15. Rencana Aksi Smart Economy - Industri Berdaya Saing

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan											
1	Lapis Lupis (Layanan Asistensi Pengisian dan Fasilitasi LKPM Untuk Peningkatan Investasi)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Koordinasi dengan BKPM / Kementerian Investasi dan DPM-PTSP Provinsi Jatim terkait update perkembangan Nilai Investasi Kota Surabaya; 2. Training of Trainers (ToT) bagi Tim Fasilitator Pengendalian Penanaman Modal; 3. Pembaharuan dokumen terkait Standar Pelayanan.	2023	1. Penyediaan Layanan FGD 2. Bimtek/Workshop/Seminar 3. Survey dan Bimbingan di tempat pelaku usaha	2023-2026	Aplikasi LKPM Online	2023	Sosialisasi tata cara dan pedoman pelaporan kegiatan penanaman modal pelaku usaha setiap kbli dan lokasi proyeknya	2023-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sistem Informasi Pengawasan Kegiatan Usaha Perdagangan berbasis GIS	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi dengan Dinkominfo	2023	Penyiapan Server dan komputer yang memadai	2023-2026	Penyusunan aplikasi pengawasan berbasis GIS	2023-2026	Pemberian sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada petugas pengawas dan pengelola data terkait penggunaan aplikasi	2023-2026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
3	Klinik Investasi	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	1. Review Perwali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan terkait alur pelayanan; 2. Koordinasi dengan Perangkat Daerah Perizinan : Perangkat Daerah yang terlibat dalam Perizinan merupakan bagian teknis dari percepatan dan kemudahan Perizinan Berusaha	2022-2026	1. Koordinasi dengan Badan Pengelolaan dan Keuangan serta Aset Daerah : Pengelola Gedung Mal Pelayanan Publik; 2. Koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Administrasi Pembangunan : Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Klinik Investasi	2022-2026	1. Koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan : Penyediaan Peta Peruntukan dan Desain Interior Klinik Investasi; 2. Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika : Penyediaan Jaringan Internet serta konten video promosi Kota Surabaya.	2022-2026	Sosialisasi Kemudahan Berusaha Bagi Calon Investor / Investor Kota Surabaya Melalui Klinik Investasi	2023-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	RINDU (Rekapitulasi Data Industri)	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Koordinasi dengan Industri Kecil Menengah, DPMPTSP	2023	Peningkatan kapasitas storage pada server untuk mendukung kebutuhan ruang penyimpanan aplikasi RINDU	2024	Pengembangan fitur dan ketepatan titik koordinat lokasi industri pada aplikasi RINDU	2024	Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi RINDU	2022-2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
5	E-Industri	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Koordinasi dengan Industri Kecil Menengah, industri besar kota surabaya	2024	Peningkatan kapasitas storage pada server untuk mendukung kebutuhan ruang penyimpanan katalog produk pada aplikasi E-Industri	2024	Pengembangan Aplikasi E-Industri	2024	Sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan aplikasi E-Industri kepada pelaku usaha/industri	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
6	Paving Geprek (padat Karya)	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Pelaksanaan kegiatan melalui SK Tim Produksi Paving	2023	Pemanfaatan Lahan, Bangunan dan Peralatan pendukung Padat Karya Paving	2023 - 2026	Pemanfaatan Aplikasi Padat Karya	2023 - 2026	Sosialisasi program padat karya produksi paving melalui kecamatan / kelurahan dan media sosial kepada Keluarga Miskin	2023 - 2026	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Strategi: Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia											
7	IPRO - Investment Project Ready to Offer	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	1. Koordinasi dengan BAPPEDALITBANG terkait investment project yang menjadi prioritas pembangunan Kota Surabaya; 2. Koordinasi dengan Pakar Praktisi dan Akademisi terkait Investment Project	2023	Peningkatan akses informasi calon investor baru	2023-2026	Pengembangan pada website Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya https://dpm-ptsp.surabaya.go.id/petapotensiinvestasi/	2023	Sosialisasi IPRO - Investment Project Ready to Offer Bagi Calon Investor / Investor Kota Surabaya	2023-2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
			(Analisa Teknis, Analisa Legal, Analisa Pasar, Analisa Sosial dan Lingkungan, Analisa Resiko dan Analisa Ekonomi).								
Strategi: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa											
8	Rumah Tera (Website UPTD Metrologi Legal)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Penyusunan SK Tim Sidang Pasar Tera Ulang dan SK Tim pengawasan alat ukur	2023	Peningkatan kapasitas perangkat komputer	2023-2026	Pengembangan Rumah Tera dan pemanfaatan Google Workspace untuk mendukung inovasi	2023-2026	Monitoring hasil sidang tera, Publikasi melalui Media Sosial dan sosialisasi program Rumah Tera	2023-2026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
9	SiTerasi (Sidang Tera Ulang dengan Reparasi)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Penyusunan SK Tim seleksi tenaga reparatir profesional dan SK Tim Sidang Pasar Tera Ulang	2023	Alat Reparasi Ringan pada pelayanan tera/Tera Ulang di pasar	2023	Penggunaan aplikasi Microsoft Office dan Aplikasi e-Delivery	2023-2026	Publikasi melalui Media Sosial dan sosialisasi program si Terasi	2023-2026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
10	Aplikasi Pensil Bu-In	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	SK Tim mediasi perkara perselisihan hubungan industrial	2023	Penambahan kapasitas server untuk mendukung optimalisasi aplikasi	2023	Pengembangan Pensil Bu-In	2024	Sosialisasi manfaat pencatatan perselisihan hubungan industrial melalui aplikasi	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
11	Sistem Informasi Verifikasi Laporan PHK	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan	2023	Penambahan kapasitas server untuk mendukung optimalisasi aplikasi	2024	Pembangunan Aplikasi Verifikasi Laporan PHK	2025	Menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan persyaratan dan tata cara klaim manfaat JKP	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

3.3.2. Kesejahteraan Rakyat

Tabel 16. Rencana Aksi Smart Economy - Kesejahteraan Rakyat

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan											
1	Ladang pangan	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	2023-2024	Peningkatan Sarana dan Prasana untuk menunjang output dan sarana prasarana pelatihan	2023-2024	1. Penggunaan aplikasi E-Planing sebagai sarana monitoring pelaksanaan pengadaan infastruktur pendukung, pemberdayaan GAKIN dengan memanfaatkan	2023-2026	1. Sosialisai kebijakan terkait budidaya perternakan, pertanian dan perikanan 2. Sosialisasi hasil pelatihan olahan pangan melalui media sosial	2023-2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
							lahan aset Pertanian melalui program PADAT KARYA 2. Penggunaan aplikasi E-Planing dan SIMANTAN sebagai sarana monitoring pelaksanaan pengadaan infastruktur pendukung, pemberdayaan GAKIN dengan memanfaatkan lahan aset Pertanian melalui program PADAT KARYA 3. Penggunaan aplikasi E-Monev sebagai sarana monitoring pelaksanaan pelatihan 4. Pengembangan aplikasi Sistem Bantuan Masyarakat				

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
2	Aplikasi Padat Karya	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Melakukan koordinasi dengan PD yang berkaitan dengan intervensi pada aplikasi padat karya	2023 - 2026	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi padat karya	2023-2026	Pengembangan aplikasi padat karya	2023 - 2026	Sosialisasi kepada seluruh pengguna aplikasi padat karya (Masyarakat, PD terkait)	2023 - 2026	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Reviu Perwali Nomor 83 Tahun 2023 tentang SOTK Dinkopdag 2. Penyusunan SE ASN Wajib menggunakan produk dalam negeri 3. Penyusunan SE ASN Pemkot Wajib Belanja di aplikasi Peken 4. Koordinasi dengan Dinkominfo terkait pengembangan aplikasi dan promosi melalui media sosial 5. Penyusunan SK Tim Pelaksana Pelaksanaan Promosi Produk pada aplikasi peken 6. Penyusunan SK TIM peningkatan kapasitas Toko	2023	Pemeliharaan infrastruktur e-Peken	2023 - 2026	Optimalisasi e-Peken	2023 - 2026	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi E-Peken melalui media sosial dan pelatihan	2023 - 2026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
			Kelontong di aplikasi Peken								
Strategi: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran											
4	Pendaftaran Pelatihan Online	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi Lembaga Pelatihan Kerja, Bapemkes, Kecamatan dan Kelurahan	2023	Penambahan kapasitas server untuk mendukung optimalisasi aplikasi	2024	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pendaftaran pelatihan online	2024	Sosialisasi dan penyebaran informasi melalui sosial media	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5	PRO GADIS (Program Magang Disabilitas)	13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	Koordinasi dengan Perusahaan, Sekolah Luar Biasa	2023	Pengadaan barang berupa laptop	2024	Pemanfaatan ruang penyimpanan file sharing	2025	Sosialisasi dan penyebaran informasi melalui sosial media	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
6	PENTAS (Kompetensi produktifitas) Fasilitasi sertifikasi profesi bagi angkatan kerja untuk meningkatkan daya saing masyarakat	13.2. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus	Koordinasi Lembaga Sertifikasi Profesi, Bapemkes, Kecamatan dan Kelurahan	2023	Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung aplikasi pendaftaran pelatihan dan sertifikasi	2024	Pengembangan fitur untuk penyediaan fitur upload sertifikasi pelatihan pada biodata di aplikasi ASSiK	2024	Sosialisasi kepada peserta pelatihan dan sertifikasi	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
7	ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	SK TIM Job Fair Koordinasi dengan Perusahaan, Kecamatan dan Kelurahan	2023	Pedoman Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	2023	Pengembangan Aplikasi ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo)	2023	Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) melalui media sosial (Youtube dan Instagram)	2021- 2023	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8	Laporan Penonaktifan Pekerja secara digital	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi dengan BPJS Kesehatan	2023	Kapasitas Google Drive yang memadai	2023	Google Form, Google Spreadsheet	2023	Sosialisasi Penggunaan Form Laporan Penonaktifan Pekerja kepada Perusahaan peserta BPJS Kesehatan	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
9	Sistem Informasi Ketenagakerjaan	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi dengan Dinkominfo dan BPJS Ketenagakerjaan	2023	Penambahan kapasitas server untuk mendukung optimalisasi aplikasi	2024	Pengembangan fitur pelaporan dan penonaktifan pekerja Aplikasi SINTEN	2026	Sosialisasi penggunaan Aplikasi SINTEN	2024	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Strategi: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa											
10	Aplikasi Laporan keuangan Koperasi	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi dengan Dinkominfo	2025	Pemeliharaan infrastruktur aplikasi	2023 - 2026	Pengembangan Aplikasi Laporan keuangan Koperasi	2023 - 2026	Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan melalui aplikasi laporan keuangan koperasi	2023 - 2026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
11	Aplikasi pengawasan koperasi (Awasi Boyo)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi dengan Dinkominfo	2023	Penyediaan Server, komputer yang memadai	2023 - 2026	Penyusunan aplikasi pengawasan koperasi	2023 - 2026	Pemberian sosialisasi melalui kegiatan pengawasan/pemeriksaan rutin, Bimtek dan bentuk sosialisasi lainnya	2023 - 2026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
12	Aplikasi UMKM	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Koordinasi pemangku kepentingan serta Dinkominfo terkait infrastruktur 2. Penyederhanaan PKS serta mempermudah proses pengajuan	2023 2023-2026	1. Peningkatan kapasitas komputer dan kecepatan bandwidth 2. Menambah kapasitas/storage aplikasi utama	2023-2026 2023-2026	Menambah fitur-fitur baru guna mempermudah dan mempersingkat proses	2023-2026	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi UMKM melalui media sosial dan pelatihan penggunaan aplikasi UMKM	2023-2026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
13	Pengembangan Unit Usaha Koperasi Sektor Riil dengan menggunakan business model canvas (BMC)	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Koordinasi dengan DInkominfo	2023	Laptop/komputer yang memadai	2023 - 2026	-	2023 - 2026	Pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan/atau asistensi kepada penggerak koperasi di Kota Surabaya terkait pengembangan usaha koperasi dan atau anggotanya di sektor riil serta memperkuat peran koperasi sektor riil dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan anggota dan pengentasan kemiskinan	2023 - 2026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
14	Sistem Barcode Pedagang	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Penyusunan SK Tim dan pemasangan pemeliharaan barcode	2023	Peningkatan kapasitas perangkat komputer dan pemutakhiran Alat Scan Barcode	2023 - 2026	Pemanfaatan Ms. Office dan Aplikasi Berbasis Web	2023 - 2026	Sosialisasi pemanfaatan Sistem Barcode bagi para Pedagang Pasar	2023 - 2026	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

3.3.3. Transaksi Keuangan

Tabel 17. Rencana Aksi Smart Economy - Transaksi Keuangan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan											
1	Aplikasi Peken	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan serta stakeholder lainnya yang terkait	2023 - 2026	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi peken	2023-2026	Pengembangan aplikasi peken	2023 - 2026	Sosialisasi kepada seluruh pengguna aplikasi peken (Penjual, PD terkait dan seluruh ASN)	2023 - 2026	Dinas Komunikasi dan Informatika

3.4. Smart Society

3.4.1. Ekosistem Belajar

Tabel 18. Rencana Aksi Smart Society - Ekosistem Belajar

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta secara berkelanjutan											
1	Aplikasi SIAGUS	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Koordinasi dengan sekolah dan tenaga pendidikan 2. Pengembangan tenaga pendidikan	2023-2026	Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung aplikasi SIAGUS	2023-2024	Pengembangan aplikasi SiAGUS	2023	Sosialisasi kepada guru dan tenaga kependidikan	2023-2026	Dinas Pendidikan
2	Program Sekolahe Arek Suroboyo	-	Peningkatan kapasitas guru Sekolahe Arek Suroboyo	2023-2026	Pemeliharaan sarana prasarana pendukung Sekolah	2023-2024	Pengembangan aplikasi Profil Sekolah	2024	Sosialisasi dan pembinaan kepada sekolah yang mengikuti program Sekolahe Arek Suroboyo	2023-2026	Dinas Pendidikan
3	Pengembangan PAUD HI	-	Peningkatan kapasitas pendidik PAUD	2023-2026	Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi profil sekolah	2023-2024	Pengembangan aplikasi SiBunda	2024	Sosialisasi dan pembinaan kepada pendidik PAUD	2023-2026	Dinas Pendidikan
Strategi: Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri											

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
4	Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS)	17.3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e- book per 100.000 penduduk	1. Melakukan koordinasi dengan penerbit buku 2. Melakukan koordinasi dengan Dinkominfo Kota Surabaya terkait penggunaan server	2024	Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung aplikasi SIPUS, di antaranya : 1. Web Server 2. Database Server 3. Jaringan Internet FTP 4. Digitalisasi Perpustakaan : a. Scan Snap b. Komputer c. Harddisk 5. SDM yang di butuhkan : a. Programmer b. Database Administrator c. Network Administrator d. System Administrator e. Web Master f. Web Designer	2024	Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS)	2024	1. Sosialisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS) melalui media sosial 2. Sosialisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS) melalui Broadband Learning Center	2023 - 2026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
5	Gendis Sewu	-	Reviu Perwali Nomor 86 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya		1. Panduan Pelaksanaan Pembinaan Gendis Sewu sebagai Indikator Pencapaian 2. Materi Menulis Cerita Pendek dan Menulis Ekspresif yang berstandart dan terpusat 3. Materi mendongeng yang berstandart dan terpusat 4. ATK 5. Laptop dan printer 6. Aplikasi layout buku, ruang cerpen dan CD dongeng 7. Ruang untuk Zoom Meeting 8. Kamera 9. Ruang Penyimpanan Gdrive 10. Alat untuk cek plagiasi	2024	Aplikasi pendukung Gendis Sewu yaitu Taman Kalimas	2024	- Sosialisasi pemanfaatan Gendis Sewu melalui media sosial. - Sosialisasi pemanfaatan Gendis Sewu melalui media cetak dan elektronik	2023-2026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Peningkatan sumberdaya dan jangkauan penanggulangan bencana berbasis spasial											
1	Program SINA - SINI (Edukasi Bencana Usia Dini)	-	Pembuatan SK Tim SINA - SINI Koordinasi dengan akademisi	2023	Penyempurnaan materi pembelajaran bersama instansi terkait	2023	Pengembangan Program SINA - SINI (Edukasi Bencana Usia Dini)	2023	1. Penguatan Materi Program SINA - SINI (Edukasi Bencana Usia Dini) 2. Pembuatan Petunjuk teknis Program SANA - SINI Sosialisasi program SANA - SINI	2023 - 2026	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah

3.4.2. Interaksi Masyarakat yang Efisien

Tabel 19. Rencana Aksi Smart Society - Interaksi Masyarakat yang Efisien

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta secara berkelanjutan											
1	SICABOR (Sistem Informasi Cabang Olahraga)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Koordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika terkait pengembangan aplikasi 2. Koordinasi dengan	2024- 2026	1. Pembuatan desain pengembangan fitur pada aplikasi SICABOR 2. Peningkatan kapasitas ruang	2024- 2026	Aplikasi SICABOR	2024- 2026	Sosialisasi terkait penamabhan fitur aplikasi SICABOR kepada pengguna	2024- 2026	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
			sekolah terkait penguatan literasi guru olahraga dan fasilitas sarana prasana olahraga disekolah 3. koordinasi dengan PD dan lembaga terkait sarana dan prasana pendukung olahraga		penyimpanan aplikasi SICABOR						
Strategi: Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri											
2	Digitalisasi Kelas Calon Pengantin	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Reviu Instruksi Walikota No. 1 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dalam Rangka Pencegahan Stunting 2. Melakukan kerjasama lintas sektor dalam pengembangan aplikasi sayang warga bersama Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, Dinas Komunikasi Informatika, Dinas	2024 2023 - 2026	Peningkatan kapasitas dan pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi sayang warga dan aplikasi wargaku	2023 - 2026	Pengembangan Aplikasi SSW Alfa, Sayang Warga, Aplikasi Wargaku, Ehealth	2023 - 2026	Sosialisasi, Publikasi, dan penguatan literasi Kelas Catin melalui media cetak / elektronik	2023 - 2026	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
			Kesehatan								
3	Ayo Sinau Bareng dan Ngaji Bareng	-	Peningkatan kapasitas tutor sinau bareng	2023- 2026	Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi profil sekolah	2023- 2024	Pengembangan aplikasi Profil Sekolah	2024	Sosialisasi dan pembinaan kepada tutor sinau bareng di balai RW	2023- 2026	Dinas Pendidikan
4	Komunitas Belajar Surabaya Setara Hebat	-	Peningkatan kapasitas tutor PKBM	2023- 2026	Pengembangan modul Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	2023- 2024	-	2023	Sosialisasi dan pembinaan kepada tutor PKBM	2023- 2026	Dinas Pendidikan

3.4.3. Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat

Tabel 20. Rencana Aksi Smart Society - Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital											
1	Aplikasi E-PPNS	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Pembaruan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Nomor secara berkala 800/83/436.7.18/2023 2. Ditentukannya Admin Aplikasi E-PPNS 3. Anggota PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)	2023	Pengoptimalan infrastruktur pendukung aplikasi E-PPNS	2023 - 2026	Pemanfaatan Aplikasi E-PPNS yang sudah ada	2023	Adanya sosialisasi internal dengan tujuan memberikan pemahaman kepada anggota PPNS maupun kepada admin aplikasi E-PPNS dan jajaran komando Satpol PP dalam pemanfaatan aplikasi E-PPNS	2023 - 2026	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Aplikasi Gudang	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Pembaruan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Nomor secara berkala 300.1/1627/436.7.18/2023 2. Ditentukannya Admin Gudang	2023	Pemeliharaan sistem keamanan aplikasi secara berkelanjutan	2023-2026	Pengembangan Aplikasi Gudang antara lain: 1. Penambahan fitur Login 2. Penambahan upload foto 3. Penambahan fitur pencarian data 4. Penambahan cetak	2023-2026	Adanya sosialisasi internal dengan tujuan: 1. Memberikan pemahaman kepada Admin satpol terkait pentingnya entri data hasil penertiban pada aplikasi 2. Memberikan pemahaman terkait	2023 - 2026	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
							laporan 5. Penambahan rekapitulasi data jumlah barang masuk dan keluar		SOP penerimaan dan penyerahan barang hasil penertiban kepada anggota pengamanan gudang Satpol PP		
3	Aplikasi Armada	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Pembaruan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Nomor secara berkala 300.1/1592/436.7.18/2023 2. Ditentukannya Admin Armada	2023	1. Pemeliharaan sistem keamanan aplikasi secara berkelanjutan 2. Koneksi Jaringan Internet 3. Handphone	2023- 2026	"Pengembangan Aplikasi Armada antara lain: 1. Penambahan fitur Login 2. Penambahan upload foto 3. Penambahan fitur pencarian data 4. Penambahan cetak laporan 5. Penambahan rekapitulasi data jumlah barang masuk dan keluar "	2023- 2026	Adanya sosialisasi internal dengan jajaran driver dan teknisi terkait pentingnya melakukan entri data ke aplikasi armada dengan tujuan agar memudahkan proses monitoring armada	2023 - 2026	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
4	SI Pelanggaran (Penegakan) Perda Reklame	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Pembaruan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Nomor secara berkala 800/2476/436.7.18/2023 2. Admin Aplikasi SI Pelanggaran (Penegakan) Perda Reklame	2024	1. Koneksi Jaringan internet 2. Pemeliharaan sistem keamanan aplikasi secara berkelanjutan	2023-2026	Pengembangan Aplikasi SI Pelanggaran Reklame antara lain : 1. Di fitur Aplikasi user masuk ke Bidang terkait dengan surat pemberitahuan di mohon untuk merubah format surat seperti surat pemberitahuan yang baru 2. Di fitur Aplikasi user masuk ke Bidang terkait dengan entri lampiran surat masuk , judul semua surat tertuliskan dari Dinas Cita Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya saja padahal ada dari Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya 3. Untuk Fitur di entry	2023-2026	Melakukan sosialisasi internal dengan tujuan memberikan pemahaman kepada admin aplikasi tentang: 1. Pentingnya entri data pada aplikasi SI Pelanggaran Reklame 2. Data yang diperoleh dari Tim Cakra sesuai dengan SOP 3. Memberikan pemahaman Perda/aturan hukum kepada Jajaran Anggota Tim Cakra sesuai dengan SOP	2023 - 2026	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
							lampiran surat masuk selain data nama pemilik di mohon untuk menambahkan nama biro 4. Untuk fitur surat pemberitahuan di mohon untuk merubah nama datanya yaitu dari Dlnas Pendapatan Daerah Kota Surabaya				
5	Tim Penegak Perda (Pencegahan, Penanganan dan Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Surabaya)	-	1. Pembaruan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Nomor 300.1/2500/436.7.18/2023 (Seluruh Tim kecuali Tim Cakra dan Tim Gakda) secara berkala 2. Pembaruan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Nomor secara berkala 800/2476/436.7.18/2023	2023	1. Sarana Prasarana (Sepeda Angin, Seragam Khusus, Armada Patroli, truk pengangkut barang, Perahu Karet/Speedboat, kendaraan operasional mobil patroli, kendaraan operasional sepeda motor) 2. Alat Komunikasi (Smartphone, HT dan Pengeras Suara)	2023-2026	-	-	Adanya sosialisasi internal dengan tujuan memberikan pemahaman terkait tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada masing-masing Tim	2022-2026	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
			(Tim Cakra 3. Pembaruan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Nomor secara berkala 800/2439/436.7.18/2023 (Tim Gakda) 4. Penyiapan Personil / Tim yang kompeten		3. Alat kelengkapan tugas (tanda terima barang, tang, bodem, linggis, tali tambang dll) 4. Peralatan pendukung untuk menyelam (tabung oksigen, baju menyelam, dll) 5. Sarana Prasarana berupa tabung las dan kelengkapannya, tali tambang, tangga, mobil patroli, truk pengangkut barang, dan skywalker 6. Peralatan K3 seperti Helm pelindung, tang, tangga dll						
Strategi: Peningkatan sumberdaya dan jangkauan penanggulangan bencana berbasis spasial											
6	Commad Center Siaga 112	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	Koordinasi dengan OPD, TNI, POLRI, PDAM, dan Jajaran Samping Terkait	2023	1. Penambahan kapasitas dan jaringan komputer dan untuk mendukung aplikasi program 2. Melakukan Studi Banding Berkala terkait	2023	Pemantapan Program Commad Center Siaga 112	2023	Sosialisasi pemanfaatan Program Commad Center Siaga 112 kepada masyarakat melalui media sosial	2023 - 2026	Badan Penanggulan Bencana Daerah

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
7	Aplikasi Sigap (Siaga Bencana) Kota Surabaya	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi dengan BMKG, Akademisi, OPD	2023	1. Penambahan kapasitas dan jaringan komputer dan untuk mendukung aplikasi program 2. Melakukan Studi Banding penyempurnaan Materi Aplikasi dan Kajian bersama Instansi terkait	2023	Pengembangan aplikasi Sigap (Siaga Bencana) Kota Surabaya	2023	Sosialisasi serta penerapan langsung pada masyarakat di lapangan terkait aplikasi Sigap (Siaga Bencana) Kota Surabaya	2023 - 2026	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Tata Kelola Keamanan Informasi	-	1. Penyusunan Perwali terkait tata kelola keamanan informasi (melakukan konsultasi dengan narasumber) 2. SOP Permintaan Layanan TI (terkait permintaan domain surabaya.go.id) 3. Melakukan koordinasi terkait hasil pengecekan celah keamanan informasi kepada PD yang mengajukan permintaan akses domain	2023 - 2026	Peningkatan dan pemeliharaan perangkat pendukung tata kelola keamanan informasi (server, jaringan, PC)	2023-2026	Seluruh aplikasi yang databasenya berada di pusat data	2023-2026	Melakukan Sosialisasi kepada seluruh PD terkait: - Pentingnya penggunaan domain surabaya.go.id - Alur pengajuan permintaan akses domain surabaya.go.id - Keamanan menyimpan data pada Pusat Data - Untuk PD yang memiliki server mandiri, dihimbau agar	2023-2026	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
			surabaya.go.id 4. Monitoring dan Evaluasi status penggunaan aplikasi (aktif digunakan atau tidak)						melakukan standarisasi keamanan informasi berdasarkan ISO 27001 atau minimal Indeks KAMI - Untuk PD yang database aplikasinya terletak pada Pusat Data, perlu melakukan konfirmasi kepada Dinkominfo apabila terdapat pengembangan aplikasi dan apabila aplikasi sudah tidak aktif digunakan		
9	MCFA (Master Control Fire Alarm)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi dengan PD terkait keamanan bangunan gedung (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	2023 - 2026	Penambahan modul MCFA pada alarm kebakaran di gedung pemerintahan	2023- 2026	Pengembangan fitur pada Aplikasi Siaga 112	2023- 2026	Sosialisasi kepada pengguna aplikasi 112 terkait penambahan modul MCFA sebagai percepatan informasi dan penanganan kebaruan pada gedung pemerintahan	2023- 2026	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
10	Aplikasi Command Center 112	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Reviu Peraturan Walikota No 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Command Center 112 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder lain (kota lain atau instansi swasta lainnya) terkait adanya integrasi pada aplikasi pengaduan 112 dengan tujuan agar dapat meneruskan keluhan pelapor kepada pihak yang lebih memiliki wewenang	2025	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung command center 112	2023-2026	Penambahan fitur dial phone pada aplikasi pengaduan 112	2023-2026	Sosialisasi kepada masyarakat melalui sosial media terkait adanya layanan 112 yang dapat membantu segala keluhan masyarakat	2023-2026	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 112	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Penyusunan perwali terkait tim peningkatan keamanan 2. Pembuatan alur pelaksanaan CSIRT 112 3. Melakukan konsultasi dengan narsum 4. Peningkatan kompetensi SDM	2023-2026	Pemeliharaan infrastruktur pendukung pusat data	2023-2026	Pengembangan dan pemeliharaan perangkat pusat data	2023-2026	pembuatan alur pelaksanaan CSIRT 112	2023-2026	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
12	Roti 7 Lapis	-	Koordinasi dengan Dishub dan Personel cc room	2023	Pemeliharaan unit pendukung seperti mobil dan motor rescue	2023-2025	- Aplikasi Buku Saku Damkar sebagai aplikasi perekam dan pegolah data evakuasi - Penggunaan aplikasi siaga 112 untuk menuju lokasi kedaruratan	2023-2025	Sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Roti 7 Lapis	2023-2025	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
13	Truk Tangker	-	Koordinasi dengan BPBD dan Basarnas	2023	Pemeliharaan sarana dan prasarana evakuasi untuk mempercepat proses penyelamatan	2023-2025	Pengembangan Aplikasi Buku Saku Laporan Kebakaran dan Evakuasi	2023-2025	Sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Truk Tangker	2020-2026	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
14	Face (Fire Alarm Connected)	-	Koordinasi dengan personel cc room dan pemilik gedung	2023	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program Face (Fire Alarm Connected)	2023-2025	Pengembangan perangkat FACE, dan mekanisme perawatan pernakatnya	2023-2025	Sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Face (Fire Alarm Connected)	2023-2025	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
15	Madagaskar (Masyarakat dan Keluarga Siaga Bencana Kebakaran)	-	SK Tim Program Keluarga Sehat Tangguh Tanggap Bencana Siaga Kebakaran	2023	Pemeliharaan sarana alat peraga simulasi dan sosialisasi kepada Kader Madagaskar	2023-2025	Pengembangan Aplikasi Sayang Warga	2023-2025	Sosialisasi secara rutin kepada kader-kader Surabaya Hebat di tiap Kelurahan	2023-2025	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
16	Wisata Edukasi Damkar Cilik (WISDAMCIL)	-	SK Tim Wisata Edukasi Damkar Cilik	2023	Pengembangan alat pembelajaran pencegahan kebakaran untuk usia dini	2023-2025	Pengembangan Aplikasi Buku Saku	2023-2025	- Pengembangan materi sosialisasi Wisata Edukasi Damkar Cilik - Sosialisasi kepada lembaga PAUD mengenai program WISDAMCIL	2023-2025	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
17	Damkar Kota Sambang Kampus	-	Koordinasi dengan Perguruan negeri dan swasta	2023	Pengembangan alat pembelajaran pencegahan kebakaran	2023-2025	Pengembangan Aplikasi Buku Saku	2023-2025	Sosialisasi secara rutin kepada kader-kader Surabaya Hebat di tiap perguruan negeri dan swasta	2023-2025	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
18	SIKEKAL (Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2023	Pengembangan alat pembelajaran pencegahan kebakaran	2023-2025	Pengembangan Aplikasi Buku Saku	2023-2025	Sosialisasi secara rutin kepada kader-kader Surabaya Hebat di tiap Kelurahan dan Kecamatan	2023-2025	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
19	Mosidamkar (Mobil Simulasi Pemadam Kebakaran)	-	Koordinasi dengan Bapemkesra SK Tim Mosidamkar	2023	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program Mosidamkar (Mobil Simulasi Pemadam Kebakaran)	2023-2025	Pengembangan sarana Mobil Simulasi Pemadam Kebakaran dan peningkatan fitur guna meningkatkan manfaat bagi masyarakat	2023-2025	Sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Mosidamkar (Mobil Simulasi Pemadam Kebakaran)	2023-2025	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

3.5. Smart Living

3.5.1. Harmonisasi Tata Ruang

Tabel 21. Rencana Aksi Smart Living - Harmonisasi Tata Ruang

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta											
1	Aplikasi Sipetarung	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi kepada PD terkait pemanfaatan bangunan	2024	1. Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung aplikasi Sipetarung 2. Pemeliharaan infrstruktur pendukung aplikasi Sipetarung	2024 2023-2026	Pengembangan Aplikasi Sipetarung	2024-2026	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi kepada staf melalui IHT dan buku panduan	2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2	Aplikasi E-Rusun	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Koordinasi dengan PD terkait integrasi aplikasi 2. Reviu SOP Perbaikan / Pemeliharaan Rusun melalui Satuan Tugas 3. Koordinasi kepada stakeholder terkait pengelolaan rusun	2023	1. Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung aplikasi eRusun 2. Pemeliharaan infrstruktur pendukung aplikasi eRusun 3. Pengumpulan data	2024 2023-2026	1. Pengembangan Aplikasi E-Rusun 2. Integrasi aplikasi eRusun dengan Padatkarya	2024-2026 2023	1. Sosialisasi penerapan aplikasi e-Rusun kepada staf dan melakukan bimbingan teknis secara rutin 2. Sosialisasi terkait fungsi, tujuan dan kebermanfaatan aplikasi tersebut kepada semua Rayon	2023 2023-2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
					lokasi perencanaan, pengawasan dan fisik pembangunan Rusunawa dari UPTD Pengelolaan Rusunawa melalui Aplikasi e-rutilahu	2023-2024			Bidang Permukiman		
3	Aplikasi E-Rutilahu (program dandan omah)	7.8. Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/perbaikan	Koordinasi dengan PD terkait program dandan omah	2023	1. Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung aplikasi e-Rutilahu 2. Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi e-Rutilahu	2022-2026	Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi e-Rutilahu	2024	Sosialisasi penerapan aplikasi e-Rutilahu kepada staf dan melakukan bimbingan teknis secara rutin	2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
4	Aplikasi SIPSU	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi dengan PD terkait sarana prasarana utilitas	2023	1. Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung aplikasi SIPSU 2. Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi SIPSU	2023-2026	Pengembangan aplikasi SIPSU	2024-2026	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi SIPSU melalui media sosial	2023-2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
5	Sistem Informasi Pengadaan Tanah	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi terkait integrasi aplikasi	2023	Peningkatan kapasitas Server dan keterhubungan dengan website sigis.surabaya.go.id dan petaperuntukan-dprkpp.surabaya.go.id	2024	Pengembangan aplikasi SIDATAN	2025	Sosialisasi kepada pengguna terkait aplikasi sidatan	2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
6	Aplikasi pemeliharaan jalan	19.10. Area kota dipetakan oleh peta jalan interaktif langsung (real-time) sebagai persentase dari total luas kota	Pelaksanaan kegiatan melalui SK Tim Perbaikan Jalan dan Jembatan	2023	Penyiapan infrastruktur pendukung aplikasi pemeliharaan jalan	2023	1. Pengembangan aplikasi pemeliharaan jalan 2. Pengintegrasian aplikasi pemeliharaan dengan aplikasi pengaduan 3. Pemeliharaan aplikasi pemeliharaan	2023 2024 2023 - 2026	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi pemeliharaan jalan melalui media sosial	2023 - 2026	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
7	Cekatan (Percepatan sertifikasi aset jalan dan saluran)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pelaksanaan kegiatan melalui SK Tim Sertifikasi Aset	2023	Pemanfaatan alat ukur (Disto, Meteran Lari, GPS Geodetik)	2023 - 2026	Pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku milik BPN	2023 - 2026	Sosialisasi dan Koordinasi untuk proses inovasi bersama Kantor Pertanahan Surabaya I dan II serta OPD terkait	2023 - 2026	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Strategi: Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik											

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
8	Iwak Peyek (Pengaduan Proyek)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pelaksanaan kegiatan melalui Surat Perintah No. 500.12.6.5/2621/436.7.3/2023	2024	Peningkatan performa server pendukung aplikasi	2024	1. Pengembangan aplikasi Iwak Peyek agar dapat diakses melalui aplikasi smartphone 2. Pemeliharaan aplikasi Iwak Peyek 3. Pengintegrasian dengan aplikasi e-Delivery dan e-Project milik BPBJAP	2023 2023 - 2026 2023	Sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara penyampaian informasi, saran dan pengaduan terkait proyek/pekerjaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	2023-2026	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

3.5.2. Sarana / Prasarana Kesehatan

Tabel 22. Rencana Aksi Smart Living - Sarana / Prasarana Kesehatan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Diversifikasi pangan berkelanjutan											
1	kasurboyo	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Pengembangan Pertanian Perkotaan	2023	1. Peningkatan Sarana dan prasana yang menunjang pelatihan olahan pangan 2. Peningkatan Sarana untuk menunjang Output diantaranya Insektisida, Benih Cabe Meran Besar, Media Tanam, Benih buah Tomat, Benih Terong, Benih Unggul Cabe Rawit, Polybag	2024 - 2026 2023-2024	Pengunaan aplikasi E-Monev sebagai sarana monitoring pelaksanaan pelatihan olahan pangan	2023 - 2026	Sosialisasi hasil pelatihan olahan pangan melalui media sosial	2023 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Strategi: Peningkatan jangkauan akses kesehatan khususnya pada masyarakat miskin pengembangan sistem data terintegrasi											
2	Aplikasi Sayang Warga	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk	2023 - 2026	1. Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung aplikasi Sayang Warga 2. Pemeliharaan infrastruktur untuk	2024 2023-2026	1. Pengembangan modul aplikasi Sayang Warga 2. Pemeliharaan aplikasi Sayang Warga	2023 2023 - 2026	Sosialisasi kepada seluruh pengguna aplikasi sayang warga (PD terkait, Kelurahan, Puskesmas, Kader)	2023 - 2026	Dinas Kesehatan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
		penyedia layanan kesehatan	dan Keluarga Berencana serta stakeholder lainnya yang terkait		pendukung aplikasi Sayang Warga						
3	Aplikasi PWS (Pemantauan Wilayah Setempat)	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	1. Pemantauan wilayah setempat terkait kesehatan secara digital 2. Melakukan koordinasi dengan Dinkominfo terkait integrasi aplikasi PWS dengan Aplikasi Sayang Warga	2023-2026	1. Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk pendukung aplikasi PWS (Pemantauan Wilayah Setempat) 2. Pemeliharaan infrastruktur untuk pendukung aplikasi PWS (Pemantauan Wilayah Setempat)	2024 2023-2026	1. Pengembangan modul aplikasi PWS 2. Pemeliharaan aplikasi PWS	2024 2023 - 2026	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi PWS Puskesmas dan pegawai Dinkes	2023-2026	Dinas Kesehatan
4	e-health	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	Koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait pemanfaatan aplikasi e-health	2024	1. Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk pendukung aplikasi e-health Antrean 2. Pemeliharaan infrastruktur untuk pendukung aplikasi e-health Antrean	2024 2023-2026	1. Pengembangan aplikasi e-health 2. Pemeliharaan aplikasi ehealth	2024 2023 - 2026	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi e-health melalui media sosial dan melalui pegawai puskesmas	2023-2026	Dinas Kesehatan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
5	Sisinfokes (Sistem Informasi Kesehatan)	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	Penyusunan perwali tentang tata cara pemukhtahiran data di Kota Surabaya	2023	1. Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk pendukung aplikasi Sisinfokes 2. Pemeliharaan infrastruktur untuk pendukung aplikasi Sisinfokes	2024 2023-2026	1. Pengembangan aplikasi Sisinfokes 2. Pemeliharaan aplikasi Sisinfokes	2024 2023-2026	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi kepada Rumah sakit, Faskes dan pegawai Dinkes	2024	Dinas Kesehatan
6	Aplikasi Persetujuan Teknis Perizinan	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Reviu Perwali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan	2024	1. Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung aplikasi Persetujuan Teknis Perizinan 2. Pemeliharaan infrastruktur untuk pendukung aplikasi Persetujuan Teknis Perizinan	2024 2023-2026	1. Pengembangan Aplikasi Persetujuan Teknis Perizinan 2. Pemeliharaan Aplikasi Persetujuan teknis Perizinan	2024 2023-2026	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi SSW Alfa melalui media sosial	2024	Dinas Kesehatan
7	Jago Ceting (Jagongan Cegah Stunting)	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan	Koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait tentang pelaksanaan kegiatan	2024	1. Peningkatan infrastruktur pendukung inovasi Jago Ceting, aplikasi Sayang Warga 2. Pemeliharaan infrastruktur pendukung inovasi Jago Ceting,	2024 2023-2026	1. Pengembangan modul jago ceting pada Aplikasi Sayang Warga dan Aplikasi PWS 2. Pemanfaatan aplikasi Sayang Warga dan Aplikasi PWS	2023 2023 - 2026	1. Sosialisasi pemanfaatan aplikasi pendukung inovasi jago ceting 2. Sosialisasi pemanfaatan aplikasi Perizinan melalui KSH	2024 2023-2026	Dinas Kesehatan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
		kesehatan			aplikasi Sayang Warga		dalam pelaksanaan Jago Ceting		(kader surabaya hebat)		
8	Aplikasi Sayang Warga	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta stakeholder lainnya yang terkait	2023 - 2026	1. Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk pendukung aplikasi Sayang Warga 2. Pemeliharaan infrastruktur untuk pendukung aplikasi Sayang Warga	2024 2023-2026	1. Pengembangan modul aplikasi Sayang Warga 2. Pemeliharaan aplikasi Sayang Warga	2023 2023 - 2026	Sosialisasi kepada seluruh pengguna aplikasi sayang warga (PD terkait, Kelurahan, Puskesmas, Kader)	2023 - 2026	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Aplikasi Sayang Warga	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta stakeholder lainnya yang terkait	2023 - 2026	1. Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk pendukung aplikasi Sayang Warga 2. Pemeliharaan infrastruktur untuk pendukung aplikasi Sayang Warga	2024 2023-2026	1. Pengembangan modul aplikasi Sayang Warga 2. Pemeliharaan aplikasi Sayang Warga	2023 2023 - 2026	Sosialisasi kepada seluruh pengguna aplikasi sayang warga (PD terkait, Kelurahan, Puskesmas, Kader)	2023 - 2026	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
10	INCIP KOLAK KANRI (Inisiasi Menciptakan Kota Layak Anak di UPTD Kampung Anak Negeri)	-	1. Koordinasi dengan Dispendik, DPRKPP, Disbudporapar, DLH, dan jajaran samping lainnya 2. Peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan pendampingan, pembinaan, pelatihan dan pengarahan 2. SOP Penanganan Anak	2023	Penyiapan Perlengkapan Tinju (Ring Tinju), Perlengkapan Musik, Perlengkapan Sepeda, Perlengkapan Muay Thai	2023	-	-	Publikasi Kegiatan lewat Media Sosial : You Tube, Instagram	2023 - 2026	Dinas Sosial
11	Care Giver (Perawat Lansia)	-	1. Koordinasi dengan Dinkes, Dispendik, Dispenduk, DP3APPKB, Universitas, dan jajaran samping lainnya 2. Peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan pelatihan dan pendampingan	2023	Penyiapan Alat Kesehatan, Obat- Obatan, Perlengkapan Pakaian, Perlengkapan Popok, Permakanan	2023	Aplikasi https://sikeluargamiskin.surabaya.go.id/	2023	Publikasi Kegiatan lewat Media Sosial : You Tube, Instagram	2023 - 2026	Dinas Sosial
	Iso Mangan	20.3. Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	1. Koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, panti werdha, RT/RW setempat, Dinkes, pokmas, dan jajaran samping lainnya	2023	Penyiapan Komputer PC, Printer, Alat Tulis Kantor	2023	Aplikasi Monitoring Permakanan https://permakanan-dinsos.surabaya.go.id/	2023	Sosialisasi dan pendampingan ke Kelompok Masyarakat (POKMAS)	2023 - 2026	Dinas Sosial

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
			2. Pembentukan koordinator di setiap RT/RW								

3.5.3. Sarana / Prasarana Transportasi

Tabel 23. Rencana Aksi Smart Living - Sarana / Prasarana Transportasi

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Sistem Transportasi Perkotaan Terpadu											
1	Optimalisasi kinerja lalu lintas dan simpang apill (alat pemberi isyarat lalu lintas)	19.9. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	1. Optimalisasi dan Pengembangan sistem bersama tenaga ahli dan vendor pihak ketiga 2. Kajian Pengembangan Sistem dengan berkoordinasi bersama tim tenaga ahli	2023 - 2026	Sistem Pendeteksi Panjang Antrian Kendaraan berbasis CCTV ANPR (Automatic number plate recognition)	2023 - 2026	Aplikasi CCTV terintegrasi aplikasi SCATS	2023 - 2026	Sosialisasi sistem kepada petugas SITS (Surabaya Interlligent Transport System)	2023-2026	Dinas Perhubungan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
2	Sistem Bus Priority	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik	1. Optimalisasi dan Pengembangan sistem bersama tenaga ahli dan vendor pihak ketiga 2. Kajian Sistem Kendali Bus Priority bersama tenaga ahli ITS. Melakukan uji coba sistem pada simpang yang telah ditentukan	2023 - 2026	Sistem Kendali Bus Priority (Traficam Vehicle FLIR, Server, PC)	2023 - 2026	Aplikasi VPC (Vehicle Priority Controller) yang terintegrasi dengan aplikasi SCATS	2023 - 2026	Sosialisasi sistem kepada petugas SITS (Surabaya Interlligent Transport System) dan SIUTS (Surabaya Integrated Urban Transport System)	2023-2024	Dinas Perhubungan
3	Smart System PJU	7.6. Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu	1. Optimalisasi dan Pengembangan sistem (infrastructure dan Perangkat) bersama tenaga ahli 2. Kajian Pengembangan Sistem Kendali Jarak Jauh PJU berbasis Teknologi Informasi	2023	1. Ruang Control PJU Smart system 2. Penggantian PJU Smart	2023	E-PJU	2023	Sosialisasi sistem kepada pengguna sistem	2023 - 2025	Dinas Perhubungan
4	Mobile POS - Machine Handheld	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembangan sistem layanan parkir melalui Pembayaran Non Tunai (QRIS) Retribusi Parkir	2023-2026	Pengecekan dan peremajaan pada seluruh infrastruktur pendukung Mobile Pos Machine / Handheld	2023 - 2026	Adanya pengembangan sistem terkait fitur integrasi untuk pembayaran	2023 - 2026	Sosialisasi pembayaran non tunai melalui banner dan media sosial	2023 - 2026	Dinas Perhubungan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
5	Whatsapp Gateway Habis Masa Uji Berkala Kendaraan Bermotor	19.3. Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi	Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan narasumber	2023 - 2024	Penyediaan Hardware (Server, PC, dan Jaringan internet)	2023 - 2024	Aplikasi Whatsapp Gateway	2023 - 2024	Sosialisasi adanya layanan Whatsapp Gateway untuk Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor melalui sosial media yang dikelola oleh dinas perhubungan dan banner di kantor pelayanan pengujian	2023 - 2024	Dinas Perhubungan
6	Penataan Jaringan Angkutan Umum Trunk dan Feeder (Surabaya Bus dan Feeder Wira Wiri)	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik	Kajian Pengembangan Rute Angkutan Trunk dan Feeder, Penyusunan Raperda Transportasi (draft)	2023 - 2024	Peningkatan armada angkutan trunk dan feeder yang handal dan memadai	2023 - 2026	Pengembangan Aplikasi Gobis	2023 - 2026	Sosialisasi rute trunk dan feeder kepada masyarakat melalui sosial media dan aplikasi Gobis yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya	2023 - 2026	Dinas Perhubungan

3.6. Smart Environment

3.6.1. Pengelolaan Sampah dan Limbah

Tabel 24. Rencana Aksi Smart Environment - Pengelolaan Sampah dan Limbah

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Penguatan konsep gerakan Surabaya Green City melalui lembaga formal dan nonformal											
1	Aplikasi SIBASAM (Bank Sampah)	16.4. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	Penyusunan Perwali Pembentukan SK TIM Pelaksanaan Aplikasi SIBASAM	2023-2026	Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi SIBASAM	2023-2026	Pengembangan aplikasi SIBASAM	2023	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi ke masyarakat SIBASAM	2023-2026	Dinas Lingkungan Hidup
2	Waste Station	16.4. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	Melakukan kerja sama dengan stakeholder yang berkepentingan	2023 - 2026	DLH menyediakan tempat dan kemudian proses operasionalnya akan dikelola oleh pihak ketiga (PT. Khasanah)	2023 - 2026	Pemanfaatan aplikasi reco sebagai media penukaran koin yang nantinya dapat ditukar dalam bentuk e-wallet	2024	Sosialisasi waste station melalui media sosial	2023 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup
3	Aplikasi SWAT (Solid Waste Transportation)	16.4. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	2023 - 2026	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur pendukung aplikasi SWAT	2024 - 2026	Pembuatan aplikasi SWAT baru	2023	Sosialisasi aplikasi SWAT kepada pengguna (internal PD yang memanfaatkan aplikasi SWAT)	2023 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
4	TPS 3R	16.3. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi	Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya	2023-2026	Peningkatan kapasitas dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah	2023 - 2026	-	-	Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, sehingga dapat mengurangi residu sampah yang masuk ke TPA Benowo	2023 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup
Strategi: Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta											
5	Pembangunan Tangki Septik Komunal	22.1. Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali	Pelaksanaan kegiatan melalui SK Tim pembangunan tangki septik komunal	2023	Pemanfaatan Lahan Aset Pemerintah Kota	2023 - 2026	Pemanfaatan aplikasi krisna.systems milik Bappenas dan emondak.pu.go.id Kementerian PUPR	2023 - 2026	Sosialisasi terkait pembangunan tangki septik kepada penerima manfaat	2023 - 2026	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
6	Aplikasi REPLICA (Retribusi Pengelolaan Limbah Cair)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah dan Penyedia Jasa Layanan Penyedotan	2023	Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung	2024	Pengembangan modul dan pemeliharaan Aplikasi REPLICA	2023-2026	Pendampingan pengembangan modul baru aplikasi REPLICA	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
7	E-Maintenance	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pelaksanaan kegiatan melalui SK Tim perbaikan dan penggunaan barang habis pakai	2023	-	-	Pengembangan Aplikasi e-Maintenance 2. Pemeliharaan Aplikasi e-Maintenance	2023 2023 - 2026	Sosialisasi terkait fungsi, tujuan dan kebermanfaatan aplikasi tersebut kepada semua	2023	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
									pengguna aplikasi		

3.6.2. Proteksi Lingkungan

Tabel 25. Rencana Aksi Smart Environment - Proteksi Lingkungan

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta											
1	kerangboyo	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	SK Walikota tentang pembentukan UPTD Kebun Raya Mangrove Surabaya	2023	Pengembangan sarana prasarana untuk wisata(lintasan ATV, Cottage dan Aviary) , edukasi dan konservasi	2023-2024	Pengembangan aplikasi informasi zonasi dan pendataan mangrove, Website SIGIS	2023	Sosialisasi pemanfaatan aplikasi barcode zonasi dan detail mangrove melalui seminar, dan launching Kebun Raya Mangrove Surabaya	2023	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Strategi: Penguatan konsep gerakan Surabaya Green City melalui lembaga formal dan nonformal											

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
2	Pembinaan dan Pelatihan pengelolaan lingkungan	-	Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat/Komunitas/Instansi/Lembaga) dalam melakukan sosialisasi kepada peserta sesuai dengan tema pembinaan dan pelatihan yang telah ditentukan oleh DLH	2023-2026	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur pendukung	2023-2026	Percepatan Pencatatan melalui Media Digital	2023	Sosialisasi (pembinaan dan pendampingan) yang diperuntukkan bagi peserta yang menang Lomba SSC	2023 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup
3	Kegiatan SSC (Surabaya Smart City)	-	Reviu SK TIM Pelaksanaan kegiatan SSC (Surabaya Smart City)	2023-2026	Peningkatan sarana dan prasarana terhadap lingkungan hidup	2023-2026	Pendaftaran Dilakukan Secara Online Melalui https://ssc.surabaya.go.id/	2023	Sosialisasi Terkait Pendaftaran SSC Secara Online	2023	Dinas Lingkungan Hidup
4	Aplikasi PKL (Pemantauan Kualitas Lingkungan)	23.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi	Reviu Perda Kota Surabaya No. 12 Tahun 2016 terkait Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah	2025	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur pendukung aplikasi PKL (Pemantauan Kualitas Lingkungan)	2026 - 2026	Pembuatan aplikasi PKL (Pemantauan Kualitas Lingkungan)	2025	Sosialisai upaya peningkatan kualitas udara melalui Penyuluhan dan Media Sosial	2024 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
5	Aplikasi PKU (Pemantauan Kualitas Udara)	8.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (real- time) per kilometer persegi (km2)	Reviu Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2008 terkait Pengendalian aplikasi PKU (Pemantauan Kualitas Udara)	2024	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur pendukung aplikasi PKU (Pemantauan Kualitas Udara)	2024 - 2026	Pembuatan aplikasi PKU (Pemantauan Kualitas Udara)	2024	- Sosialisasi Data Indeks Kualitas Pencemaran Udara (ISPU) melalui Display dan Instagram - Sosialisasi upaya peningkatan kualitas udara melalui penyuluhan dan Media Sosial	2023 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup
6	Aplikasi BIS (Biodiversity Information System)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Melakukan konsultasi dengan narasumber	2023 - 2026	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur pendukung aplikasi web BISS (biodiversity Information system of Surabaya)	2024- 2026	Pengembangan Aplikasi Web BISS	2023- 2026	Sosialisasi aplikasi web BISS melalui media sosial	2023- 2026	Dinas Lingkungan Hidup
7	Aplikasi System and Web Application for Graveyard (SWAG)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	1. Draft Perda tentang Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah 2. Monitoring perkembangan jumlah data pemakaman yang di input oleh masing - masing admin aplikasi SWAG di setiap makam	2023	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung aplikasi SWAG	2023- 2026	Pengembangan Aplikasi SWAG	2023- 2026	Sosialisasi aplikasi SWAG kepada pengguna (admin pemakaman dikantor makam yang memanfaatkan aplikasi SWAG)	2023- 2026	Dinas Lingkungan Hidup

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
8	Aplikasi E-Simpel	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Melakukan koordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika terkait integrasi dengan aplikasi e-surat	2023 - 2026	Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi e Sempel	2023 - 2026	Pengembangan aplikasi e-simpel	2023	Sosialisasi penggunaan aplikasi e-Simpel kepada kegiatan usaha secara langsung/tatap muka	2023 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup
9	Percepatan waktu penerbitan layanan persetujuan lingkungan di SSW	-	1. Riviw Perwali 41 thn 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha Dan Pelayanan Non Perizinan 2. Adanya desk dengan pelaku usaha berdasarkan hasil pengawasan lingkungan dengan tujuan agar pelaku usaha mengupdate usaha sesuai dengan perwali	2023-2024	Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi SSW Alfa	2023 - 2026	Pengembangan aplikasi SSW Alfa	2023-2026	Sosialisasi terkait perubahan peraturan yang menyangkut pelaku usaha	2023-2026	Dinas Lingkungan Hidup
Strategi: Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta											
10	Aplikasi Sistem Monitoring Pekerjaan Drainase	22.5. Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh system sensor data tracking real-time	Koordinasi dengan Penyedia Jasa Konsultansi dan Penyedia Jasa Konstruksi	2023	Penyiapan infrastruktur pendukung aplikasi sistem monitoring drainase	2023	1. Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Monitoring Drainase 2. Pengintegrasian dengan aplikasi SIGIS Bappedalitbang	2023 2024	Sosialisasi dan pendampingan terkait fungsi, tujuan dan kebermanfaatan aplikasi tersebut kepada semua Rayon Bidang Drainase	2023 - 2026	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
11	Aplikasi SIMIPAL (pemeliharaan IPAL)	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pelaksanaan kegiatan melalui SK Tim Pemeliharaan dan Pengiriman Kompos	2023	Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung	2024	1. Pengembangan modul Aplikasi SIMIPAL 2. Pemeliharaan aplikasi SIMIPAL	2024 2023 - 2026	Sosialisai Pemanfaatan Aplikasi SIMIPAL melalui media sosial dan surat ke masing - masing OPD	2023 - 2026	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

3.6.3. Tata Kelola Energi

Tabel 26. Rencana Aksi Smart Environment - Tata Kelola Energi

No	Inovasi	Indikator SNI 37122	Rencana Aksi/Tahun								Leading Sector
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Strategi: Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta											
1	Pengolahan Sampah Menjadi Listrik (TPA Benowo)	16.3. Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi	Berkoordinasi dengan PT Sumber Organik terkait pengelolaan sampah dan melakukan kerjasama dengan PLN terkait listrik yang dihasilkan	2023-2026	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

4. Peta Jalan Pembangunan Smart City Daerah

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang dalam pembangunan Smart City dengan memperhatikan arah kebijakan, maka disusun Peta Jalan Pembangunan Smart City Surabaya periode tahun 2023 - 2026 mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 agar pembangunan Smart City selaras dengan pembangunan kota. Peta Jalan Pembangunan Smart City berisi program, kegiatan, indikator kinerja, inovasi, target kinerja / anggaran, sumber dana serta leading sector pelaksana inovasi. Berikut Peta Jalan Pembangunan Smart City Surabaya berdasarkan 6 dimensi adalah sebagai berikut:

4.1. Smart Governance

4.1.1. Efisiensi Kebijakan Publik

Tabel 27. Peta Jalan Smart Governance - Efisiensi Kebijakan Publik

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital														
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	Aplikasi e-Planning	6 dokumen	1,189,883,160		1,242,804,801	7 dokumen	1,342,263,496	6 dokumen	1,402,990,689	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital														

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	Aplikasi e-Planning	33 data urusan	1,352,146,040		1,328,476,808	33 data urusan	1,455,312,933	33 data urusan	1,519,411,379	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi e-Planning	58 PD	875,663,843		888,378,688	58 PD	961,082,007	58 PD	1,007,199,455	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	Aplikasi Satu Data, Informasi dan Administrasi (ADINDA)	2 jenis	3,513,313,402	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Pariwisata Kabupaten/Kota												
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis s beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	SUSAN MAS-E (SURvei kepuaSAN MASyarakat Elektronik)	58 instansi	2,854,993,610		3,107,580,348	58 instansi	3,545,860,943	58 instansi	3,818,611,182	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

4.1.2. Layanan Publik

Tabel 28. Peta Jalan Smart Governance - Layanan Publik

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan														
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	Mall Pelayanan Publik	85.000 berkas	3,588,990,147	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital														
2	Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Klampid New Generation (KNG)	156000 berkas	2,292,088,029		2,407,151,341	156000 berkas	2,528,310,073	156000 berkas	2,655,891,757	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
3	Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan		156000 berkas	712,854,588		748,444,776	156000 berkas	785,928,238	156000 berkas	825,405,938	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan		156000 berkas	712,854,588		748,444,776	156000 berkas	785,928,238	156000 berkas	825,405,938	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan		36000 berkas	1,314,255,500		1,380,691,388	36000 berkas	1,450,661,440	36000 berkas	1,524,354,120	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait		36000 berkas	385,520,309		404,502,707	36000 berkas	424,494,889	36000 berkas	445,550,725	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			Pencatatan Sipil yang diterbitkan											
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi		48000 data	373,822,063		392,100,631	48000 data	411,351,573	48000 data	431,626,693	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan		5 Lembaga	566,103,200		593,673,752	5 Lembaga	622,711,005	5 Lembaga	653,293,096	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
9	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan		32 unit layanan	1,677,948,231		1,735,238,255	32 unit layanan	1,794,905,901	32 unit layanan	1,857,062,872	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	LONTONG BALAP (Layanan Online Terpadu One Gate System Bersama Disdukcapil dan Pengadilan Negeri)	36000 berkas	385,520,309		404,502,707	36000 berkas	424,494,889	36000 berkas	445,550,725	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	LONTONG KUPANG (Layanan Online dan Terpadu Melalui One Gate System Disdukcapil	156000 berkas	2,292,088,029		2,407,151,341	156000 berkas	2,528,310,073	156000 berkas	2,655,891,757	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama)										
12	Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Aplikasi PUNTADEW A	156000 berkas	2,292,088,029		2,407,151,341	156000 berkas	2,528,310,073	156000 berkas	2,655,891,757	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	SATE KERANG (Sistem Arsip TERpadu Kependudukan secaraRA diGital)	156000 berkas	712,854,588		748,444,776	156000 berkas	785,928,238	156000 berkas	825,405,938	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan		36000 berkas	1,314,255,500		1,380,691,388	36000 berkas	1,450,661,440	36000 berkas	1,524,354,120	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
15	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan		36000 berkas	385,520,309		404,502,707	36000 berkas	424,494,889	36000 berkas	445,550,725	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Aplikasi TAKON KLAMPID	156000 berkas	712,854,588		748,444,776	156000 berkas	785,928,238	156000 berkas	825,405,938	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	KALIMASAD A (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk)	48000 data	373,822,063		392,100,631	48000 data	411,351,573	48000 data	431,626,693	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
18	Program Penyelenggara n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	Pembayaran non tunai retribusi	14 Lokasi	25.244.860.813		24.598.980.737	14 Lokasi	27.689.266.644	14 Lokasi	29.006.403.572	APBD	Dinas Perhubungan
19	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Aplikasi PMKS	11 Lembaga	30.960.074.693		28.834.331.701	11 Lembaga	32.948.135.278	11 Lembaga	34.779.391.727	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
20	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis lektronik yang Dikembangkan	Aplikasi SSW Alfa	190 Unit	5,272,055,132	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
21	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	Aplikasi Media Center	4 Jenis	13,907,183,482	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		Backoffice Webprofile	Dinas Komunikasi dan Informatika										
Strategi: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa														
23	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Aplikasi Amelia (Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pasar)	12 Laporan	1,145,387,183		1,161,705,036	12 Laporan	1,252,080,946	12 Laporan	1,309,690,535	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
24	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Aplikasi Amelia (Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pasar)	12 Laporan	1,145,387,183		1,161,705,036	12 Laporan	1,252,080,946	12 Laporan	1,309,690,535	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
25	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Aplikasi Amelia (Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pasar)	12 Laporan	1,145,387,183		1,161,705,036	12 Laporan	1,252,080,946	12 Laporan	1,309,690,535	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
26	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Sistem Informasi Report Perizinan Dinas	12 Laporan	292,535,281	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
27	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Sistem Informasi Report Perizinan Dinas	12 Laporan	100,145,094	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
28	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar	Sistem Informasi Report Perizinan Dinas	12 Laporan	50,400,000	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
29	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Sistem Informasi Report Perizinan Dinas	12 Laporan	285,635,281	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

4.1.3. Manajemen Birokrasi yang Efisien

Tabel 29. Peta Jalan Smart Governance - Manajemen Birokrasi yang Efisien

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital														
1	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	E-SDM	0,91	2,563,043,088		2,636,992,589	0,93	2,731,161,199	0,94	2,823,680,454	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	E-SDM	0,91	2,563,043,088		2,636,992,589	0,93	2,731,161,199	0,94	2,823,680,454	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	E-SDM	8555 berkas	1,714,446,784		1,759,333,953	8555 berkas	1,857,675,179	8555 berkas	1,935,059,689	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
4	Progam Penunjang Urusan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Sijaka	100%	15,594,212,085	-	-	-	-	-	-	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Progam Penunjang Urusan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Sinora	100%	514,848,632	-	-	-	-	-	-	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penggunaan Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana	Aplikasi SIGASDA	100%	830,873,406	-	-	-	-	-	-	APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Aplikasi Epayment	24 Dokumen	1,063,238,968	-	-	-	-	-	-	APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
8	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	yang disusun	Elektronik Arsip (e-Arsip)	Laporan	173,021,149	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	Elektronik Arsip (e-Arsip)	Pertanggungjawab an	906,345,880	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip yang dialih mediakan	Elektronik Arsip (e-Arsip)	Pelaksan aan APBD	1,731,730,984	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	Si ToMaS PeDe (Sistem moniToring reforMasi birokraSi Perangkat Daerah)	yang disusun	2,854,993,610		3,107,580,348	58 instansi	3,545,860,943	58 instansi	3,818,611,182	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai	Telaga Asia (sisTem Evaluasi KeLembaGa an kotA SurabayA)	58 instansi	2,854,993,610		3,107,580,348	58 instansi	3,545,860,943	58 instansi	3,818,611,182	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			kelembagaan yang berlaku											
13	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	Aplikasi Penganggaran (eProject, eControlling, eDelivery, ePerformance)	2 Dokumen	13,621,154,000		14,203,780,270	2 Dokumen	15,434,863,395	2 Dokumen	16,052,307,032	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan)
14	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	Klinik Pengadaan Barang/Jasa	0,92	11,571,689,914		11,975,388,802	0,96	12,892,629,745	0,98	13,527,842,132	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan)
15	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemanfaatan TIK	190 Unit	5,272,055,132	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
16	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dikembangkan	Optimalisasi Pusat Data									APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Aplikasi E-Surat									APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengaduan Keluhan TIK (Service Desk)									APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Aplikasi Dashboard Kinerja									APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
20	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Aplikasi Sapu Jagad									APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang dianalisa	Aplikasi Satu Peta	5 Sektor	569,606,140	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Strategi: Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri														
22	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	E-SKP	2 jenis	2,260,820,026		2,266,261,854	2 jenis	2,418,400,713	2 jenis	2,545,647,725	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	E-Learning	2232 orang	1.556.443.280	2232 orang	1,618,755,270	2232 orang	1,846,676,067	2232 orang	2,027,792,776	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
24	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Aplikasi Diklat	168 orang	5,391,948,211		6,489,648,964	168 orang	7,289,606,713	168 orang	7,507,314,211	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.2. Smart Branding

4.2.1. Ekosistem Bisnis Daerah

Tabel 30. Peta Jalan Smart Branding - Ekosistem Bisnis Daerah

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa														
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	memfasilitasi dalam	Operasi Pasar dan Pasar Murah	12 Laporan	1,145,387,183		1,161,705,036	12 Laporan	1,252,080,946	12 Laporan	1,309,690,535	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan														
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang	PESONA BUAYA (Pendamping an Sinergi dan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMK	85.000 berkas	4,831,437,390		4,723,516,288	95.000 berkas	5,363,410,534	100.000 berkas	5,864,491,950	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	telah diterbitkan	Surabaya										

4.2.2. Wajah Kota

Tabel 31. Peta Jalan Smart Branding - Wajah Kota

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta														
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	Desain pedestrian	130 dokumen	538.868.745.656	137 dokumen	546.323.264.452	137 dokumen	584.237.794.263	137 dokumen	610.347.180.061	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	Transportasi Umum Terintegrasi melalui feeder wira wiri dan Surabaya Bus	3 Koridor	57.332.572.717	3 Koridor	60.094.632.830	3 Koridor	64.114.956.319	3 Koridor	65.033.246.766	APBD	Dinas Perhubungan
Strategi: Pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah serta pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak														
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	Sistem Informasi Gender Arek Suroboyo (SIGAS)	1 kegiatan	747,665,140	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Strategi: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa														
4	Program Pemasaran Pariwisata	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan	indikator kota layak	Festival Rujak Uleg	2 jenis	5.858.120.318		6.082.453.900	2 jenis	6.364.885.407	2 jenis	6.583.808.840	APBD	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												
5	Program Pemasaran Pariwisata	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	anak	Surabaya Vaganza	2 jenis	5.858.120.318		6.082.453.900	2 jenis	6.364.885.407	2 jenis	6.583.808.840	APBD	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

4.2.3. Wisata

Tabel 32. Peta Jalan Smart Branding - Wisata

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan														
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	Adventure Land Romokalisari	13 Laporan	17.964.887.015		17.667.501.109	13 Laporan	19.201.685.034	13 Laporan	19.907.914.092	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan														
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	upaya pencapaian	e-Ticketing Destinasi Wisata Surabaya	2 lokasi	4.265.237.163		4.496.363.961	2 lokasi	5.054.373.512	2 lokasi	5.122.716.295	APBD	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

4.3. Smart Economy

4.3.1. Ekosistem Bisnis Daerah

Tabel 33. Peta Jalan Smart Economy - Ekosistem Bisnis Daerah

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan														
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	RINDU (Rekapitulasi Data Industri)	12 Laporan	848,179,341	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	E-Industri	12 Laporan	521.941.271		547.084.641	12 Laporan	573.305.627	12 Laporan	589.752.805	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan	Paving Geprek (padat Karya)	130 dokumen	538.868.745.656		546.323.264.452	137 dokumen	584.237.794.263	137 dokumen	610.347.180.061	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			kelengkapannya yang disusun											
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	Klinik Investasi	1.200 perusahaan	863,765,857	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	Klinik Investasi	0,72	577.939.876		584.238.272	0,76	635.019.971	0,78	665.825.252	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Program Promosi Penanaman	Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah Calon Investor /	Klinik Investasi	250 Calon	658.709.199		684.022.654	300 Calon	694.510.379	300 Calon Investor /	738.216.183	APBD	Dinas Penanaman Modal dan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Modal	Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi		Investor / Investor				Investor / Investor		Investor			Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	Lapis Lupis (Layanan Asistensi Pengisian dan Fasilitas LKPM Untuk Peningkatan Investasi)	1.200 perusahaan	863,765,857	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Sistem Informasi Pengawasan Kegiatan Usaha Perdagangan berbasis GIS	12 Laporan	318,197,034	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
9	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Sistem Informasi Pengawasan Kegiatan Usaha Perdagangan berbasis GIS	12 Laporan	292,535,281	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
10	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Sistem Informasi Pengawasan Kegiatan Usaha Perdagangan berbasis GIS	12 Laporan	100,145,094	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
11	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Sistem Informasi Pengawasan Kegiatan Usaha Perdagangan berbasis GIS	12 Laporan	50,400,000	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Strategi: Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia														
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	IPRO - Investment Project Ready to Offer	0,72	577.939.876		584.238.272	0,76	635.019.971	0,78	665.825.252	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Strategi: Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia														
2	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Aplikasi Pensil Bu-In	12 Laporan	836,996,405	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
3		Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Verifikasi Laporan PHK									APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	Rumah Tera (Website UPTD Metrologi Legal)	12 Laporan	1,915,352,662	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		SiTerasi (Sidang Tera Ulang dengan Reparasi)										Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

4.3.2. Kesejahteraan Rakyat

Tabel 34. Peta Jalan Smart Economy - Kesejahteraan Rakyat

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan														
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ladang pangan	6 Jenis	777.863.493		806.590.564	6 Jenis	836.666.467	6 Jenis	868.156.972	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	Ladang pangan	4 Jenis	1.189.564.146		1.177.475.288	4 Jenis	1.267.668.253	4 Jenis	1.309.312.532	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	Ladang pangan	34 kali	338.768.552		351.564.854	38 kali	364.981.670	40 kali	379.055.908	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	Ladang pangan	1 laporan	1.154.682.945		1.126.169.294	1 laporan	1.254.373.830	1 laporan	1.307.951.499	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaraga man konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Ladang pangan	3 Jenis	1.104.581.389		1.151.942.723	3 Jenis	1.201.662.640	3 Jenis	1.253.879.444	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik yang Dikembangkan	Aplikasi Padat Karya	190 Unit	5,272,055,132	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Program Pengembangan UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Proses Bisnis	Digitalisasi Pemberdaya an Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	500 orang	1,332,831,865		1.307.889.738	500 orang	1,472,512,536	500 orang	1,548,127,050	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
8	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemerintahan	Digitalisasi Pemberdaya an Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	12 laporan	5.887.875.757		5.705.895.109	12 laporan	6.584.588.827	12 laporan	6.660.120.026	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
9	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Berbasis Elektronik	Digitalisasi Pemberdaya an Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	12 laporan	5.887.875.757		5.705.895.109	12 laporan	6.584.588.827	12 laporan	6.660.120.026	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
10	Program Pengembangan UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	yang Dikembangkan	Digitalisasi Pemberdaya an Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	500 orang	1,332,831,865		1.307.889.738	500 orang	1,472,512,536	500 orang	1,548,127,050	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
11	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	Digitalisasi Pemberdaya an Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	12 laporan	5.887.875.757		5.705.895.109	12 laporan	6.584.588.827	12 laporan	6.660.120.026	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
12	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	Digitalisasi Pemberdaya an Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	12 laporan	5.887.875.757		5.705.895.109	12 laporan	6.584.588.827	12 laporan	6.660.120.026	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
13	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Digitalisasi Pemberdaya an Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	12 Laporan	4.696.317.428		4.285.392.608	12 Laporan	4.828.297.851	12 Laporan	4.968.208.636	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
14	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Digitalisasi Pemberdaya an Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	12 Laporan	4.696.317.428		4.285.392.608	12 Laporan	4.828.297.851	12 Laporan	4.968.208.636	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
15	Program Pengembangan UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	500 orang	1,332,831,865		1.307.889.738	500 orang	1,472,512,536	500 orang	1,548,127,050	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
16	Program Pengembangan UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	500 orang	1,332,831,865		1.307.889.738	500 orang	1,472,512,536	500 orang	1,548,127,050	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Strategi: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran														
17	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	Pendaftaran Pelatihan Online	4 Laporan	5.819.422.328		6.406.191.701	4 Laporan	6.622.859.143	4 Laporan	6.876.862.013	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
18	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	PRO GADIS (Program Magang Disabilitas) Fasilitas magang untuk disabilitas melalui kerjasama dengan sejumlah institusi atau perusahaan di surabaya	4 Laporan	5.819.422.328		6.406.191.701	4 Laporan	6.622.859.143	4 Laporan	6.876.862.013	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
19	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	PENTAS (Kompetensi produktifitas) Fasilitas sertifikasi profesi bagi angkatan kerja untuk meningkatkan daya saing	4 Laporan	3.378.157.392		3.303.986.802	4 Laporan	3.966.520.675	4 Laporan	4.121.071.261	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				masyarakat										
20	Program Perluasan Tenaga Kerja	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo)	200 Orang	369,598,916	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
21	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Laporan Penonaktifan Pekerja secara digital	200 Orang	369,598,916	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
22	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan penyelenggara n Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	Sistem Informasi Ketenagakerj aan	4 Laporan	369,598,916	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Strategi: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa														

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
23	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	Aplikasi Laporan keuangan Koperasi	103 Orang	404,202,429	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
24	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	Aplikasi pengawasan koperasi (Awasi Boyo)	415 koperasi	711,462,964	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
25	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	Aplikasi UMKM	136 Orang	2.741.223.966		136 Orang	3215460337	136 Orang	136 Orang	3.423.538.598	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												
26	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	Aplikasi UMKM	136 Orang	2.741.223.966		136 Orang	3215460337	136 Orang	136 Orang	3.423.538.598	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
27	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	Aplikasi UMKM	136 Orang	2.741.223.966		136 Orang	3215460337	136 Orang	136 Orang	3.423.538.598	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
28	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha	Pengembangan Unit Usaha Koperasi Sektor Rill dengan menggunakan business model canvas (BMC)	83 koperasi	383,211,117	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
29	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	koperasi	Sistem Barcode Pedagang	12 Laporan	4.696.317.428		4.285.392.608	12 Laporan	4.828.297.851	12 Laporan	4.968.208.636	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

4.3.3. Transaksi Keuangan

Tabel 35. Peta Jalan Smart Economy - Transaksi Keuangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan														
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Aplikasi Peken	190 Unit	5,272,055,132	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

4.4. Smart Society

4.4.1. Ekosistem Belajar

Tabel 36. Peta Jalan Smart Society - Ekosistem Belajar

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta secara berkelanjutan														
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar (PAUD, dan pendidikan non formal / kesetaraan)	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Aplikasi SIAGUS	12685 orang	34,326,710,500	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pendidikan
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	minimal pendidik pada	Program Sekolahe Arek Suroboyo	1 Laporan	477.411.093.818		500.497.397.725	1 Laporan	620.489.175.423	1 Laporan	645.680.725.971	APBD	Dinas Pendidikan
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah	jenjang sekolah dasar	Program Sekolahe Arek Suroboyo	1 Laporan	292.889.299.920		328.756.132.543	1 Laporan	349.025.854.856	1 Laporan	364.472.634.592	APBD	Dinas Pendidikan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Menengah Pertama												
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	Pengembang an PAUD HI	1 Laporan	143.699.377.052		147.461.969.060	1 Laporan	151.425.104.353	1 Laporan	155.588.380.376	APBD	Dinas Pendidikan
Strategi: Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri														
5	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pemustaka	Sistem Informasi Perpustakaa n (SIPUS)	82 nilai	14,567,898,378	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bibit penulis dan pendongeng	Gendis Sewu	4477 orang	553,417,016	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Strategi: Peningkatan sumberdaya dan jangkauan penanggulangan bencana berbasis spasial														
5	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	Wilayah Kerjanya	Program SINA - SINI (Edukasi Bencana Usia Dini)	Keluarga (PUSPA GA)	18.345.740.230		18.610.191.999	42 Kegiatan	19.450.790.856	42 Kegiatan	20.320.537.831	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Bencana												

4.4.2. Interaksi Masyarakat yang Efisien

Tabel 37. Peta Jalan Smart Society - Interaksi Masyarakat yang Efisien

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta secara berkelanjutan														
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	SICABOR (Sistem Informasi Cabang Olahraga)	5 kecamatan	41.018.328.515		21.722.840.178	7 kecamatan	41.540.635.959	9 kecamatan	24.739.225.447	APBD	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
Strategi: Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri														

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Digitalisasi Kelas Calon Pengantin	12 laporan	668,528,387	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	bagi Keluarga dalam	Ayo Sinau Bareng dan Ngaji Bareng	penyediaa n layanan	477.411.093.818		500.497.397.725	1 Laporan	620.489.175.423	1 Laporan	645.680.725.971	APBD	Dinas Pendidikan
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Mewujudkan KG dan	Ayo Sinau Bareng dan Ngaji Bareng	keluarga oleh Ruang	292.889.299.920		328.756.132.543	1 Laporan	349.025.854.856	1 Laporan	364.472.634.592	APBD	Dinas Pendidikan
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Hak Anak yang	Komunitas Belajar Surabaya Setara Hebat	Pusat Pembelajaran an	100.967.587.378		105.975.669.193	1 Laporan	111.566.183.012	1 Laporan	117.121.027.021	APBD	Dinas Pendidikan
Strategi: Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri														
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat	Digitalisasi Kelas Calon Pengantin	12 laporan	668,528,387	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)											Penduduk dan Keluarga Berencana

4.4.3. Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat

Tabel 38. Peta Jalan Smart Society - Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital														
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	Aplikasi E-PPNS	80 Orang	121,324,800	-	-	-	-	-	-	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban	Aplikasi Gudang	11 Lembaga	30.960.074.693		28.834.331.701	11 Lembaga	32.948.135.278	11 Lembaga	34.779.391.727	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			umum											
3	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Aplikasi Armada	11 Lembaga	30.960.074.693		28.834.331.701	11 Lembaga	32.948.135.278	11 Lembaga	34.779.391.727	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkara yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	SI Pelanggaran (Penegakan) Perda Reklame	94 Objek	2.008.690.246		2.097.076.727	94 Objek	2.150.358.956	94 Objek	2.282.865.455	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan	Tim Penegak Perda (Pencegahan , Penanganan dan	11 Lembaga	30.960.074.693		28.834.331.701	11 Lembaga	32.948.135.278	11 Lembaga	34.779.391.727	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Daerah Kabupaten/Kota	ketentraman dan ketertiban umum	Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Surabaya)										
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital														
7	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	dalam Daerah	Commad Center Siaga 112	10 Jenis	26.895.036.122		27.620.179.064	10 Jenis	29.169.076.790	10 Jenis	28.359.845.538	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten/ Kota	Aplikasi Sigap (Siaga Bencana) Kota Surabaya	42 Kegiatan	18.345.740.230		18.610.191.999	42 Kegiatan	19.450.790.856	42 Kegiatan	20.320.537.831	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	Roti 7 Lapis	656 Petugas	58.153.396.059		56.413.724.499	656 Petugas	62.332.016.910	656 Petugas	62.884.592.427	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Non Kebakaran	Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												
10	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	Truk Tangker	656 Petugas	58.153.396.059		56.413.724.499	656 Petugas	62.332.016.910	656 Petugas	62.884.592.427	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
11	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	Face (Fire Alarm Connected)	460 Berkas	422.123.067		450.712.203	500 Berkas	495.444.220	520 Berkas	550.836.044	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12	Program Pencegahan, Penanggulangan,	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi	Madagaskar (Masyarakat dan Keluarga	460 Berkas	422.123.067		450.712.203	500 Berkas	495.444.220	520 Berkas	550.836.044	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		kebakaran bangunan/gedung	Siaga Bencana (Kebakaran)										
13	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	Wisata Edukasi Damkar Cilik (WISDAMCIL)	80 Kegiatan	528.198.155		550.558.006	100 Kegiatan	574.010.953	110 Kegiatan	598.612.882	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	Damkar Kota Sambang Kampus	80 Kegiatan	528.198.155		550.558.006	100 Kegiatan	574.010.953	110 Kegiatan	598.612.882	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
15	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	SIKEKAL (Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan)	80 Kegiatan	528.198.155		550.558.006	100 Kegiatan	574.010.953	110 Kegiatan	598.612.882	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
16	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	Mosidamkar (Mobil Simulasi Pemadam Kebakaran)	80 Kegiatan	528.198.155		550.558.006	100 Kegiatan	574.010.953	110 Kegiatan	598.612.882	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
17	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang	Tata Kelola Keamanan Informasi	100%	51,612,543,482	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
18	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dilaporkan oleh perangkat daerah	MCFA (Master Control Fire Alarm)									APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	Command Center 112	4 Jenis	13,907,183,482	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 112	3 kali/per hari	3,952,705,422	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

4.5. Smart Living

4.5.1. Harmonisasi Tata Ruang

Tabel 39. Peta Jalan Smart Living- Harmonisasi Tata Ruang

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta														
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	Aplikasi pemeliharaan jalan	130 dokumen	538.868.745.656		546.323.264.452	137 dokumen	584.237.794.263	137 dokumen	610.347.180.061	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
2	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	Cekatan (Percepatan sertifikasi aset jalan dan saluran)	240 berkas	3,393,943,846	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan	Aplikasi Sipetarung	3 dokumen	2,614,831,549	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			informasi enataan ruang kota yang disusun											
4	Program Pengembangan Perumahan	Kegiatan pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	Aplikasi E-Rusun	5157 Unit	24,541,335,481	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5	Program Kawasan Permukiman	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	Aplikasi E-Rusun	Hunian	44,823,085,272	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	Aplikasi E-Rutilahu (program dandan omah)	7 lokasi	31,967,970,200	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	pelaksanaan	Aplikasi SIPSU	11 dokumen	1,752,443,060	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan	Sistem Informasi Pengadaan Tanah	1 lokasi	114,172,843,715	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Strategi: Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik														
19	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Iwak Peyek (Pengaduan Proyek)	100%	234,961,020	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

4.5.2. Sarana / Prasarana Kesehatan

Tabel 40. Peta Jalan Smart Living - Sarana / Prasarana Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Peningkatan jangkauan akses kesehatan khususnya pada masyarakat miskin pengembangan sistem data terintegrasi														
1	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan	Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	Sayang Warga (Tim Pendamping Keluarga)	10 Kelompok	15,889,334,760	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Sayang Warga (Zero Stunting)	6 Kegiatan	118,422,417,560	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Kesehatan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	yang dilakukan Puskesmas	Aplikasi PWS (Pemantauan Wilayah Setempat)	3 Dokumen	297.464.625.938		281.375.735.162	3 Dokumen	247.330.978.309	3 Dokumen	243.770.684.798	APBD	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Kesehatan Masyarakat	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	e-health	100 Dokumen	447.103.370.338		451.533.950.145	70 Dokumen	483.118.534.697	100 Dokumen	492.472.018.934	APBD	Dinas Kesehatan
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	e-health	3 Aplikasi	274.717.090		301.543.425	3 Aplikasi	330.989.299	3 Aplikasi	363.310.759	APBD	Dinas Kesehatan
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	Sisinfokes (Sistem Informasi Kesehatan)	3 Aplikasi	274.717.090		301.543.425	3 Aplikasi	330.989.299	3 Aplikasi	363.310.759	APBD	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Masyarakat													
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	Aplikasi Persetujuan Teknis Perizinan	122 Lembaga	45.794.215.781		49.808.389.329	122 Lembaga	53.713.109.522	122 Lembaga	57.856.510.085	APBD	Dinas Kesehatan
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Aplikasi Persetujuan Teknis Perizinan	0,79	52.218.000		52.218.000	0,81	52.218.000	0,82	52.218.000	APBD	Dinas Kesehatan
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post	Jumlah PIRT yang dibina	Aplikasi Persetujuan Teknis Perizinan	217 PIRT	1.946.728.483		2.195.658.863	217 PIRT	2.475.587.349	217 PIRT	2.790.371.493	APBD	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Upaya Kesehatan Masyarakat	Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga												
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	Jago Ceting (Jagongan Cegah Stunting)	3 Dokumen	297.464.625.938		281.375.735.162	3 Dokumen	247.330.978.309	3 Dokumen	243.770.684.798	APBD	Dinas Kesehatan
11	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	INCIP KOLAK KANRI (Inisiasi Menciptakan Kota Layak Anak di UPTD Kampung Anak Negeri)	12 kali	38,594,545,135		40,363,410,248	12 kali	43,432,529,814	12 kali	45,567,673,751	APBD	Dinas Sosial

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
12	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	Care Giver (Perawat Lansia)	12 kali	19,075,380,595		20,132,133,496	12 kali	21,381,780,161	12 kali	21,530,809,387	APBD	Dinas Sosial
13	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	Iso Mangan	12 kali	19,075,380,595		20,132,133,496	12 kali	21,381,780,161	12 kali	21,530,809,387	APBD	Dinas Sosial
14	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik yang Dikembangkan	Aplikasi Sayang Warga	190 Unit	5,272,055,132	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Strategi: Diversifikasi pangan berkelanjutan														

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
15	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Neger	kasurboyo	3 Jenis	1.104.581.389		1.151.942.723	3 Jenis	1.201.662.640	3 Jenis	1.253.879.444	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

4.5.3. Sarana / Prasarana Trasportasi

Tabel 41. Peta Jalan Smart Living - Sarana / Prasarana Trasportasi

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Sistem Transportasi Perkotaan Terpadu														
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	permukiman kumuh	Optimalisasi kinerja lalu lintas dan simpang apill (alat pemberi isyarat lalu lintas)	31 Kawasan	287.393.942.808		269.921.556.001	31 Kawasan	312.757.928.203	31 Kawasan	323.533.150.600	APBD	Dinas Perhubungan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraa n Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	Sistem Bus Priority	31 Kawasan	287.393.942.808		269.921.556.001	31 Kawasan	312.757.928.203	31 Kawasan	323.533.150.600	APBD	Dinas Perhubungan
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraa n Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	Smart System PJU	31 Kawasan	287.393.942.808		269.921.556.001	31 Kawasan	312.757.928.203	31 Kawasan	323.533.150.600	APBD	Dinas Perhubungan
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Mobile POS Machine - Handheld	60 Berkas	17.829.503.234		17.418.066.766	60 Berkas	19.482.835.608	60 Berkas	20.323.723.533	APBD	Dinas Perhubungan
5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	Whatsapp Gateway Habis Masa Uji Berkala Kendaraan Bermotor	134.525 Unit	8.885.258.931		8.081.330.492	134.525 Unit	9.393.355.671	134.525 Unit	8.140.370.621	APBD	Dinas Perhubungan
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan	Kegiatan Penetapan Rencana Umum	Jumlah penetapan jaringan trayek	Penataan Jaringan Angkutan	1 Jaringan	4.438.689.996		4.242.167.786	1 Jaringan	4.862.538.757	1 Jaringan	5.090.782.255	APBD	Dinas Perhubungan

	Angkutan Jalan (LLAJ)	Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	angkutan umum perkotaan	Umum Trunk dan Feeder (Surabaya Bus dan Feeder Wira Wiri)										
--	-----------------------	--	-------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.6. Smart Environment

4.6.1. Pengelolaan Sampah dan Limbah

Tabel 42. Peta Jalan Smart Environment - Pengelolaan Sampah dan Limbah

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta														
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	Pembangunan angki Septik Komunal	2 kelurahan	7,289,033,886	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	Aplikasi REPLICA (Retribusi Pengelolaan Limbah Cair)	2 kelurahan	8.413.522.790		8.463.679.752	2 kelurahan	8.996.614.169	2 kelurahan	9.306.760.255	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Daerah Kabupaten/Kota												
3	Program pengelolaan sarana dan prasana	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	E-Maintenance	266 Unit	45,654,753,685	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Strategi: Penguatan konsep gerakan Surabaya Green City melalui lembaga formal dan nonformal														
4	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Aplikasi SIBASAM (Bank Sampah)	1 jenis	6,713,859,700	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pompa Banjir yang	Waste Station	3 jenis	416.225.486.892		402.915.508.670	3 jenis	436.817.484.658	3 jenis	445.929.165.170	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Dioperasikan dan	Aplikasi SWAT (Solid Waste Transportation)	3 jenis	416.225.486.892		402.915.508.670	3 jenis	436.817.484.658	3 jenis	445.929.165.170	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
7	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Dipelihara	TPS 3R	3 jenis	416.225.486.892		402.915.508.670	3 jenis	436.817.484.658	3 jenis	445.929.165.170	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

4.6.2. Proteksi Lingkungan

Tabel 43. Peta Jalan Smart Environment - Proteksi Lingkungan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta														
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	Aplikasi Sistem Monitoring Pekerjaan Drainase	80 dokumen	478.924.648.006		473.086.221.887	80 dokumen	538.255.266.414	80 dokumen	582.830.776.602	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik	Aplikasi SIMIPAL (pemeliharaan IPAL)	2 kelurahan	8.413.522.790		8.463.679.752	2 kelurahan	8.996.614.169	2 kelurahan	9.306.760.255	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Limbah	Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	yang dibangun											
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	kerangboyo	13 Laporan	17.964.887.015		17.667.501.109	13 Laporan	19.201.685.034	13 Laporan	19.907.914.092	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Strategi: Penguatan konsep gerakan Surabaya Green City melalui lembaga formal dan nonformal														
4	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pembinaan dan Pelatihan pengelolaan lingkungan	1 jenis	6,713,859,700	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	Kegiatan SSC (Surabaya Smart City)	4 penghargaan	605.737.179		601.342.835	4 penghargaan	666.080.075	4 penghargaan	687.891.941	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	Aplikasi PKL (Pemantauan Kualitas Lingkungan)	2 jenis	2.681.456.640		2.705.937.582	2 jenis	2.832.192.465	2 jenis	2.963.234.242	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	Aplikasi PKU (Pemantauan Kualitas Udara)	2 stasiun	3.436.430.438		3.530.317.116	2 stasiun	3.775.498.853	2 stasiun	3.768.206.342	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	Aplikasi BIS (Biodiversity Information System)	3 dokumen	98.190.421.539		98.210.450.750	3 dokumen	109.108.439.323	3 dokumen	114.572.766.111	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan	Aplikasi System and Web Application	3 dokumen	98.190.421.539		98.210.450.750	3 dokumen	109.108.439.323	3 dokumen	114.572.766.111	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kabupaten/Kota	hidup daerah yang disusun	for Graveyard (SWAG)										
10	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	Aplikasi E-Simpel	432 obyek	3.201.840.607		3.243.641.907	432 obyek	3.841.562.410	432 obyek	4.000.328.507	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
11	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Percepatan waktu penerbitan layanan persetujuan lingkungan di SSW	1	604.134.232		622.589.238	1	708.602.839	1	732.771.403	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

4.6.3. Tata Kelola Energi

Tabel 44. Peta Jalan Smart Environment - Tata Kelola Energi

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Penguatan konsep gerakan Surabaya Green City melalui lembaga formal dan nonformal														
1	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	Pengolahan Sampah Menjadi Listrik (TPA Benowo)	3 jenis	416.225.486.892		402.915.508.670	3 jenis	436.817.484.658	3 jenis	445.929.165.170	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

5. Penutup

Buku II Masterplan Smart City menjelaskan Arah Pembangunan serta Strategi Pembangunan, Rencana Aksi dan Peta Jalan Pembangunan Smart City Surabaya pada setiap dimensinya. Dalam penyusunannya, Kota Surabaya mengacu pada Panduan Penyusunan Masterplan Smart City Kementerian Kominfo dan selaras dengan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026.

Arah pembangunan Smart City dirumuskan melalui Visi, Misi, Sasaran dan Indikator pelaksanaan Smart City. Dalam mewujudkan arah pembangunan tersebut, maka ditetapkan langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan langkah strategis adalah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats*). Selanjutnya, arah dan strategi pembangunan dituangkan dalam Rencana Aksi dan Peta Jalan Tahun 2023 - 2026 sebagai pedoman Kota Surabaya dalam mewujudkan Smart City.

Demikian Buku II Masterplan Smart City Surabaya Tahun 2023 - 2026 ini telah selesai disusun. Kami menyadari bahwa isi dari Buku II Masterplan Smart City Kota Surabaya ini masih membutuhkan banyak perbaikan dan sebagai *living document* maka Buku II Masterplan Smart City akan senantiasa dilakukan reviu, evaluasi, dan pembaruan.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

1. Latar Belakang

Revolusi industri merupakan suatu perubahan besar di bidang teknologi yang menyebabkan perubahan cara hidup manusia dan proses kerja secara fundamental, dimana adanya kemajuan teknologi dapat mengintegrasikan dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak disiplin ilmu. Saat ini revolusi industri sudah mencapai tahap yang lebih tinggi yang disebut revolusi industri 4.0. Pada era digital sekarang muncul konsep society 5.0. Munculnya konsep era society 5.0 adalah hasil perkembangan dari era revolusi industry 4.0. Konsep industry 4.0 yang mengedepankan manusia sebagai sumber inovasi dan tidak terlepas dari teknologi. Munculnya konsep ini membuat permasalahan manusia di perkotaan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan, salah satunya dengan konsep kota cerdas. Sedangkan revolusi industri 5.0 atau society 5.0 semua proses dilakukan secara sistem otomatis di dalam semua proses aktivasi. Teknologi informasi saat ini semakin berkembang, sehingga tidak hanya menghubungkan manusia seluruh dunia. Konsep society 5.0 juga menjadi suatu basis bagi proses transaksi antara pemerintah dan masyarakat secara online. Oleh karena itu pemerintah diwajibkan cerdas untuk mampu menghadapi era globalisasi dan revolusi 5.0. s memungkinkan siapapun untuk mengakses juga membagikan informasi di internet. Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan (artificial intellegent) sedangkan society 5.0 fokus pada komponen manusianya. Pada era globalisasi dan digital saat ini, pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan. Karena masyarakat sekarang adalah masyarakat yang butuh informasi, di mana ruang dan waktu bukanlah penghalang untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan. Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.

2. Visi dan Misi Smart City Daerah

2.1. Visi

Visi Pembangunan Kota Cerdas Kota Surabaya untuk periode tahun 2023 - 2026 yang selaras dengan visi pembangunan daerah Kota Surabaya, yaitu:

Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan dalam Pembangunan Multi Sektor dan Pelayanan Publik yang Cerdas

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Surabaya mampu berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut:

- **Maju**

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu menjadi barometer perkembangan ekonomi bukan hanya di tingkat Jawa Timur namun juga di tingkat Nasional. Perwujudan pada Visi menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan tingkat Maju perekonomiannya adalah sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya.

Upaya pembangunan ekonomi Kota Surabaya kedepan harus berbasis kepada sektor potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Prioritas pembangunan ekonomi kedepan haruslah berbasis kepada sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencaharian masyarakat banyak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Surabaya. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi. Sebagai sentra ekonomi dan sentra penghubung ekonomi antar wilayah di Jawa Timur maupun di Nasional kebutuhan infrastruktur pendukung perdagangan menjadi faktor penting untuk terus dikembangkan di Kota Surabaya

- **Humanis**

Implementasi Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan tujuan pemerintah daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejahtera direpresentasikan

dengan konsep terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, rasa aman dan nyaman. Kesejahteraan mencakup unsur pembangunan kualitas manusia, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, rasa aman dan nyaman untuk tinggal dan bekerja, serta lingkungan hidup yang sehat berkelanjutan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan Kota Surabaya sebagai tempat yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman yang berarti kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan melakukan penataan ruang publik yang hijau sehingga nyaman dan ramah untuk anak, lansia serta difabel. Kemudian rasa nyaman, yang berarti menggambarkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, rekreasi dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.

- **Berkelanjutan**

Pembangunan Kota Surabaya harus mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (Sustainability Development) yaitu bagaimana pembangunan yang menedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kota Surabaya mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya.

Kota Surabaya akan menjadi kota yang sehat, indah, nyaman serta aman dengan memenuhi infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung warganya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat ekonomi serta mendukung kelancaran mobilitas warga serta bebas macet. Kota Surabaya harus mendukung dampak ekologi yang muncul dari aktivitas kota salah satunya dengan membangun tata kelola sampah dengan teknologi modern yang ramah lingkungan. Selain itu mengembangkan Kota Surabaya sebagai kota digital, membangun fasilitas dan ruang olahraga, ruang seni, dan ruang ekspresi bagi warganya, serta dapat terhubungnya tatanan landscape kota yang dapat mendukung konektivitas ekonomi dan sosial masyarakat Kota Surabaya secara berkelanjutan.

- **Pembangunan Multisektor**

Proses Pembangunan Kota Surabaya dilakukan dengan melakukan pendekatan pembangunan yang multisektor. Pendekatan multisektor mulai dirintis untuk memantapkan arah tata kelola skala landscape (landscape governance). Artinya adalah, proses pembangunan dilakukan dengan adanya kolaborasi antar sektor. Kolaborasi perlu dibangun agar proses pembangunan pada satu sektor tidak mematikan sektor lainnya. Pembangunan multisektor merupakan pembangunan yang memberikan perspektif yang lebih baik dalam melakukan identifikasi dan evaluasi pada berbagai faktor yang dapat menciptakan daya saing pada perekonomian wilayah.

Melakukan identifikasi secara menyeluruh pada setiap sektor sangatlah diperlukan dalam melakukan pembangunan daerah. Hal ini untuk mengetahui potensi apa yang dapat menjadi sektor unggulan yang dapat lebih dikembangkan. Dan sektor apa yang menjadi sektor pendukung yang juga dikembangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan mengetahui sektor unggulan maka pemerintah akan lebih mudah dalam menentukan arahan pengembangan daerah dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong sektor unggulan daerah untuk lebih berkembang dan lebih dikenal banyak orang. Dengan begitu diharapkan kedepannya dapat menjadi contoh pertumbuhan yang dapat meningkatkan daya tarik daerah lainnya untuk mengembangkan daerahnya.

- **Pelayanan Publik yang Cerdas**

Pelayanan Publik yang Cerdas menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan Kota Cerdas (Smart City). Smart Governance adalah salah satu dimensi yang terdapat pada Smart City. Smart Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan, kinerja efisiensi kebijakan publik serta kinerja dan kualitas pelayanan publik. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas diawali dengan menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai serta adanya keterlibatan antara masyarakat dan pemerintah. Tata kelola pemerintahan berbasis digital pun saat ini mulai dikembangkan. Penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk melakukan berbagai inovasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelayanan kepada publik. Kunci Kota Cerdas adalah integrasi, dimana sektor-sektor yang terkait

dengan pelayanan publik saling terhubung satu sama lain. Serta mulai menerapkan konsep sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku walidata dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan/kebijakan.

Pelayanan publik diharapkan cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel dan transparan sehingga pelayanan publik semakin hari semakin dinamis. Pelayanan yang dulunya berminggu-minggu, kini hanya hitungan hari. Bahkan tidak menutup kemungkinan, nantinya pelayanan hanya dalam hitungan jam. Ini berkembang seiring tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat. Saat ini, Kota Surabaya telah menerapkan pelayanan yang bisa diakses secara elektronik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan dimanapun dan kapanpun. Untuk kelengkapan persyaratan dokumen dapat dilengkapi secara online.

2.2. Misi

Pembangunan Kota Cerdas Surabaya Tahun 2023 - 2026 mendukung visi **Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan dalam Pembangunan Multi Sektor dan Pelayanan Publik yang Cerdas**. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Cerdas Surabaya Tahun 2023 - 2026, maka berikut ditetapkan misi yang selaras dengan misi pembangunan Kota Surabaya yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya 2021 - 2026:

a. Misi 1: Memperkuat perekonomian dan daya saing kota melalui kemandirian ekonomi lokal dan peningkatan investasi multisektor

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran bahwa pemerintah mampu mengelola potensi ekonomi daerah untuk menjadi pilar pembangunan khususnya untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan ekonomi Kota Surabaya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan dampaknya mampu dirasakan oleh masyarakat banyak. Lokomotif perekonomian Kota Surabaya merupakan sektor potensial yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat namun mengedepankan potensi lokal sebagai motor dan pilar utama perekonomian guna kemandirian ekonomi lokal dan daya saing daerah. Selain itu, pilar ekonomi hendaknya mampu menciptakan lapangan pekerjaan

yang banyak bagi masyarakat sehingga mampu menunjang upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan daerah. Penciptaan iklim investasi menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan ekonomi Kota Surabaya tentunya dengan dukungan sistem birokrasi yang efektif dan efisien mendukung perijinan yang cepat dan murah. Penguatan daya saing daerah Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi di Jawa Timur serta di nasional dalam sektor perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional melalui peningkatan infrastruktur pendukung yang berkualitas dan terintegrasi.

b. Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya serta penciptaan keamanan dan keadilan yang holistik

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal perlu didukung modal manusia (*human capital*) yang unggul yaitu sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki ketrampilan tinggi dan produktif, sehat jasmani dan rohani serta berkarakter. Maka dari itu investasi manusia (*human investment*) menjadi misi penting dalam mendukung tercapainya visi Kota Surabaya kedepan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kota Surabaya perlu didukung oleh peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.

Masyarakat yang bermukim di Kota Surabaya terdiri dari beragam suku, agama dan budaya yang menjadi identitas dari Bangsa Indonesia. Kemajemukan dan Keberagaman masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Surabaya tentunya akan membawa kepada dinamika kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Diperlukan suatu perekat social (*Social Glue*), jembatan social (*Social Bridging*), dan pelumas social (*Social Oil*) dalam modal sosial masyarakat agar tercipta tatanan harmonis dalam kehidupan masyarakat yang multi kultur di Kota Surabaya. Untuk mewujudkan sebagai Kota Dunia maka ketertiban dan keamanan menjadi isu penting yang harus dijaga di Kota Surabaya. Upaya pencegahan dan penanggulangan konflik dan pelanggaran perda yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat harus ditingkatkan. selain itu potensi yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman lainnya adalah potensi bencana yang mungkin timbul di Kota Surabaya. Peningkatan ketahanan bencana Kota Surabaya menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan kota melalui perbaikan kualitas mitigasi dan penanganan bencana ditingkat masyarakat.

c. Misi 3: Memantapkan tata ruang kota yang terintegrasi, modern, berkelas dunia, dan berkelanjutan

Kota dalam struktur ruang menjadi pusat perekonomian wilayah dan memiliki peran penting bagi pembangunan. Pembangunan perkotaan menjadi bagian bagi pembangunan nasional, maka dari itu harus memperhatikan keselarasan dan keseimbangan antara berbagai kebutuhan baik kebutuhan untuk ekonomi maupun kebutuhan mendasar masyarakat akan infrastruktur kota yang menjamin hidup masyarakat yang berkualitas. Pembangunan Kota Surabaya berusaha untuk mewujudkan kota yang indah dan nyaman dengan terpenuhinya infrastruktur yang berkualitas dunia dan merata yang mendukung konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat yang berkelanjutan dengan melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin keberlanjutan sumber daya daerah serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

d. Misi 4: Memantapkan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, dinamis dan tangkas

Pemerintah daerah memegang peranan penting bagi perkembangan daerah melalui fungsi sebagai regulator serta fasilitator. Dukungan pemerintah dalam pembangunan daerah harus didukung oleh layanan publik yang prima. Untuk mencapai kondisi layanan prima tersebut perlu terwujud pemerintahan yang baik (good government) dan tata kelola yang baik (good governance). Layanan publik perlu didukung birokrasi yang bersih agar tidak menimbulkan biaya birokrasi tinggi. Pelayanan publik juga diharapkan mampu dinamis dan tangkas menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi dilapangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin bervariasi kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien dengan melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi sehingga tata kelola pemerintah dapat berjalan efektif.

3. Strategi Pembangunan Smart City

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran pembangunan kota cerdas. Strategi memperhatikan faktor

internal dan eksternal dilingkungan Pemerintahan Kota Surabaya. Rumusan strategi menunjukkan bagaimana pemerintah daerah berupaya dalam menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah.

Penentuan alternatif strategi ditentukan berdasarkan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats atau yang dikenal dengan Analisis SWOT. Alat analisis ini merupakan rujukan utama Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Sesuai dengan prinsip perencanaan publik, alat analisis ini sederhana, mudah tetapi memiliki hasil yang kuat apabila dilaksanakan sesuai prosedur teoritik. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dijelaskan pada Buku I, maka ditetapkan strategi kota cerdas setiap dimensi sebagai berikut:

3.1. Strategi Smart Governance

- a. Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia
- b. Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa
- c. Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan
- d. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri
- e. Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital

3.2. Strategi Smart Branding

- a. Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia
- b. Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa
- c. Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta

- d. Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan
- e. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri
- f. Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik
- g. Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia
- h. Pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah serta pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
- i. Diversifikasi pangan berkelanjutan

3.3. Strategi Smart Economy

- a. Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia
- b. Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa
- c. Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan
- d. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri
- e. Pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah serta pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
- f. Diversifikasi pangan berkelanjutan
- g. Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik

3.4. Strategi Smart Society

- a. Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa
- b. Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital
- c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

- d. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri
- e. Pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta secara berkelanjutan
- f. Peningkatan sumberdaya dan jangkauan penanggulangan bencana berbasis spasial

3.5. Strategi Smart Living

- a. Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Sistem Transportasi Perkotaan Terpadu
- b. Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta
- c. Peningkatan jangkauan akses kesehatan khususnya pada masyarakat miskin pengembangan sistem data terintegrasi
- d. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
- e. Diversifikasi pangan berkelanjutan
- f. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri
- g. Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik

3.6. Strategi Smart Environment

- a. Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta
- b. Penguatan konsep gerakan Surabaya Green City melalui lembaga formal dan nonformal
- c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
- d. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri
- e. Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik

4. Peta Jalan Pembangunan Smart City Daerah

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang dalam pembangunan Smart City dengan memperhatikan arah kebijakan, maka disusun Peta Jalan Pembangunan Smart City Surabaya periode tahun 2023 - 2026 mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 agar pembangunan Smart City selaras dengan pembangunan kota. Peta Jalan Pembangunan Smart City berisi program, kegiatan, indikator kinerja, inovasi, target kinerja / anggaran, sumber dana serta leading sector pelaksana inovasi. Berikut Peta Jalan Pembangunan Smart City Surabaya berdasarkan 6 dimensi adalah sebagai berikut:

4.1. Smart Governance

4.1.1. Efisiensi Kebijakan Publik

Tabel 1. Peta Jalan Smart Governance - Efisiensi Kebijakan Publik

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital														
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	Aplikasi e-Planning	6 dokumen	1,189,883,160		1,242,804,801	7 dokumen	1,342,263,496	6 dokumen	1,402,990,689	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital														
2	Program Perencanaan, Pengendalian	Kegiatan Analisis Data dan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah	Aplikasi e-Planning	33 data urusan	1,352,146,040		1,328,476,808	33 data urusan	1,455,312,933	33 data urusan	1,519,411,379	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	pengampu data urusan											Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi e-Planning	58 PD	875,663,843		888,378,688	58 PD	961,082,007	58 PD	1,007,199,455	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	Aplikasi Satu Data, Informasi dan Administrasi (ADINDA)	2 jenis	3,513,313,402	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	SUSAN MAS-E (SURvei kepuaSAN MASyarakat Elektronik)	58 instansi	2,854,993,610		3,107,580,348	58 instansi	3,545,860,943	58 instansi	3,818,611,182	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

4.1.2. Layanan Publik

Tabel 2. Peta Jalan Smart Governance - Layanan Publik

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan														
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	Mall Pelayanan Publik	85.000 berkas	3,588,990,147	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital														
2	Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Klampid New Generation (KNG)	156000 berkas	2,292,088,029		2,407,151,341	156000 berkas	2,528,310,073	156000 berkas	2,655,891,757	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
3	Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan		156000 berkas	712,854,588		748,444,776	156000 berkas	785,928,238	156000 berkas	825,405,938	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan		156000 berkas	712,854,588		748,444,776	156000 berkas	785,928,238	156000 berkas	825,405,938	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan		36000 berkas	1,314,255,500		1,380,691,388	36000 berkas	1,450,661,440	36000 berkas	1,524,354,120	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		36000 berkas	385,520,309		404,502,707	36000 berkas	424,494,889	36000 berkas	445,550,725	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			yang diterbitkan											
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi		48000 data	373,822,063		392,100,631	48000 data	411,351,573	48000 data	431,626,693	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan		5 Lembaga	566,103,200		593,673,752	5 Lembaga	622,711,005	5 Lembaga	653,293,096	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan		32 unit layanan	1,677,948,231		1,735,238,255	32 unit layanan	1,794,905,901	32 unit layanan	1,857,062,872	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kependudukan												
10	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	LONTONG BALAP (Layanan Online Terpadu One Gate System Bersama Disdukcapil dan Pengadilan Negeri)	36000 berkas	385,520,309		404,502,707	36000 berkas	424,494,889	36000 berkas	445,550,725	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	LONTONG KUPANG (Layanan Online dan Terpadu Melalui One Gate System Disdukcapil bekerja sama dengan	156000 berkas	2,292,088,029		2,407,151,341	156000 berkas	2,528,310,073	156000 berkas	2,655,891,757	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				Pengadilan Agama dan Kementerian Agama)										
12	Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Aplikasi PUNTADEW A	156000 berkas	2,292,088,029		2,407,151,341	156000 berkas	2,528,310,073	156000 berkas	2,655,891,757	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	SATE KERANG (Sistem Arsip TErpadu Kependudukan secaraRA diGital)	156000 berkas	712,854,588		748,444,776	156000 berkas	785,928,238	156000 berkas	825,405,938	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan		36000 berkas	1,314,255,500		1,380,691,388	36000 berkas	1,450,661,440	36000 berkas	1,524,354,120	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
15	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan		36000 berkas	385,520,309		404,502,707	36000 berkas	424,494,889	36000 berkas	445,550,725	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Aplikasi TAKON KLAMPID	156000 berkas	712,854,588		748,444,776	156000 berkas	785,928,238	156000 berkas	825,405,938	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Penduduk yang diidentifikasi	KALIMASAD A (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk)	48000 data	373,822,063		392,100,631	48000 data	411,351,573	48000 data	431,626,693	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
18	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	Pembayaran non tunai retribusi	14 Lokasi	25.244.860.81 3		24.598.980.73 7	14 Lokasi	27.689.266.64 4	14 Lokasi	29.006.403.57 2	APBD	Dinas Perhubungan
19	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Aplikasi PMKS	11 Lembaga	30.960.074.69 3		28.834.331.70 1	11 Lembaga	32.948.135.27 8	11 Lembaga	34.779.391.72 7	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
20	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis lektronik yang Dikembangkan	Aplikasi SSW Alfa	190 Unit	5,272,055,132	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
21	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	Aplikasi Media Center	4 Jenis	13,907,183,482	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		Backoffice Webprofile	Dinas Komunikasi dan Informatika										
Strategi: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa														
23	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Aplikasi Amelia (Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pasar)	12 Laporan	1,145,387,183		1,161,705,036	12 Laporan	1,252,080,946	12 Laporan	1,309,690,535	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
24	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Aplikasi Amelia (Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pasar)	12 Laporan	1,145,387,183		1,161,705,036	12 Laporan	1,252,080,946	12 Laporan	1,309,690,535	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
25	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Aplikasi Amelia (Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pasar)	12 Laporan	1,145,387,183		1,161,705,036	12 Laporan	1,252,080,946	12 Laporan	1,309,690,535	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
26	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Sistem Informasi Report Perizinan Dinas	12 Laporan	292,535,281	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
27	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Sistem Informasi Report Perizinan Dinas	12 Laporan	100,145,094	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
28	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar	Sistem Informasi Report Perizinan Dinas	12 Laporan	50,400,000	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
29	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Sistem Informasi Report Perizinan Dinas	12 Laporan	285,635,281	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

4.1.3. Manajemen Birokrasi yang Efisien

Tabel 3. Peta Jalan Smart Governance - Manajemen Birokrasi yang Efisien

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital														
1	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	E-SDM	0,91	2,563,043,088		2,636,992,589	0,93	2,731,161,199	0,94	2,823,680,454	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	E-SDM	0,91	2,563,043,088		2,636,992,589	0,93	2,731,161,199	0,94	2,823,680,454	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	E-SDM	8555 berkas	1,714,446,784		1,759,333,953	8555 berkas	1,857,675,179	8555 berkas	1,935,059,689	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
4	Progam Penunjang Urusan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Sijaka	100%	15,594,212,085	-	-	-	-	-	-	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Progam Penunjang Urusan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Sinora	100%	514,848,632	-	-	-	-	-	-	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penggunaan Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana	Aplikasi SIGASDA	100%	830,873,406	-	-	-	-	-	-	APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Aplikasi Epayment	24 Dokumen	1,063,238,968	-	-	-	-	-	-	APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
8	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	yang disusun	Elektronik Arsip (e-Arsip)	Laporan	173,021,149	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	Elektronik Arsip (e-Arsip)	Pertanggungjawab an	906,345,880	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip yang dialih mediakan	Elektronik Arsip (e-Arsip)	Pelaksan aan APBD	1,731,730,984	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan yang berlaku	Si ToMaS PeDe (Sistem moniToring reforMasi birokraSi Perangkat Daerah)	yang disusun	2,854,993,610		3,107,580,348	58 instansi	3,545,860,943	58 instansi	3,818,611,182	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan evaluasi kelembagaan dan/atau analisis jabatan/analisis beban kerja sesuai kelembagaan	Telaga Asia (sisTem Evaluasi KeLembaGa an kotA SurabayA)	58 instansi	2,854,993,610		3,107,580,348	58 instansi	3,545,860,943	58 instansi	3,818,611,182	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			yang berlaku											
13	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	Aplikasi Penganggara n (eProject, eControlling, eDelivery, ePerformanc e)	2 Dokumen	13,621,154,000		14,203,780,270	2 Dokumen	15,434,863,395	2 Dokumen	16,052,307,032	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan)
14	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	Klinik Pengadaan Barang/Jasa	0,92	11,571,689,914		11,975,388,802	0,96	12,892,629,745	0,98	13,527,842,132	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan)
15	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik yang	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemanfaatan TIK	190 Unit	5,272,055,132	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kabupaten/Kota	Dikembangkan											
16	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Optimalisasi Pusat Data									APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Aplikasi E-Surat									APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengaduan Keluhan TIK (Service Desk)									APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
19	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Aplikasi Dashboard Kinerja									APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Aplikasi Sapu Jagad									APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang dianalisa	Aplikasi Satu Peta	5 Sektor	569,606,140	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Strategi: Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri														
22	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	E-SKP	2 jenis	2,260,820,026		2,266,261,854	2 jenis	2,418,400,713	2 jenis	2,545,647,725	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
23	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	E-Learning	2232 orang	1.556.443.280	2232 orang	1,618,755,270	2232 orang	1,846,676,067	2232 orang	2,027,792,776	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Aplikasi Diklat	168 orang	5,391,948,211		6,489,648,964	168 orang	7,289,606,713	168 orang	7,507,314,211	APBD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.2. Smart Branding

4.2.1. Ekosistem Bisnis Daerah

Tabel 4. Peta Jalan Smart Branding - Ekosistem Bisnis Daerah

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa														
1	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	memfasilitasi dalam	Operasi Pasar dan Pasar Murah	12 Laporan	1,145,387,183		1,161,705,036	12 Laporan	1,252,080,946	12 Laporan	1,309,690,535	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan														
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang	PESONA BUAYA (Pendamping an Sinergi dan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMK	85.000 berkas	4,831,437,390		4,723,516,288	95.000 berkas	5,363,410,534	100.000 berkas	5,864,491,950	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	telah diterbitkan	Surabaya										

4.2.2. Wajah Kota

Tabel 5. Peta Jalan Smart Branding - Wajah Kota

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta														
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya	Desain pedestrian	130 dokumen	538.868.745.656	137 dokumen	546.323.264.452	137 dokumen	584.237.794.263	137 dokumen	610.347.180.061	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			yang disusun											
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	Transportasi Umum Terintegrasi melalui feeder wira wiri dan Surabaya Bus	3 Koridor	57.332.572.717	3 Koridor	60.094.632.830	3 Koridor	64.114.956.319	3 Koridor	65.033.246.766	APBD	Dinas Perhubungan
Strategi: Pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah serta pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak														
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	Sistem Informasi Gender Arek Suroboyo (SIGAS)	1 kegiatan	747,665,140	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Strategi: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa														

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
4	Program Pemasaran Pariwisata	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	indikator kota layak	Festival Rujak Uleg	2 jenis	5.858.120.318		6.082.453.900	2 jenis	6.364.885.407	2 jenis	6.583.808.840	APBD	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
5	Program Pemasaran Pariwisata	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	anak	Surabaya Vaganza	2 jenis	5.858.120.318		6.082.453.900	2 jenis	6.364.885.407	2 jenis	6.583.808.840	APBD	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

4.2.3. Wisata

Tabel 6. Peta Jalan Smart Branding - Wisata

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan														
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	Adventure Land Romokalisari	13 Laporan	17.964.887.015		17.667.501.109	13 Laporan	19.201.685.034	13 Laporan	19.907.914.092	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan														
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	upaya pencapaian	e-Ticketing Destinasi Wisata Surabaya	2 lokasi	4.265.237.163		4.496.363.961	2 lokasi	5.054.373.512	2 lokasi	5.122.716.295	APBD	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

4.3. Smart Economy

4.3.1. Ekosistem Bisnis Daerah

Tabel 7. Peta Jalan Smart Economy - Ekosistem Bisnis Daerah

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan														
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	RINDU (Rekapitulasi Data Industri)	12 Laporan	848,179,341	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	E-Industri	12 Laporan	521.941.271		547.084.641	12 Laporan	573.305.627	12 Laporan	589.752.805	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya	Paving Geprek (padat Karya)	130 dokumen	538.868.745.656		546.323.264.452	137 dokumen	584.237.794.263	137 dokumen	610.347.180.061	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			yang disusun											
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	Klinik Investasi	1.200 perusahaan	863,765,857	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	Klinik Investasi	0,72	577.939.876		584.238.272	0,76	635.019.971	0,78	665.825.252	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Program Promosi Penanaman	Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah Calon Investor /	Klinik	250 Calon	658.709.199		684.022.654	300 Calon	694.510.379	300 Calon Investor /	738.216.183	APBD	Dinas Penanaman Modal dan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector	
					2023		2024		2025		2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
	Modal	Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	Investasi	Investor / Investor					Investor / Investor		Investor			Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	Lapis Lupis (Layanan Asistensi Pengisian dan Fasilitasi LKPM Untuk Peningkatan Investasi)	1.200 perusahaan	863,765,857	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Sistem Informasi Pengawasan Kegiatan Usaha Perdagangan berbasis GIS	12 Laporan	318,197,034	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
9	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Sistem Informasi Pengawasan Kegiatan Usaha Perdagangan berbasis GIS	12 Laporan	292,535,281	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
10	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Sistem Informasi Pengawasan Kegiatan Usaha Perdagangan berbasis GIS	12 Laporan	100,145,094	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
11	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Sistem Informasi Pengawasan Kegiatan Usaha Perdagangan berbasis GIS	12 Laporan	50,400,000	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Strategi: Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia														
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	IPRO - Investment Project Ready to Offer	0,72	577.939.876		584.238.272	0,76	635.019.971	0,78	665.825.252	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Strategi: Penguatan Daya Saing untuk Mendukung Kota Surabaya sebagai Pusat Perdagangan Nasional dan Dunia														
2	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Aplikasi Pensil Bu-In	12 Laporan	836,996,405	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
3		Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Verifikasi Laporan PHK									APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	Rumah Tera (Website UPTD Metrologi Legal)	12 Laporan	1,915,352,662	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		SiTerasi (Sidang Tera Ulang dengan Reparasi)										Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

4.3.2. Kesejahteraan Rakyat

Tabel 8. Peta Jalan Smart Economy - Kesejahteraan Rakyat

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan														
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ladang pangan	6 Jenis	777.863.493		806.590.564	6 Jenis	836.666.467	6 Jenis	868.156.972	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	Ladang pangan	4 Jenis	1.189.564.146		1.177.475.288	4 Jenis	1.267.668.253	4 Jenis	1.309.312.532	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	Ladang pangan	34 kali	338.768.552		351.564.854	38 kali	364.981.670	40 kali	379.055.908	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	Ladang pangan	1 laporan	1.154.682.945		1.126.169.294	1 laporan	1.254.373.830	1 laporan	1.307.951.499	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jenis pemberdayaan masyarakat dalam penganekaraga man konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Ladang pangan	3 Jenis	1.104.581.389		1.151.942.723	3 Jenis	1.201.662.640	3 Jenis	1.253.879.444	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik yang	Aplikasi Padat Karya	190 Unit	5,272,055,132	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kabupaten/Kota	Dikembangkan											
7	Program Pengembangan UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Proses Bisnis	Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	500 orang	1,332,831,865		1.307.889.738	500 orang	1,472,512,536	500 orang	1,548,127,050	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
8	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemerintahan	Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	12 laporan	5.887.875.757		5.705.895.109	12 laporan	6.584.588.827	12 laporan	6.660.120.026	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
9	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Berbasis Elektronik	Digitalisasi Pemberdaya an Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	12 laporan	5.887.875.757		5.705.895.109	12 laporan	6.584.588.827	12 laporan	6.660.120.026	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
10	Program Pengembangan UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	yang Dikembangkan	Digitalisasi Pemberdaya an Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	500 orang	1,332,831,865		1.307.889.738	500 orang	1,472,512,536	500 orang	1,548,127,050	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
11	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	Digitalisasi Pemberdaya an Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	12 laporan	5.887.875.757		5.705.895.109	12 laporan	6.584.588.827	12 laporan	6.660.120.026	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
12	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	Digitalisasi Pemberdaya an Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	12 laporan	5.887.875.757		5.705.895.109	12 laporan	6.584.588.827	12 laporan	6.660.120.026	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
13	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Digitalisasi Pemberdaya an Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	12 Laporan	4.696.317.428		4.285.392.608	12 Laporan	4.828.297.851	12 Laporan	4.968.208.636	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
14	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Digitalisasi Pemberdaya an Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	12 Laporan	4.696.317.428		4.285.392.608	12 Laporan	4.828.297.851	12 Laporan	4.968.208.636	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
15	Program Pengembangan UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	500 orang	1,332,831,865		1.307.889.738	500 orang	1,472,512,536	500 orang	1,548,127,050	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
16	Program Pengembangan UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Ekonomi (E-Peken)	500 orang	1,332,831,865		1.307.889.738	500 orang	1,472,512,536	500 orang	1,548,127,050	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Strategi: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran														
17	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	Pendaftaran Pelatihan Online	4 Laporan	5.819.422.328		6.406.191.701	4 Laporan	6.622.859.143	4 Laporan	6.876.862.013	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
18	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	PRO GADIS (Program Magang Disabilitas) Fasilitas magang untuk disabilitas melalui kerjasama dengan sejumlah institusi atau perusahaan di surabaya	4 Laporan	5.819.422.328		6.406.191.701	4 Laporan	6.622.859.143	4 Laporan	6.876.862.013	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
19	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	PENTAS (Kompetensi produktifitas) Fasilitas sertifikasi profesi bagi angkatan kerja untuk meningkatkan daya saing	4 Laporan	3.378.157.392		3.303.986.802	4 Laporan	3.966.520.675	4 Laporan	4.121.071.261	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				masyarakat										
20	Program Perluasan Tenaga Kerja	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo)	200 Orang	369,598,916	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
21	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Laporan Penonaktifan Pekerja secara digital	200 Orang	369,598,916	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
22	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan penyelenggara Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	Sistem Informasi Ketenagakerjaan	4 Laporan	369,598,916	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Strategi: Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industri dan jasa														

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
23	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	Aplikasi Laporan keuangan Koperasi	103 Orang	404,202,429	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
24	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	Aplikasi pengawasan koperasi (Awasi Boyo)	415 koperasi	711,462,964	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
25	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	Aplikasi UMKM	136 Orang	2.741.223.966		136 Orang	3215460337	136 Orang	136 Orang	3.423.538.598	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												
26	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	Aplikasi UMKM	136 Orang	2.741.223.966		136 Orang	3215460337	136 Orang	136 Orang	3.423.538.598	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
27	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	Aplikasi UMKM	136 Orang	2.741.223.966		136 Orang	3215460337	136 Orang	136 Orang	3.423.538.598	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
28	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha	Pengembang an Unit Usaha Koperasi Sektor Rill dengan menggunaka n business model canvas (BMC)	83 koperasi	383,211,117	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
29	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	koperasi	Sistem Barcode Pedagang	12 Laporan	4.696.317.428		4.285.392.608	12 Laporan	4.828.297.851	12 Laporan	4.968.208.636	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

4.3.3. Transaksi Keuangan

Tabel 9. Peta Jalan Smart Economy - Transaksi Keuangan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Kemudahan investasi dan penguatan komitmen kepada investor untuk penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan														
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik yang	Aplikasi Peken	190 Unit	5,272,055,132	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			Dikembangkan											

4.4. Smart Society

4.4.1. Ekosistem Belajar

Tabel 10. Peta Jalan Smart Society - Ekosistem Belajar

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta secara berkelanjutan														
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Aplikasi SIAGUS	12685 orang	34,326,710,500	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pendidikan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		pendidikan dasar (PAUD, dan pendidikan non formal / kesetaraan)												
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	minimal pendidik pada	Program Sekolahe Arek Suroboyo	1 Laporan	477.411.093.818		500.497.397.725	1 Laporan	620.489.175.423	1 Laporan	645.680.725.971	APBD	Dinas Pendidikan
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	jenjang sekolah dasar	Program Sekolahe Arek Suroboyo	1 Laporan	292.889.299.920		328.756.132.543	1 Laporan	349.025.854.856	1 Laporan	364.472.634.592	APBD	Dinas Pendidikan
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	Pengembang an PAUD HI	1 Laporan	143.699.377.052		147.461.969.060	1 Laporan	151.425.104.353	1 Laporan	155.588.380.376	APBD	Dinas Pendidikan
Strategi: Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri														
5	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pemustaka	Sistem Informasi Perpustakaa	82 nilai	14,567,898,378	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kabupaten/Kota		n (SIPUS)										
6	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bibit penulis dan pendongeng	Gendis Sewu	4477 orang	553,417,016	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Strategi: Peningkatan sumberdaya dan jangkauan penanggulangan bencana berbasis spasial														
5	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Wilayah Kerjanya	Program SINA - SINI (Edukasi Bencana Usia Dini)	Keluarga (PUSPA GA)	18.345.740.230		18.610.191.999	42 Kegiatan	19.450.790.856	42 Kegiatan	20.320.537.831	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.4.2. Interaksi Masyarakat yang Efisien

Tabel 11. Peta Jalan Smart Society - Interaksi Masyarakat yang Efisien

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)				Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026		

					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta secara berkelanjutan														
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	SICABOR (Sistem Informasi Cabang Olahraga)	5 kecamatan	41.018.328.515		21.722.840.178	7 kecamatan	41.540.635.959	9 kecamatan	24.739.225.447	APBD	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
Strategi: Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri														
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Digitalisasi Kelas Calon Pengantin	12 laporan	668,528,387	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	bagi Keluarga dalam	Ayo Sinau Bareng dan Ngaji Bareng	penyediaan layanan	477.411.093.818		500.497.397.725	1 Laporan	620.489.175.423	1 Laporan	645.680.725.971	APBD	Dinas Pendidikan
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Mewujudkan KG dan	Ayo Sinau Bareng dan Ngaji Bareng	keluarga oleh Ruang	292.889.299.920		328.756.132.543	1 Laporan	349.025.854.856	1 Laporan	364.472.634.592	APBD	Dinas Pendidikan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Menengah Pertama												
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Hak Anak yang	Komunitas Belajar Surabaya Setara Hebat	Pusat Pembelajaran an	100.967.587.378		105.975.669.193	1 Laporan	111.566.183.012	1 Laporan	117.121.027.021	APBD	Dinas Pendidikan
Strategi: Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Bermartabat dan Mandiri														
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Digitalisasi Kelas Calon Pengantin	12 laporan	668,528,387	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4.4.3. Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat

Tabel 12. Peta Jalan Smart Society - Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)				Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026		

					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital														
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	Aplikasi E-PPNS	80 Orang	121,324,800	-	-	-	-	-	-	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Aplikasi Gudang	11 Lembaga	30.960.074.693		28.834.331.701	11 Lembaga	32.948.135.278	11 Lembaga	34.779.391.727	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Aplikasi Armada	11 Lembaga	30.960.074.693		28.834.331.701	11 Lembaga	32.948.135.278	11 Lembaga	34.779.391.727	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Program Peningkatan Ketenteraman	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah objek pelanggaran perda dan	SI Pelanggaran (Penegakan)	94 Objek	2.008.690.246		2.097.076.727	94 Objek	2.150.358.956	94 Objek	2.282.865.455	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Dan Ketertiban Umum	Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	Perda Reklame										
5	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Tim Penegak Perda (Pencegahan , Penanganan dan Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Surabaya)	11 Lembaga	30.960.074.693		28.834.331.701	11 Lembaga	32.948.135.278	11 Lembaga	34.779.391.727	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
Strategi: Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital														
7	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	dalam Daerah	Commad Center Siaga 112	10 Jenis	26.895.036.122		27.620.179.064	10 Jenis	29.169.076.790	10 Jenis	28.359.845.538	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
8	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten/ Kota	Aplikasi Sigap (Siaga Bencana) Kota Surabaya	42 Kegiatan	18.345.740.230		18.610.191.999	42 Kegiatan	19.450.790.856	42 Kegiatan	20.320.537.831	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	Roti 7 Lapis	656 Petugas	58.153.396.059		56.413.724.499	656 Petugas	62.332.016.910	656 Petugas	62.884.592.427	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilatih	Truk Tangker	656 Petugas	58.153.396.059		56.413.724.499	656 Petugas	62.332.016.910	656 Petugas	62.884.592.427	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Daerah Kabupaten/Kota												
11	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	Face (Fire Alarm Connected)	460 Berkas	422.123.067		450.712.203	500 Berkas	495.444.220	520 Berkas	550.836.044	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah berkas pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan/gedung	Madagaskar (Masyarakat dan Keluarga Siaga Bencana Kebakaran)	460 Berkas	422.123.067		450.712.203	500 Berkas	495.444.220	520 Berkas	550.836.044	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
13	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui	Wisata Edukasi Damkar Cilik (WISDAMCIL)	80 Kegiatan	528.198.155		550.558.006	100 Kegiatan	574.010.953	110 Kegiatan	598.612.882	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			sosialisasi dan simulasi											
14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	Damkar Kota Sambang Kampus	80 Kegiatan	528.198.155		550.558.006	100 Kegiatan	574.010.953	110 Kegiatan	598.612.882	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
15	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	SIKEKAL (Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan)	80 Kegiatan	528.198.155		550.558.006	100 Kegiatan	574.010.953	110 Kegiatan	598.612.882	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
16	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	Mosidamkar (Mobil Simulasi Pemadam Kebakaran)	80 Kegiatan	528.198.155		550.558.006	100 Kegiatan	574.010.953	110 Kegiatan	598.612.882	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
17	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah	Tata Kelola Keamanan Informasi	100%	51,612,543,482	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			MCFA (Master Control Fire Alarm)									APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi	Command Center 112	4 Jenis	13,907,183,482	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kabupaten/Kota	publik yang diselenggarakan											
20	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 112	3 kali/per hari	3,952,705,422	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

4.5. Smart Living

4.5.1. Harmonisasi Tata Ruang

Tabel 13. Peta Jalan Smart Living- Harmonisasi Tata Ruang

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta														
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	Aplikasi pemeliharaan jalan	130 dokumen	538.868.745.656		546.323.264.452	137 dokumen	584.237.794.263	137 dokumen	610.347.180.061	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
2	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	Cekatan (Percepatan sertifikasi aset jalan dan saluran)	240 berkas	3,393,943,846	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan	Aplikasi Sipetarung	3 dokumen	2,614,831,549	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kabupaten/Kota	informasi enataan ruang kota yang disusun											Pertanahan
4	Program Pengembangan Perumahan	Kegiatan pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Unit Hunian rumah susun Pemerintah Kota Surabaya	Aplikasi E-Rusun	5157 Unit	24,541,335,481	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5	Program Kawasan Permukiman	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	Aplikasi E-Rusun	Hunian	44,823,085,272	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	Aplikasi E-Rutilahu (program dandan omah)	7 lokasi	31,967,970,200	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	pelaksanaan	Aplikasi SIPSU	11 dokumen	1,752,443,060	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan	Sistem Informasi Pengadaan Tanah	1 lokasi	114,172,843,715	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Strategi: Peningkatan Pengembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik														
19	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Iwak Peyek (Pengaduan Proyek)	100%	234,961,020	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

4.5.2. Sarana / Prasarana Kesehatan

Tabel 14. Peta Jalan Smart Living - Sarana / Prasarana Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Peningkatan jangkauan akses kesehatan khususnya pada masyarakat miskin pengembangan sistem data terintegrasi														
1	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan	Jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang didampingi	Sayang Warga (Tim Pendamping Keluarga)	10 Kelompok	15,889,334,760	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Sayang Warga (Zero Stunting)	6 Kegiatan	118,422,417,560	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Kesehatan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan	yang dilakukan Puskesmas	Aplikasi PWS (Pemantauan Wilayah	3 Dokumen	297.464.625.938		281.375.735.162	3 Dokumen	247.330.978.309	3 Dokumen	243.770.684.798	APBD	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Setempat)										
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	e-health	100 Dokumen	447.103.370.338		451.533.950.145	70 Dokumen	483.118.534.697	100 Dokumen	492.472.018.934	APBD	Dinas Kesehatan
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	e-health	3 Aplikasi	274.717.090		301.543.425	3 Aplikasi	330.989.299	3 Aplikasi	363.310.759	APBD	Dinas Kesehatan
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang	Sisinfokes (Sistem Informasi Kesehatan)	3 Aplikasi	274.717.090		301.543.425	3 Aplikasi	330.989.299	3 Aplikasi	363.310.759	APBD	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Upaya Kesehatan Masyarakat	Terintegrasi	diterapkan											
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	Aplikasi Persetujuan Teknis Perizinan	122 Lembaga	45.794.215.781		49.808.389.329	122 Lembaga	53.713.109.522	122 Lembaga	57.856.510.085	APBD	Dinas Kesehatan
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Aplikasi Persetujuan Teknis Perizinan	0,79	52.218.000		52.218.000	0,81	52.218.000	0,82	52.218.000	APBD	Dinas Kesehatan
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post	Jumlah PIRT yang dibina	Aplikasi Persetujuan Teknis Perizinan	217 PIRT	1.946.728.483		2.195.658.863	217 PIRT	2.475.587.349	217 PIRT	2.790.371.493	APBD	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Upaya Kesehatan Masyarakat	Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga												
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peningkatan Fasilitas Kesehatan	Jago Ceting (Jagongan Cegah Stunting)	3 Dokumen	297.464.625.938		281.375.735.162	3 Dokumen	247.330.978.309	3 Dokumen	243.770.684.798	APBD	Dinas Kesehatan
11	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	INCIP KOLAK KANRI (Inisiasi Menciptakan Kota Layak Anak di UPTD Kampung Anak Negeri)	12 kali	38,594,545,135		40,363,410,248	12 kali	43,432,529,814	12 kali	45,567,673,751	APBD	Dinas Sosial

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
12	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantis Sosial	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	Care Giver (Perawat Lansia)	12 kali	19,075,380,595		20,132,133,496	12 kali	21,381,780,161	12 kali	21,530,809,387	APBD	Dinas Sosial
13	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantis Sosial	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	Iso Mangan	12 kali	19,075,380,595		20,132,133,496	12 kali	21,381,780,161	12 kali	21,530,809,387	APBD	Dinas Sosial
14	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik yang Dikembangkan	Aplikasi Sayang Warga	190 Unit	5,272,055,132	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Diversifikasi pangan berkelanjutan														
15	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Neger	kasurboyo	3 Jenis	1.104.581.389		1.151.942.723	3 Jenis	1.201.662.640	3 Jenis	1.253.879.444	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

4.5.3. Sarana / Prasarana Trasportasi

Tabel 15. Peta Jalan Smart Living - Sarana / Prasarana Trasportasi

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Sistem Transportasi Perkotaan Terpadu														
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan	permukiman kumuh	Optimalisasi kinerja lalu lintas dan	31 Kawasan	287.393.942.808		269.921.556.001	31 Kawasan	312.757.928.203	31 Kawasan	323.533.150.600	APBD	Dinas Perhubungan

	Angkutan Jalan (LLAJ)	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		simpang apill (alat pemberi isyarat lalu lintas)										
--	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraa n Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	Sistem Bus Priority	31 Kawasan	287.393.942.808		269.921.556.001	31 Kawasan	312.757.928.203	31 Kawasan	323.533.150.600	APBD	Dinas Perhubungan
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraa n Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	Smart System PJU	31 Kawasan	287.393.942.808		269.921.556.001	31 Kawasan	312.757.928.203	31 Kawasan	323.533.150.600	APBD	Dinas Perhubungan
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Mobile POS Machine - Handheld	60 Berkas	17.829.503.234		17.418.066.766	60 Berkas	19.482.835.608	60 Berkas	20.323.723.533	APBD	Dinas Perhubungan
5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor yang	Whatsapp Gateway Habis Masa	134.525 Unit	8.885.258.931		8.081.330.492	134.525 Unit	9.393.355.671	134.525 Unit	8.140.370.621	APBD	Dinas Perhubungan

	Angkutan Jalan (LLAJ)	Bermotor	Lulus Uji KIR	Uji Berkala Kendaraan Bermotor										
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	Penataan Jaringan Angkutan Umum Trunk dan Feeder (Surabaya Bus dan Feeder Wira Wiri)	1 Jaringan	4.438.689.996		4.242.167.786	1 Jaringan	4.862.538.757	1 Jaringan	5.090.782.255	APBD	Dinas Perhubungan

4.6. Smart Environment

4.6.1. Pengelolaan Sampah dan Limbah

Tabel 16. Peta Jalan Smart Environment - Pengelolaan Sampah dan Limbah

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta														
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	Jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	Pembangunan angki Septik Komunal	2 kelurahan	7,289,033,886	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kabupaten/Kota												
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	Aplikasi REPLICA (Retribusi Pengelolaan Limbah Cair)	2 kelurahan	8.413.522.790		8.463.679.752	2 kelurahan	8.996.614.169	2 kelurahan	9.306.760.255	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
3	Program pengelolaan sarana dan prasana	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	E-Maintenance	266 Unit	45,654,753,685	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Strategi: Penguatan konsep gerakan Surabaya Green City melalui lembaga formal dan nonformal														
4	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Aplikasi SIBASAM (Bank Sampah)	1 jenis	6,713,859,700	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector	
					2023		2024		2025		2026				
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
5	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Pompa Banjir yang	Waste Station	3 jenis	416.225.486.892		402.915.508.670	3 jenis	436.817.484.658	3 jenis	445.929.165.170	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
6	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Dioperasikan dan	Aplikasi SWAT (Solid Waste Transportation)	3 jenis	416.225.486.892		402.915.508.670	3 jenis	436.817.484.658	3 jenis	445.929.165.170	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
7	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Dipelihara	TPS 3R	3 jenis	416.225.486.892		402.915.508.670	3 jenis	436.817.484.658	3 jenis	445.929.165.170	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	

4.6.2. Proteksi Lingkungan

Tabel 17. Peta Jalan Smart Environment - Proteksi Lingkungan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta														
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	Aplikasi Sistem Monitoring Pekerjaan Drainase	80 dokumen	478.924.648.006		473.086.221.887	80 dokumen	538.255.266.414	80 dokumen	582.830.776.602	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	Aplikasi SIMIPAL (pemeliharaan IPAL)	2 kelurahan	8.413.522.790		8.463.679.752	2 kelurahan	8.996.614.169	2 kelurahan	9.306.760.255	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	kerangboyo	13 Laporan	17.964.887.015		17.667.501.109	13 Laporan	19.201.685.034	13 Laporan	19.907.914.092	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Penguatan konsep gerakan Surabaya Green City melalui lembaga formal dan nonformal														
4	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pembinaan dan Pelatihan pengelolaan lingkungan	1 jenis	6,713,859,700	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan	Kegiatan SSC (Surabaya Smart City)	4 penghargaan	605.737.179		601.342.835	4 penghargaan	666.080.075	4 penghargaan	687.891.941	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	Aplikasi PKL (Pemantauan Kualitas Lingkungan)	2 jenis	2.681.456.640		2.705.937.582	2 jenis	2.832.192.465	2 jenis	2.963.234.242	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
7	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	Aplikasi PKU (Pemantauan Kualitas Udara)	2 stasiun	3.436.430.438		3.530.317.116	2 stasiun	3.775.498.853	2 stasiun	3.768.206.342	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	Aplikasi BIS (Biodiversity Information System)	3 dokumen	98.190.421.539		98.210.450.750	3 dokumen	109.108.439.323	3 dokumen	114.572.766.111	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	Aplikasi System and Web Application for Graveyard (SWAG)	3 dokumen	98.190.421.539		98.210.450.750	3 dokumen	109.108.439.323	3 dokumen	114.572.766.111	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
10	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi	Aplikasi E-Simpel	432 obyek	3.201.840.607		3.243.641.907	432 obyek	3.841.562.410	432 obyek	4.000.328.507	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	pengelolaan dan pemantauan lingkungannya											
11	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Percepatan waktu penerbitan layanan persetujuan lingkungan di SSW	1	604.134.232		622.589.238	1	708.602.839	1	732.771.403	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

4.6.3. Tata Kelola Energi

Tabel 18. Peta Jalan Smart Environment - Tata Kelola Energi

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (Rp)								Sumber Dana	Leading Sector
					2023		2024		2025		2026			
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Strategi: Penguatan konsep gerakan Surabaya Green City melalui lembaga formal dan nonformal														
1	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	Pengolahan Sampah Menjadi Listrik (TPA Benowo)	3 jenis	416.225.486.892		402.915.508.670	3 jenis	436.817.484.658	3 jenis	445.929.165.170	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

1. Visi dan Prioritas RPJMD

1.1. Visi, Misi dan Sasaran RPJMD

Sejalan dengan amanat di dalam pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman RPJPD dan RPJMN.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (PILKADA). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kota Surabaya untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Surabaya mampu berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut:

- **Gotong Royong**

Nilai Gotong Royong merupakan nilai luhur yang tumbuh di kawasan desa di Jawa khususnya wilayah Jawa Timur. Gotong royong merupakan pengerahan tenaga tambahan terhadap kekurangan tenaga dalam menjalankan berbagai aktivitas. Gotong royong juga diyakini sebagai potensi sosial yang dapat dijadikan sebagai bagian yang signifikan dalam pemecahan berbagai masalah yang kemasyarakatan termasuk dalam upaya pembangunan daerah. Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur yang memiliki dinamika pembangunan yang sangat kompleks. Guna mencapai upaya pembangunan Kota Surabaya menjadi kota dengan tatanan yang dinamis kelas dunia maka dibutuhkan kerjasama dan semangat gotong royong dari berbagai elemen masyarakat. Peran aktif serta gotong royong berbagai elemen tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pembangunan, mendukung program pembangunan sampai melestarikan hasil pembangunan.

- **Maju**

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu menjadi barometer perkembangan ekonomi bukan hanya di tingkat Jawa Timur namun juga di tingkat Nasional. Perwujudan pada Visi menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan tingkat Maju perekonomiannya adalah sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya.

Upaya pembangunan ekonomi Kota Surabaya kedepan harus berbasis kepada sektor potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Prioritas pembangunan ekonomi kedepan haruslah berbasis kepada sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencaharian masyarakat banyak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Surabaya. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi. Sebagai sentra ekonomi dan sentra penghubung ekonomi antar wilayah di Jawa Timur maupun di Nasional kebutuhan infrastruktur pendukung perdagangan menjadi faktor penting untuk terus dikembangkan di Kota Surabaya.

- **Humanis**

Implementasi Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan tujuan pemerintah daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejahtera direpresentasikan dengan konsep terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, rasa aman dan nyaman. Kesejahteraan mencakup unsur pembangunan kualitas manusia, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, rasa aman dan nyaman untuk tinggal dan bekerja, serta lingkungan hidup yang sehat berkelanjutan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan Kota Surabaya sebagai tempat yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman yang berarti kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan melakukan penataan ruang publik yang hijau sehingga nyaman dan ramah untuk anak, lansia serta difabel. Kemudian rasa nyaman, yang berarti menggambarkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, rekreasi dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan

hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.

- **Kota Dunia Berkelanjutan**

Pembangunan Kota Surabaya harus mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (Sustainability Development) yaitu bagaimana pembangunan mengedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kota Surabaya mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya.

Kota Surabaya akan menjadi kota yang sehat, indah, nyaman serta aman dengan memenuhi infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung warganya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat ekonomi serta mendukung kelancaran mobilitas warga serta bebas macet. Kota Surabaya harus mendukung dampak ekologi yang muncul dari aktivitas kota salah satunya dengan membangun tata kelola sampah dengan teknologi modern yang ramah lingkungan. Selain itu mengembangkan Kota Surabaya sebagai kota digital, membangun fasilitas dan ruang olahraga, ruang seni, dan ruang ekspresi bagi warganya. serta dapat terhubungnya tatanan landscape kota yang dapat mendukung konektivitas ekonomi dan sosial masyarakat Kota Surabaya secara berkelanjutan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 antara lain:

- Misi 1** : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;
- Misi 2** : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yg unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya;
- Misi 3** : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;
- Misi 4** : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- Misi 5** : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Adapun **sasaran RPJMD** Kota Surabaya Tahun 2021-2026 antara lain:

- 1. Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal
- 2. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan
- 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- 4. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
- 5. Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup
- 6. Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi
- 7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 8. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
- 9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif
- 10. Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 11. Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat

1.2. Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD terhadap Dimensi Smart City

Pemetaan Visi, Misi dan Sasaran RPJMD terhadap Dimensi Smart City dilakukan untuk merumuskan sasaran yang akan dicapai pada setiap dimensi perencanaan pembangunan kota cerdas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tabel 1 Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD terhadap Dimensi Smart City

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Society	Smart Living	Smart Environment
1	Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal						

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Society	Smart Living	Smart Environment
		Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan						
2	Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yg unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya;	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya						
			Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak						
		Pembentukan karakter masyarakat	Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup						
3	Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;	Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung dengan infrastruktur yang berkualitas untuk mendorong	Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi						

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Society	Smart Living	Smart Environment
		konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat							
		Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup						
4	Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah						
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif						
5	Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat						
			Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat						

2. Visi dan Sasaran Smart City Daerah

2.1. Visi Smart City Daerah

Smart City adalah pengembangan kota berbasis ICT dimana tersedianya informasi dan infrastruktur terintegrasi antara pemerintah daerah dengan komponen bisnis, masyarakat dan potensi daerah kota tersebut. Dalam menetapkan Visi Smart City, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemetaan terhadap Visi Kota Surabaya agar Visi tersebut relevan dengan pembangunan Kota Surabaya. Selain itu, Visi Smart City juga mencakup Visi dari semua dimensi Smart City yang telah ditentukan. Oleh karena itu, usulan Visi Smart City Kota Surabaya adalah sebagai berikut.

“Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan dalam Pembangunan Multi Sektor dan Pelayanan Publik yang Cerdas”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Surabaya mampu berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut :

- **Maju**

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu menjadi barometer perkembangan ekonomi bukan hanya di tingkat Jawa Timur namun juga di tingkat Nasional. Perwujudan pada Visi menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan tingkat Maju perekonomiannya adalah sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya.

Upaya pembangunan ekonomi Kota Surabaya kedepan harus berbasis kepada sektor potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Prioritas pembangunan ekonomi kedepan haruslah berbasis kepada sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencaharian masyarakat banyak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Surabaya. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi. Sebagai sentra ekonomi dan sentra penghubung ekonomi antar wilayah di Jawa Timur maupun di Nasional kebutuhan infrastruktur pendukung perdagangan menjadi faktor penting untuk terus dikembangkan di Kota Surabaya

- **Humanis**

Implementasi Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan tujuan pemerintah daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejahtera direpresentasikan dengan konsep terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, rasa aman dan nyaman. Kesejahteraan mencakup unsur pembangunan kualitas manusia, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, rasa aman dan nyaman untuk tinggal dan bekerja, serta lingkungan hidup yang sehat berkelanjutan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan Kota Surabaya sebagai tempat yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman yang berarti kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan melakukan penataan ruang publik yang hijau sehingga nyaman dan ramah untuk anak, lansia serta difabel. Kemudian rasa nyaman, yang berarti menggambarkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, rekreasi dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.

- **Berkelanjutan**

Pembangunan Kota Surabaya harus mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (Sustainability Development) yaitu bagaimana pembangunan yang menedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kota Surabaya mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya.

Kota Surabaya akan menjadi kota yang sehat, indah, nyaman serta aman dengan memenuhi infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung warganya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat ekonomi serta mendukung kelancaran mobilitas warga serta bebas macet. Kota Surabaya harus mendukung dampak ekologi yang muncul dari aktivitas kota salah satunya dengan membangun tata kelola sampah dengan teknologi modern yang ramah lingkungan. Selain itu mengembangkan Kota Surabaya sebagai kota digital, membangun fasilitas dan ruang olahraga, ruang seni, dan ruang ekspresi bagi warganya, serta dapat terhubungnya tatanan landscape kota yang dapat mendukung konektivitas ekonomi dan sosial masyarakat Kota Surabaya secara berkelanjutan.

- **Pembangunan Multisektor**

Proses Pembangunan Kota Surabaya dilakukan dengan melakukan pendekatan pembangunan yang multisektor. Pendekatan multisektor mulai dirintis untuk memantapkan

arah tata kelola skala landscape (*landscape governance*). Artinya adalah, proses pembangunan dilakukan dengan adanya kolaborasi antar sektor. Kolaborasi perlu dibangun agar proses pembangunan pada satu sektor tidak mematikan sektor lainnya. Pembangunan multisektor merupakan pembangunan yang memberikan perspektif yang lebih baik dalam melakukan identifikasi dan evaluasi pada berbagai faktor yang dapat menciptakan daya saing pada perekonomian wilayah.

Melakukan identifikasi secara menyeluruh pada setiap sektor sangatlah diperlukan dalam melakukan pembangunan daerah. Hal ini untuk mengetahui potensi apa yang dapat menjadi sektor unggulan yang dapat lebih dikembangkan. Dan sektor apa yang menjadi sektor pendukung yang juga dikembangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan mengetahui sektor unggulan maka pemerintah akan lebih mudah dalam menentukan arahan pengembangan daerah dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong sektor unggulan daerah untuk lebih berkembang dan lebih dikenal banyak orang. Dengan begitu diharapkan kedepannya dapat menjadi contoh pertumbuhan yang dapat meningkatkan daya tarik daerah lainnya untuk mengembangkan daerahnya.

- **Pelayanan Publik yang Cerdas**

Pelayanan Publik yang Cerdas menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*). Smart Governance adalah salah satu dimensi yang terdapat pada Smart City. Smart Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan, kinerja efisiensi kebijakan publik serta kinerja dan kualitas pelayanan publik. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas diawali dengan menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai serta adanya keterlibatan antara masyarakat dan pemerintah. Tata kelola pemerintahan berbasis digital pun saat ini mulai dikembangkan. Penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk melakukan berbagai inovasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelayanan kepada publik. Kunci Kota Cerdas adalah integrasi, dimana sektor-sektor yang terkait dengan pelayanan publik saling terhubung satu sama lain. Serta mulai menerapkan konsep sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku walidata dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan/kebijakan.

Pelayanan publik diharapkan cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel dan transparan sehingga pelayanan publik semakin hari semakin dinamis. Pelayanan yang dulunya berminggu-minggu, kini hanya hitungan hari. Bahkan tidak menutup kemungkinan, nantinya pelayanan hanya dalam hitungan jam. Ini berkembang seiring tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat. Saat ini, Kota Surabaya telah menerapkan pelayanan yang bisa diakses secara elektronik, sehingga masyarakat dapat

dengan mudah mengajukan permohonan dimanapun dan kapanpun. Untuk kelengkapan persyaratan dokumen dapat dilengkapi secara online.

2.2. Sasaran Jangka Pendek Smart Governance

Sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Pembangunan Smart Governance dapat dilakukan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Dimensi Smart Governance

No	Sub Dimensi	Sasaran Sub Dimensi
1.	Pelayanan Publik	Meningkatkan efektivitas pelayanan perijinan dan penanaman modal
		Meningkatkan akurasi dan kecepatan pelayanan administrasi kependudukan
		Meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
2.	Manajemen Birokrasi Yang Efisien	Meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel
		Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi pembangunan
3.	Efisiensi Kebijakan Publik	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika yang handal dan efektif

2.3. Sasaran Jangka Pendek Smart Branding

Sasaran dari smart branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Pembangunan Smart Branding dapat dilakukan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Dimensi Smart Branding

No	Sub Dimensi	Sasaran Sub Dimensi
1.	Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata	Meningkatkan daya tarik destinasi wisata melalui promosi secara digital
		Meningkatkan pemasaran pariwisata berbasis digital
		Meningkatkan akses jalan melalui pembangunan panjang jalan dan prasana pejalan kaki
2.	Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah	Meningkatkan pelayanan penanaman modal
		Mengembangkan iklim penanaman modal
		Meningkatkan promosi penanaman modal melalui potensi investasi
		Meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk usaha mikro kecil menengah

No	Sub Dimensi	Sasaran Sub Dimensi
		Meningkatkan sarana distribusi perdagangan
3.	Membangun dan	Meningkatkan penataan bangunan gedung
	Memasarkan	Meningkatkan akses jalan
	Wajah Kota	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

2.4. Sasaran Jangka Pendek Smart Economy

Sasaran dari dimensi smart economy di dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan less-cash society. Pembangunan Smart Economy dapat dilakukan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 4 Sasaran Dimensi Smart Economy

No	Sub Dimensi	Sasaran Sub Dimensi
1.	Membangun dan Memasarkan Wajah Kota	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
		Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui penyediaan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi
		Meningkatkan perencanaan dan pembangunan industri multisektoral berbasis kemandirian ekonomi lokal
		Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian berbasis perkotaan (urban agriculture)
		Meningkatkan kualitas dan produktivitas pengelolaan perikanan tangkap
		Meningkatkan kualitas dan produktivitas pengelolaan perikanan budidaya
		Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
2.	Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera
		Meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Meningkatkan pengembangan UMKM berbasis pada potensi lokal
3.	Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan	Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk hasil olahan usaha menengah, kecil dan mikro
		Meningkatkan sarana distribusi perdagangan

2.5. Sasaran Jangka Pendek Smart Society

Sasaran dari smart society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Pembangunan Smart Society dapat dilakukan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 5 Sasaran Dimensi Smart Society

No	Sub Dimensi	Sasaran Sub Dimensi
1.	Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien	Meningkatkan pengembangan kapasitas daya saing masyarakat dalam bidang keolahragaan
		Meningkatkan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		Meningkatkan pengembangan UMKM
		Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika
2.	Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien	Meningkatkan pengelolaan pendidikan
		Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika yang mendukung sistem pembelajaran bagi masyarakat
3.	Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat	Meningkatkan penanggulangan bencana
		Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
		Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum

2.6. Sasaran Jangka Pendek Smart Living

Sasaran dari smart living di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Pembangunan Smart Living dapat dilakukan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 6 Sasaran Dimensi Smart Society

No	Sub Dimensi	Sasaran Sub Dimensi
1.	Harmonisasi Tata Ruang Wilayah	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang
2.	Mewujudkan Prasarana Kesehatan	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		Meningkatkan pengembangan kapasitas daya saing dalam bidang keolahragaan
		Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Meningkatkan pengawasan keamanan pangan
3.	Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi	Meningkatkan kehandalan dan kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2.7. Sasaran Jangka Pendek Smart Environment

Sasaran dari smart environment adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Pembangunan Smart Environment dapat dilakukan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Dimensi Smart Environment

No	Sub Dimensi	Sasaran Sub Dimensi
1.	Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan	Meningkatkan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
		Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
		Meningkatkan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
		Meningkatkan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Meningkatkan penanganan pengaduan lingkungan hidup
2.	Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah	Meningkatkan pengelolaan persampahan
		Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
3.	Mengembangkan Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya air

3. Profil Quickwins Smart City Daerah

Quickwins Smart City adalah program-program unggulan Pemerintah Daerah pada tiap dimensi Smart City dalam usaha mewujudkan Smart City di wilayahnya. Oleh sebab itu ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga keberlangsungan Quickwins.

3.1. Quickwins Smart Governance

Pemerintah Kota Surabaya menjadikan Inovasi Klampid New Generation (KNG) sebagai Quickwins pada Smart Governance. Berikut detail profil inovasi Aplikasi Klampid New Generation:

Tabel 8 Profil Inovasi Quickwins Smart Governance

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Pengisian
1. Nama Singkat Inovasi	Klampid New Generation (KNG)

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Pengisian
2. Penjelasan singkat	KNG aplikasi berbasis web dan mobile (Android) untuk mengajukan layanan administrasi kependudukan (ADMINDUK) dan memproses layanan tersebut hingga dapat diterbitkan output berupa dokumen kependudukan
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Penjelasan	Implementasi Inovasi Aplikasi Klampid New Generation (KNG) sedang berlangsung. Adanya pengembangan aplikasi terkait penambahan jenis layanan dan penambahan fitur sesuai dengan kebutuhan warga. Rencana pengembangan kedepannya adalah penambahan fitur terkait verifikasi keamanan.
4. Manfaat dari inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan dalam pengajuan layanan adminduk secara daring, sehingga lebih efektif dan efisien. 2. Penghematan biaya permohonan oleh warga karena tidak lagi diperlukan persyaratan fisik (fotokopi dokumen pendukung). 3. Meminimalkan kesalahan karena dilengkapi chatbot sebagai panduan.
5. Keunikan / kreativitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbasis web dan mobile apps (Android) 2. Dilengkapi dengan chatbot untuk memandu warga dalam mengajukan layanan, dengan tokoh virtual bernama cak Takon 3. Dilengkapi dengan fitur Tracking proses permohonan real time dengan menggunakan QR Code
6. Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua RT 2. Rumah Sakit 3. Puskesmas 4. Praktek Bidan Mandiri 5. Sekolah 6. Kelurahan
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan jumlah layanan administrasi kependudukan 2. Penambahan fitur sesuai kebutuhan warga 3. Penambahan verifikasi keamanan 4. Kerjasama dengan layanan instansi lain
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi institusional berupa penguatan regulasi atau dasar hukum implementasi dan/atau pemberlakuan Inovasi; 2. Strategi sosial berupa penguatan partisipasi / kolaborasi dengan pemangku kepentingan serta sosialisasi melalui berbagai media. 3. Strategi manajerial berupa penguatan peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP.
9. Sumber daya yang digunakan	APBD
10. Analisa Risiko	Permasalahan jaringan dan kapasitas penyimpanan (server)

3.2. Quickwins Smart Branding

Pemerintah Kota Surabaya menjadikan Inovasi Romokalisari Adventure Land sebagai Quickwins pada Smart Branding. Berikut detail profil inovasi Romokalisari Adventure Land:

Tabel 9 Profil Inovasi Quickwins Smart Branding

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Pengisian
1. Nama Singkat Inovasi	Romokalisari Adventure Land
2. Penjelasan singkat	Romokalisari Adventure Land Wisata merupakan destinasi wisata Kota Surabaya yang berlokasi di Rusun Romokalisari, Kecamatan Benowo Surabaya. Destinasi wisata ini terdiri dari wahana permainan, edukasi serta kuliner. Wahana permainan yang dapat dinikmati di Romokalisari Adventure Land antara lain Playground, Mini Zoo, Arena Berkuda, ATV, Kano, Sekoci besar dan kecil hingga Jetski. Selain itu, masyarakat yang berkunjung ke Romokalisari Adventure Land juga dapat melihat aneka satwa burung yang berada di kompleks wahana Mini Zoo dan menikmati aneka kuliner di stand makan.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Penjelasan	Evaluasi dan rencana pengembangan Adventure Land lebih lanjut sedang berlangsung. Adanya pengembangan Wahana Mini Zoo pada Romokalisari Adventure Land.
4. Manfaat dari inovasi	Selain sebagai destinasi wisata yang menarik bagi masyarakat Surabaya, pengelolaan Romokalisari Adventure Land melibatkan sekitar 100 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Rusun Romokalisari serta dari kelurahan setempat sehingga keberadaan Romokalisari Adventure Land memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat.
5. Keunikan / kreativitas	1. Sebagai destinasi wisata baru di Kota Surabaya yang dapat dinikmati oleh masyarakat Surabaya maupun luar kota 2. Sebagai wisata edukasi yang interaktif 3. Wahana permainan yang menyenangkan dan harga terjangkau 4. Pemberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekitar Romokalisari untuk mengelola wisata maupun stand kuliner
6. Kemitraan	1. Warga 2. Universitas Kristen Petra 3. Stakeholder bidang wisata
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	1. Penambahan wahana lainnya yang dapat dinikmati pengunjung 2. Pengembangan spot foto yang menarik 3. Pengembangan wahana zoo untuk edukasi pengunjung 4. Meningkatkan sarana dan prasarana 5. Menambah MBR yang terlibat pada pengelolaan wisata

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Pengisian
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	1. Bekerjasama dengan stakeholder bidang wisata 2. Melakukan promosi wisata secara luas 3. Kemudahan akses ke destinasi wisata
9. Sumber daya yang digunakan	APBD
10. Analisa Risiko	Keselamatan dan keamanan pengunjung, kebersihan lingkungan wisata

3.3. Quickwins Smart Economy

Pemerintah Kota Surabaya menjadikan Inovasi Paving Geprek sebagai Quickwins pada Smart Economy. Berikut detail profil inovasi Paving Geprek:

Tabel 10 Profil Inovasi Quickwins Smart Economy

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Pengisian
1. Nama Singkat Inovasi	Paving Geprek
2. Penjelasan singkat	Gotong Royong, Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Penjelasan	Implementasi Inovasi Paving Geprek sedang berlangsung. Peningkatan Jalan Lingkungan Berkelas Dunia di Kota Surabaya merupakan Program Padat Karya yang di inisiasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya yang di mulai dari proses pendaftaran pelatihan pembuatan paving, klasifikasi data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pelaksanaan pelatihan, pembentukan kelompok usaha, pemberian bantuan alat pembuatan paving, fasilitasi kegiatan usaha (NIB, BPJS dan permodalan), proses produksi sampai dengan pemanfaatan hasil produksi paving. Dengan pola Geprek di harapkan dapat tercipta sinergi yang kuat dan semangat gotong royong antara Pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota dan mewujudkan warga masyarakat kota Surabaya yang maju dan sejahtera.
4. Manfaat dari inovasi	Terwujudnya pendekatan Geprek melalui program pelatihan keterampilan sampai dengan terbentuknya kelompok usaha pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sampai dengan Desember 2022 sebanyak 8 (delapan) kelompok usaha produksi paving dan 1 (satu) kelompok usaha pemasangan paving. Dan hasil produksi paving GePREK dimanfaatkan pada pembangunan jalan lingkungan di kota Surabaya.
5. Keunikan / kreativitas	1. OPD membeli hasil produksi paving dari kelompok MBR padat karya paving 2. Masyarakat memiliki perhasilan setara UMR

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Pengisian
6. Kemitraan	Organisasi Pemerintah Daerah Kota Surabaya
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Menambah jumlah kelompok MBR di setiap kelurahan / kecamatan di kota Surabaya
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	1. Strategi institusional berupa penguatan regulasi atau dasar hukum implementasi dan/atau pemberlakuan Inovasi; 2. Strategi sosial berupa penguatan partisipasi / kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan dukungan masyarakat karena adanya kebutuhan / kepentingan publik yang harus dipenuhi; dan 3. Strategi manajerial berupa penguatan peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP.
9. Sumber daya yang digunakan	APBD
10. Analisa Risiko	Sumber Daya Manusia (MBR) mengundurkan diri dari kelompok padat karya paving

3.4. Quickwins Smart Society

Pemerintah Kota Surabaya menjadikan Inovasi Program Sekolahe Arek Suroboyo sebagai Quickwins pada Smart Society. Berikut detail profil inovasi Program Sekolahe Arek Suroboyo:

Tabel 11 Profil Inovasi Quickwins Smart Society

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Pengisian
1. Nama Singkat Inovasi	Program Sekolahe Arek Suroboyo
2. Penjelasan singkat	Program Sekolahe Arek Suroboyo adalah Pengembangan Menu pada Aplikasi Profil Sekolah. Program ini memberikan fasilitas pendampingan belajar untuk anak-anak dengan memanfaatkan Balai Rukun Warga (RW). Materi yang diajarkan meliputi pelajaran sekolah dan keagamaan. Pedampingan belajar dilakukan oleh volunteer, mahasiswa/warga, guru serta guru keagamaan.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Penjelasan	Implementasi Inovasi Program Sekolahe Arek Suroboyo sedang berlangsung. Sekolahe Arek Suroboyo merupakan sekolah yang warganya memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya menciptakan ekosistem lingkungan sekolah yang Aman, Rekreatif, Edukatif, dan Kegotongroyongan yang berbasis potensi keunggulan masing-masing sekolah.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Pengisian
4. Manfaat dari inovasi	<p>1. Sekolah yang melaksanakan program Sekolahe Arek Suroboyo adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri maupun swasta dengan melibatkan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, serta tokoh atau lembaga masyarakat;</p> <p>2. Kegiatan Sekolahe Arek Suroboyo (SAS) dilaksanakan pada Hari Senin sampai dengan Jumat atau Senin sampai dengan Sabtu, sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah.</p> <p>Pelaksanaan selama 2 jam (120 menit) di luar pembelajaran, tanpa mengurangi struktur kurikulum nasional yang berlaku;</p> <p>3. Adanya program ini membuat siswa dibebaskan dari pekerjaan rumah (PR), karena semua dituntaskan di sekolah. Jam pelajaran dimampatkan. Untuk kelas tinggi SD (4, 5, 6) yang semula pelajaran dimulai pukul 07.00 sampai 14.00 WIB menjadi mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.25 WIB. Berikutnya, mulai pukul 12.25 sampai 14.00 WIB diisi dengan pembiasaan karakter, ekstrakurikuler, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), kegiatan berbasis lingkungan/kearifan lokal, permainan;</p> <p>4. Untuk kelas 7, sebelumnya jam pelajaran dimulai pukul 06.30 sampai 14.30 WIB. Setelah adanya Sekolahe Arek Suroboyo dimampatkan menjadi jam pelajaran dimulai pukul 06.30 sampai 12.30 WIB. Selanjutnya, mulai pukul 12.30 sampai 14.30 WIB diisi dengan pembiasaan karakter, ekstrakurikuler, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), kegiatan berbasis lingkungan/kearifan lokal, permainan, sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah.</p>
5. Keunikan / kreativitas	<p>1. Melakukan pembinaan terhadap sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah secara menyeluruh (whole school development) dalam memberikan layanan prima;</p> <p>2. Terwujudnya sekolah bermutu secara merata melalui ekosistem lingkungan sekolah;</p> <p>3. Benchmarking Sekolahe Areko Suroboyo sebagai tolok ukur dalam mengembangkan sekolah bermutu berbasis kearifan dan keunggulan sekolah;</p> <p>4. Memperkuat partisipasi masyarakat secara bergotongroyong untuk memujudkan komunitas belajar (learning community)</p>
6. Kemitraan	<p>1. Bapemkesra</p> <p>2. Kelurahan</p> <p>3. Kecamatan</p> <p>4. Mahasiswa</p>

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Pengisian
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dan tersistem pada Aplikasi Profil Sekolah
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	1. Strategi institusional berupa penguatan regulasi atau dasar hukum implementasi dan/atau pemberlakuan Inovasi; 2. Strategi sosial berupa penguatan partisipasi / kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan dukungan masyarakat karena adanya kebutuhan / kepentingan publik yang harus dipenuhi; dan 3. Strategi manajerial berupa penguatan peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP.
9. Sumber daya yang digunakan	APBD
10. Analisa Risiko	Sekolah yang tidak menerapkan Program Sekolahe Arek Suroboyo dianggap tidak menerapkan kurikulum merdeka belajar

3.5. Quickwins Smart Living

Pemerintah Kota Surabaya menjadikan Inovasi Aplikasi e-Rusun sebagai Quickwins pada Smart Living. Berikut detail profil inovasi Aplikasi e-Rusun:

Tabel 12 Profil Inovasi Quickwins Smart Living

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Pengisian
1. Nama Singkat Inovasi	e-Rusun
2. Penjelasan singkat	E-Rusun merupakan aplikasi pengelolaan rumah susun secara digital. Meliputi pelayanan permohonan izin/sewa, database penghuni, hingga pelayanan pembayaran secara non tunai
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Penjelasan	Hingga kini, Aplikasi e-Rusun telah terdapat beberapa fitur diantaranya : 1. Informasi detail rumah susun yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya 1. Informasi calon pengguna rusun dan pengguna rusun
4. Manfaat dari inovasi	1. Pelayanan pengurusan online membuat semua tahapan menjadi efektif dan efisien. 2. Mempermudah pengelolaan rumah susun 3. Mempercepat proses pembayaran retribusi secara non tunai 4. Digitalisasi database rumah susun
5. Keunikan / kreativitas	Semua bentuk informasi maupun transaksi yang dilakukan calon pengguna maupun pengguna telah terakomodir pada aplikasi e-Rusun

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Pengisian
6. Kemitraan	1. Bank Jatim 2. Bank BCA
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	1. Mengembangkan aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui platform android 2. Mengintegrasikan database dengan database dari OPD lain (data NIK dan MBR/Gakin) sehingga pelayanan lebih optimal
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	1. Peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP. 2. Memperkuat malware, memperbesar kapasitas web, dan memperbarui tampilan pengguna. 3. Maintenance aplikasi secara berkala dan Memperbaiki bug
9. Sumber daya yang digunakan	APBD
10. Analisa Risiko	Aplikasi e-Rusun tidak dapat diakses dikarenakan kendala teknis (proses maintenance)

3.6. Quickwins Smart Environment

Pemerintah Kota Surabaya menjadikan Inovasi Waste Station sebagai Quickwins pada Smart Environment. Berikut detail profil inovasi Waste Station:

Tabel 13 Profil Inovasi Quickwins Smart Environment

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Pengisian
1. Nama Singkat Inovasi	Waste Station
2. Penjelasan singkat	Rekosistem menggunakan Waste Station sebagai sarana koleksi sampah secara pasif. Metode koleksi bergantung dari perjalanan sampah individu dalam menggunakan aplikasi Rekosistem yang dapat diunduh dari Mobile
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Penjelasan	Inovasi dan komponen pendukungnya dalam pembangunan. Sudah terbangun Waste Station di Pasar Sememi Surabaya dan akan menambah Waste Station di lokasi lain agar lebih merata
4. Manfaat dari inovasi	1. Memudahkan masyarakat dalam melakukan penukaran sampah 2. Mengurangi Sampah Plastik yang ada di masyarakat
5. Keunikan / kreativitas	1. Masyarakat dapat menukarkan sampah dengan cara yang lebih modern menggunakan aplikasi 2. Sampah yang diterima tidak hanya sampah botol, plastik, kaleng, dll, tetapi sampah sampah seperti sachet, plastik berlapis dapat diterima juga
6. Kemitraan	1. PT. Ajinomoto 2. PT. khazanah

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Pengisian
	3. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Melakukan Penambahan Unit waste station di wilayah tertentu
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	1. Strategi institusional berupa penguatan regulasi atau dasar hukum implementasi dan/atau pemberlakuan Inovasi; 2. Strategi sosial berupa penguatan partisipasi / kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan dukungan kegiatan usaha karena adanya kebutuhan / kepentingan publik yang harus dipenuhi; dan 3. Strategi manajerial berupa penguatan peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP. 4. Strategi teknis berupa monitoring aplikasi (database dan user) setiap hari dalam pencegahan kejahatan cyber.
9. Sumber daya yang digunakan	Dana Hibah
10. Analisa Risiko	1. Aplikasi Reko tidak dapat diakses karena kendala teknis dapat menyebabkan informasi kualita lingkungan terganggu. 2. Gagalnya keamanan Aplikasi Reko (Cyber Security) dapat menyebabkan terganggunya proses pencegahan pencemaran lingkungan.

4. Manajemen Risiko Quickwins

Manajemen Risiko dilakukan untuk memiliki kesiapan dalam merespon jika risiko tersebut terjadi. Definisi dari Risiko adalah efek ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya, yang apabila terjadi bisa menimbulkan suatu kerugian (risiko negatif) atau peluang (risiko positif). Risiko perlu dikelola demi tercapainya tujuan. Manajemen Risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, pengendalian, dan upaya untuk menghapus, menghindari atau setidaknya meminimalisir risiko yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini, kaitannya dengan Quickwins Smart City, proses Manajemen Risiko menjadi penting dikarenakan sifat dari Quickwins yang merupakan program unggulan dan ditargetkan untuk dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Tahapan-tahapan penyusunan manajemen risiko sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Melakukan identifikasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan kegagalan ataupun kerugian khususnya pada Quickwins Smart City. Risiko yang mungkin timbul dan berdampak pada Quickwins Smart City diidentifikasi dengan mengacu pada kategori Nature, Infrastructure, Structure, Suprastructure dan juga Culture. Penjelasan lebih lengkap mengenai tiap kategori dan sub-kategorinya diberikan sebagai berikut:

Tabel 14 Kategori Identifikasi Risiko

Kategori	Sub-Kategori	Deskripsi
Infrastruktur	Infrastruktur Fisik	Infrastruktur yang berfungsi untuk mendorong pada kegiatan sosial, budaya dan ekonomi: > Jalan; jembatan; pasar; gedung pemerintahan; waduk; sekolah; rumah sakit, JPO, Pedestrian; alun-alun; taman; rumah ibadah; RTH; panti jompo/piatu; dll.
	Infrastruktur Digital	Infrastruktur yang berbasis TIK: > FO; tower/BTS; Wi-Fi; dll.
	Teknologi	Segala sesuatu yang dapat mempercepat, mempermudah layanan dan prosedur operasi > Perangkat lunak; aplikasi, sistem informasi, dll > Peralatan teknologi: Komputer, ponsel, sensor, CCTV, drone, satelit, pesawat terbang, robot, mesin, dll
Suprastruktur	Hukum	Hukum positif: > Undang-Undang; Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dll
	Politik	kebijakan publik, dan aspek politik lainnya > Kebijakan; pemilihan kepala daerah; dll
	Kelembagaan	Organisasi pemerintah daerah dan organisasi yang ada di masyarakat > OPD, LSM, dll
Culture	Sosial	Tatanan sosial yang ada di masyarakat > budaya, adat-istiadat, hukum adat, dll.
	Ekonomi	Aspek perekonomian masyarakat > perdagangan; transaksi elektronik; investasi; dll

2. Analisis Risiko

Analisis risiko adalah proses yang dilakukan untuk menilai tingkatan sebuah risiko. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada 2 (dua) faktor, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya sebuah risiko dan dampak yang ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Tingkat risiko kemudian dihitung berdasarkan hasil perkalian antara skor tingkat kemungkinan dan skor dampak dari risiko. Dalam proses analisis risiko Quickwins Smart City, digunakan tabel berikut ini untuk menilai tingkat kemungkinan terjadinya risiko:

Tabel 15 Tabel Kemungkinan Risiko

Tingkat	Kemungkinan	Deskripsi
1	Kecil	Kemungkinan terjadi 1-2 kali dalam satu periode
2	Sedang	Kemungkinan terjadi 3-4 kali dalam satu periode
3	Besar	Kemungkinan terjadi >5 kali dalam satu periode

Tabel 16 Tabel Dampak Risiko

Tingkat	Kemungkinan	Deskripsi
1	Kecil	Dampak secara finansial atau non-finansial tidak terlalu serius, tidak menyebabkan banyak masalah atau kerusakan
2	Sedang	Dampak secara finansial atau non-finansial besar atau punya pengaruh untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut
3	Besar	Dampak secara finansial atau non-finansia sangat buruk, serius, atau kerusakan yang tidak dikehendaki

Selanjutnya, tingkat risiko dihitung dengan mengacu pada rumus dan tabel berikut ini:

Pengukuran Tingkat Risiko:

$$\text{Tingkat Risiko} = \text{Tingkat Kemungkinan} \times \text{Tingkat Dampak}$$

Tabel 17 Tabel Tingkat Risiko

Tingkat Risiko	Deskripsi	Aksi
≥ 7	Tinggi	Harus ada aksi perbaikan dalam maksimum 3 bulan ke depan
4 - 6	Sedang	Harus ada aksi perbaikan dalam maksimum 6 bulan ke depan
1 - 3	Rendah	Perlu ada perhatian

Matriks tingkat risiko dan keterhubungannya dengan tingkatan deskripsi Rendah, Sedang dan Tinggi diilustrasikan pada gambar berikut ini:

		Tingkat Kemungkinan		
		1	2	3
Tingkat Dampak	1	Rendah	Rendah	Rendah
	2	Rendah	Sedang	Sedang
	3	Rendah	Sedang	Tinggi

Gambar 1 Matriks Tingkat Risiko

3. Mitigasi Risiko

Pengendalian serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghapus, menghindari atau meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Adapun bentuk mitigasi risiko terbagi menjadi 2 (dua), yaitu yang bersifat struktural dan non-struktural. Mitigasi Struktural adalah upaya untuk

meminimalkan bencana yang dilaksanakan melalui pembangunan prasarana fisik dan memakai pendekatan teknologi, sedangkan Mitigasi Non-Struktural adalah upaya mengurangi akibat bencana dengan pembuatan kebijakan seperti suatu peraturan.

4.1. Quickwins Smart Governance

Komponen Manajemen Risiko terdiri atas Informasi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Penanganan Risiko dan Mitigasi Risiko terhadap Risiko yang terjadi pada Inovasi Aplikasi Klampid New Generation (KNG). Berikut Manajemen Risiko pada Quickwins Smart Governance:

Tabel 18 Manajemen Risiko Quickwins Smart Governance

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko (8x9)	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Infrastruktur	Teknologi	Adanya pelayanan terkait kependudukan melalui aplikasi KNG	Memberdayakan staf kecamatan, kelurahan, RT dan RW dalam melakukan pelayanan terkait adminduk / kependudukan melalui aplikasi KNG	Pelayanan adminduk sebelumnya masih manual sehingga pelayanan lebih lambat dan rumit	Memper mudah dan mempercepat layanan kependudukan	2	3	6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 menit	1. Staf programmer 2. Perangkat yang memadai 3. SDM yang kompeten 4. APBD	Menyediakan aplikasi yang <i>user friendly</i> , <i>maintainability</i> , <i>fungisional</i> , <i>efficiency</i> dan interaktif	Adanya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2	Infrastruktur	Teknologi	Aplikasi KNG lemot	Pelayanan pada aplikasi KNG terganggu	Banyak yang mengakses sehingga server down	Adanya temuan baru yang dapat dijadikan bahan evaluasi	1	3	3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 hari	1. Perangkat server 2. Dana APBD 3. SDM yang kompeten	Penambahan storage pada server	Adanya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
3	Suprastruktur	Kelembagaan	Pentingnya edukasi kepada seluruh SDM yang terlibat pada pelayanan kependudukan	Seluruh SDM yang terlibat pada pelayanan lebih kompeten	Minimnya kemampuan SDM yang terlibat pada pelayanan Adminduk	Proses pelayanan lebih cepat dari target yang telah ditentukan	2	3	6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 hari	1. SDM yang terlibat 2. Staf PD yang menguasai perijinan	Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada seluruh SDM yang terlibat pada pelayanan kependudukan	1. Menyusun dokumen user guide 2. Membuat video tutorial
4	Suprastruktur	Kelembagaan	Terjadinya human error	Proses pelayanan lebih lambat dari target yang telah ditentukan	Minimnya kapasitas SDM yang terlibat pada pelayanan Adminduk	Adanya masukan berdasarkan keluhan yang terjadi di lapangan	3	1	3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 hari	1. SDM yang terlibat 2. Staf PD yang menguasai perijinan	Menyediakan fitur pengaduan / live chat / chat bot sehingga respon pengaduan lebih cepat	1. Menyusun dokumen user guide 2. Membuat video tutorial

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko (8x9)	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Suprastruktur	Hukum	Adanya penyesuaian antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Pusat	Adanya penyesuaian proses bisnis pada aplikasi KNG	Adanya peraturan baru dari pusat yang wajib diterapkan pada seluruh daerah	Seluruh layanan patuh terhadap regulasi yang ada	3	3	9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 minggu	1. Kebijakan yang berlaku 2. SDM yang kompeten 3. Perangkat yang memadai	1. Adanya informasi melalui sosial media 2. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada stakeholder yang berkaitan	Menyusun draft reviu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
6	Culture	Ekonomi	Adanya tahapan persetujuan berjenjang	Setiap stakeholder yang terlibat wajib melakukan pengecekan sebelum melakukan transaksi secara elektronik (approval)	Terjadi human error (SDM tidak teliti sehingga salah input data) serta terjadi penyalahgunaan data	Proses pengajuan permohonan lebih ketat sehingga data yang masuk lebih terjamin kebenarannya	3	3	9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 minggu	1. SDM yang kompeten 2. Perangkat lunak yang <i>user friendly</i>	Adanya fitur notifikasi pada setiap stakeholder yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses approval	Adanya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
7	Culture	Sosial	Dibutuhkannya history permohonan	Memudahkan pemohon dalam melakukan monitoring status permohonan	Pemohon kesusahan dalam mengecek status permohonan	Efektifitas waktu dan tenaga karena dapat dipantau secara elektronik	1	3	3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 hari	1. SDM yang kompeten 2. Perangkat lunak	Menyediakan fitur history status permohonan	1. Menyusun dokumen user guide 2. Membuat video tutorial
8	Infrastruktur	Infrastruktur Digital	Terjadi gangguan jaringan	Aplikasi tidak dapat di akses	Tidak dilakukan maintenance terhadap perangkat jaringan	Perlu dilakukan pembaruan terhadap perangkat yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan	1	2	2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 hari	1. SDM yang kompeten 2. Jaringan internet yang memadai	Melakukan pengecekan secara teknis terhadap jaringan yang trouble	SOP Maintenance Jaringan
9	Infrastruktur	Teknologi	Aplikasi KNG tidak dapat di akses	Pelayanan pada aplikasi KNG terganggu	Sedang dilakukan maintenance	Adanya temuan baru yang dapat dijadikan bahan evaluasi	1	3	3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 hari	Staf programmer yang kompeten	Menyediakan server live dan dev agar tidak mengganggu proses operasional ketika maintenance	Adanya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

4.2. Quickwins Smart Branding

Komponen Manajemen Risiko terdiri atas Informasi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Penanganan Risiko dan Mitigasi Risiko terhadap Risiko yang terjadi pada Inovasi Romokalisasi Adventure Land. Berikut Manajemen Rsisiko pada Quickwins Smart Branding:

Tabel 19 Manajemen Risiko Quickwins Smart Branding

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko (8x9)	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Culture	Ekonomi	Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Meningkatkan lapangan kerja dan perekonomian MBR	Banyaknya MBR yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata	Adanya peluang kerja untuk 100 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	3	3	9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 bulan	1. MBR 2. APBD	Melakukan survey dan menawarkan lapangan pekerjaan melalui program padat karya kepada MBR dengan kategori miskin dan miskin ekstrem	Kebijakan dan arahan walikota terkait program padat karya
2	Suprastruktur	Kelembagaan	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Peningkatan omset hingga mencapai lebih dari 50%	Omset yang didapatkan masih jauh dari target	Meningkatkan daya kreatifitas UMKM	2	3	6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 bulan	1. UMKM 2. APBD	Adanya pelatihan terkait proses pengolahan makanan, penyajian makanan hingga manajemen keuangan	Kebijakan dan arahan walikota terkait program padat karya
3	Infrastruktur	Infrastruktur Fisik	Pemanfaatan lahan kosong untuk pembangunan dan pengembangan inovasi wahana yang menarik	Meningkatnya jumlah wahana sehingga terdapat banyak variasi wahana	Kurangnya minat masyarakat dan wisatawan pada wahana romokalisasi adventure	Meningkatkan daya tarik masyarakat dan wisatawan agar mengunjungi wisata romokalisasi adventure	3	3	9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 bulan	1. Lahan kosong 2. APBD 3. Pihak ketiga (tukang, pemborong)	Menyediakan media kritik dan saran untuk perbaikan seluruh wahana dan fasilitas pada romokalisasi adventure	Peresmian wisata romokalisasi adventure oleh walikota yang kemudian dipublikasikan pada media sosial
4	Suprastruktur	Sosial	Banyaknya variasi wahana (playground, edukasi dan lapak stand)	Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui wahana yang ada	Banyaknya sumber daya yang dapat di manfaatkan sebagai wahana dengan edukasi	Banyaknya aktifitas dan pengetahuan yang dilakukan dan didapatkan oleh wisatawan	2	2	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 bulan	1. Lahan kosong 2. APBD 3. MBR	Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat	Dokumentasi wahana dan deskripsi terkait detail informasi informasi wisata romokalisasi adventure

4.3. Quickwins Smart Economy

Komponen Manajemen Risiko terdiri atas Informasi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Penanganan Risiko dan Mitigasi Risiko terhadap Risiko yang terjadi pada Inovasi Paving Geprek. Berikut Manajemen Rsisiko pada Quickwins Smart Economy:

Tabel 20 Manajemen Risiko Quickwins Smart Economy

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko (8x9)	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Infrastruktur	Teknologi	Diperlukan alat untuk membuat paving	Proses pembuatan paving dapat lebih mudah dan cepat	Proses pembuatan paving secara manual membutuhkan waktu lebih lama	Efektifitas waktu dan tenaga	2	2	4	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1 bulan	1. Mesin Pembuat Paving 2. Dana APBD	1. Menyediakan mesin yang digunakan untuk memproduksi paving 2. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan	Kebijakan walikota terkait intervensi pekerjaan produksi paving pada program padat karya
2	Suprastruktur	Kelembagaan	Diperlukan quality controll terhadap hasil produksi paving	Hasil produksi paving sesuai dengan standar	Rendahnya kualitas paving	Jumlah produksi paving yang berkualitas meningkat	1	1	1	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1 bulan	1. Mesin controlling 2. SDM Quality Control	Menyediakan mesin atau SDM untuk melakukan pengecekan kualitas paving	Adanya standar baku mutu kualitas paving
3	Culture	Ekonomi	Tim produksi paving mendapat penghasilan dibawah UMR	Banyak SDM (MBR) yang mengundurkan diri	Hasil produksi paving tidak sesuai dengan target	Perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan produksi paving	2	3	6	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1 bulan	1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2. Pengawas	Publikasi dan sosialisasi program padat karya intervensi produksi paving melalui kecamatan, kelurahan dan media sosial	Pembaruan SK Tim Produksi Paving secara berkala
4	Infrastruktur	Infrastruktur Fisik	Infrastruktur jalan yang tidak layak dan belum memadai	Meningkatnya kebutuhan paving untuk memperbaiki jalan yang rusak	Sering terjadi overloading kendaraan	Banyaknya peluang pendapatan produksi paving	2	3	6	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1 bulan	1. Pemborong 2. Paving 3. Dana APBD	1. Mesin pembuat paving 2. Penyediaan mesin atau SDM selaku quality control 3. Menyediakan media pengaduan untuk memudahkan petugas dalam menindaklanjuti keluhan	Evaluasi dan tindak lanjut terkait infrastruktur jalan yang tidak memadai

4.4. Quickwins Smart Society

Komponen Manajemen Risiko terdiri atas Informasi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Penanganan Risiko dan Mitigasi Risiko terhadap Risiko yang terjadi pada Inovasi Sekolah Arek Suroboyo (SAS). Berikut Manajemen Rsisiko pada Quickwins Smart Society:

Tabel 21 Manajemen Risiko Quickwins Smart Society

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko (8x9)	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Culture	Sosial	Banyaknya guru yang belum paham mengenai teknologi	Kegiatan Sekolah Arek Suroboyo yang telah berjalan tidak terdokumentasi dengan rapi	Tidak ada standar kompetensi bagi guru di lingkungan Sekolah	Perlu dilakukan sosialisasi terkait pemanfaatan aplikasi profil sekolah untuk melengkapi kegiatan sekolah arek suroboyo	2	3	6	Dinas Pendidikan	1 bulan	1. SDM dengan kompetensi TIK 2. Modul materi	Membuat user guide aplikasi Sekolah Arek Suroboyo	Pembaruan SK Tim pengisian indikator dalam aplikasi Sekolah Arek Suroboyo
2	Suprastruktur	Politik	Tidak meratanya implementasi kegiatan Sekolah Arek Suroboyo	Kurangnya partisipasi masyarakat untuk memujudkan komunitas belajar	Terdapat sekolah yang tidak menerapkan kurikulum merdeka	Sekolah telah menerapkan kurikulum merdeka dari kemendikbud	2	3	6	Dinas Pendidikan	1 bulan	1. Guru 2. Volunteer / Mahasiswa 3. Pelajar	1. Menyusun jadwal pelaksanaa kegiatan SAS 2. Menyusun modul/materi pembelajaran pada SAS	Surat Edaran terkait pentingnya kurikulum merdeka dengan menerapkan metode pembelajaran SAS
3	Culture	Sosial	Adanya Wali Murid yang tidak setuju dengan kegiatan SAS	Kegiatan SAS menjadi tidak berjalan di sebagian sekolah	Kurangnya sosialisasi pada wali murid	Adanya masukan dari wali murid dan masyarakat sebagai bahan evaluasi berjalannya program SAS	1	2	2	Dinas Pendidikan	1 bulan	1. Kepala Sekolah dan Guru 2. Wali Murid 3. Pelajar	Menginputkan detail kegiatan SAS pada aplikasi sehingga memudahkan wali murid dalam melakukan pemantauan kegiatan	Surat Edaran terkait pentingnya kurikulum merdeka dengan menerapkan metode pembelajaran SAS
4	Culture	Sosial	Penerapan Sekolah Arek Suroboyo	Meningkatnya mutu pendidikan serta kemampuan peserta didik	Rendahnya mutu pendidikan di surabaya	Guru lebih kreatif sehingga sekolah kualitas unggulan telah menyeluruh (whole school development)	2	3	6	Dinas Pendidikan	1 bulan	1. Kepala Sekolah dan Guru 2. Wali Murid 3. Pelajar	Menyusun materi dan modul pembelajaran SAS	Penerapan uji coba kegiatan SAS yang dipublikasikan pada sosial media

4.5. Quickwins Smart Living

Komponen Manajemen Risiko terdiri atas Informasi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Penanganan Risiko dan Mitigasi Risiko terhadap Risiko yang terjadi pada Inovasi Aplikasi E-Rusun. Berikut Manajemen Risiko pada Quickwins Smart Living:

Tabel 22 Manajemen Risiko Quickwins Smart Living

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko (8x9)	Penanggung Jawab	Target Waktu	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Culture	Ekonomi	Proses pembayaran retribusi non tunai terhambat	Menurunnya antusiasime masyarakat melakukan pembayaran secara non tunai	Bukti bayar non tunai tidak berhasil terupload	Pembayaran retribusi secara tunai meningkat	3	2	6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1 hari	1. Staf programmer yang kompeten 2. Dana APBD	1. Melakukan analisis dampak dan resiko 2. Membuat fitur helpdesk pada aplikasi e-Rusun	SOP pembayaran non tunai
2	Infrastruktur	Teknologi	Informasi ketersediaan rusun pada aplikasi E-Rusun tidak update	Waktu tunggu masyarakat untuk mendapat rusun menjadi lebih lama	Petugas admin e-Rusun tidak mengupdate informasi	Meningkatnya jumlah masyarakat yang datang secara <i>offline</i> untuk mengetahui ketersediaan rusun	2	3	6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1 hari	Staf dengan tugas dan fungsi pengelola informasi dan konten di aplikasi E-Rusun	Menyediakan fitur update informasi ketersediaan rusun yang <i>user friendly</i>	SOP update informasi dan konten pada aplikasi E-Rusun
3	Infrastruktur	Teknologi	Adanya maintenance aplikasi E-Rusun	Proses monitoring pengelolaan rusun terhambat	Terdapat bug dalam aplikasi	Adanya keluhan masyarakat yang akan menjadi bahan evaluasi aplikasi E-Rusun	2	2	4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1 hari	1. Staf programmer 2. Perangkat yang memadai 3. Jaringan yang memadai	Menyediakan server live dan dev agar tidak mengganggu proses operasional ketika maintenance	1. SOP maintenance aplikasi E-Rusun 2. Form maintenance aplikasi E-Rusun
4	Culture	Sosial	Melakukan pendaftaran sebagai penghuni rusun secara online melalui aplikasi E-Rusun	Pendaftar perlu melengkapi data diri dan persyaratan secara online	Mengurangi penggunaan kertas	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses administrasi aplikasi E-Rusun	2	3	6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1 hari	SDM yang dapat kompeten	Terdapat fitur upload dan isian untuk melengkapi data diri	1. User guide aplikasi E-Rusun 2. Video tutorial pengoperasian E-Rusun
5	Infrastruktur	Teknologi	Adanya pendataan ulang pada penghuni rumah susun	Petugas perlu menginputkan satu persatu data penghuni rumah susun	Data penghuni rumah susun tidak lengkap	Data pada aplikasi E-Rusun lebih lengkap	2	2	4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	5 hari	Staf pengelola rumah susun yang kompeten	Menyediakan form sesuai dengan inputan pada aplikasi E-Rusun	Arahan pimpinan untuk melakukan pendataan ulang

4.6. Quickwins Smart Environment

Komponen Manajemen Risiko terdiri atas Informasi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Penanganan Risiko dan Mitigasi Risiko terhadap Risiko yang terjadi pada Inovasi Waste Station. Berikut Manajemen Risiko pada Quickwins Smart Environment:

Tabel 23 Manajemen Risiko Quickwins Smart Environment

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko (8x9)	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Infrastruktur	Infrastruktur fisik	Adanya kontainer pada pasar sememi yang dimanfaatkan sebagai waste station	Munculnya kepedulian masyarakat terkait pengelompokan sampah yang kemudian akan disetor pada waste station	Banyaknya sampah yang sulit terurai dan tidak terurai dengan baik	Berkurangnya sampah seiring dengan adanya kepedulian masyarakat dalam melakukan pengelompokan dan penukaran sampah untuk di daur ulang	3	3	9	Dinas Lingkungan Hidup	6 bulan	1. SDM yang kompeten 2. Kontainer dengan jumlah yang banyak 3. Pihak ketiga yang mengelola program waste station	1. Penambahan unit waste station secara merata 2. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat menyupport operasional waste station (proses pengelolaan sampah dan teknologi pendukung)	1. Adanya MOU dengan pihak ketiga 2. Menyusun draft surat edaran terkait penggunaan waste station
2	Infrastruktur	Teknologi	Pemanfaatan aplikasi REKOSISTEM sebagai pendukung kegiatan waste station	Mempermudah media penukaran sampah dengan koin	Terjadi kesulitan ketika proses penukaran sampah serta tidak ada history penukaran sampah	Masyarakat dapat menukarkan sampah dengan cara yang lebih modern	3	3	9	Dinas Lingkungan Hidup	1 hari	SDM yang kompeten	Pengembangan aplikasi REKOSISTEM yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mendukung proses bisnis waste station	1. Menyusun kebijakan (surat edaran dan SOP) terkait penggunaan waste station 2. Alur proses bisnis waste station dengan peran aplikasi REKOSISTEM
3	Infrastruktur	Infrastruktur digital	Aplikasi Reko tidak dapat diakses	Informasi kualitas lingkungan terganggu	Infrastruktur yang kurang memadai (penyediaan jaringan internet dengan bandwidth yang kurang memadai dan merata)	Adanya monitoring dan tindak lanjut terkait penyediaan bandwidth	1	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	1 hari	SDM yang kompeten	Melakukan evaluasi penyediaan jaringan serta penambahan bandwidth	Peta jaringan

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub Kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko (8x9)	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Infrastruktur	Teknologi	Gagalnya keamanan Aplikasi Reko (Cyber Security)	Terganggunya proses pencegahan pencemaran lingkungan	Teknologi keamanan yang sudah lama dan tidak dilakukan pembaruan	Perlu dilakukan evaluasi pada celah keamanan sesuai dengan teknologi yang terbaru	1	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	1 hari	Programmer yang kompeten	1. Pengujian dan dokumentasi terhadap celah keamanan informasi 2. Melakukan monitoring aplikasi (database dan user) setiap hari dalam pencegahan kejahatan cyber	Kebijakan terkait keamanan informasi
5	Culture	Ekonomi	Koin hasil penukaran sampah dapat dijadikan saldo pada e-wallet	Menarik perhatian masyarakat dalam melakukan penukaran sampah	Kurangnya minat masyarakat dalam melakukan penukaran sampah apabila tidak mendapatkan feedback	Proses bisnis waste station mendapat respon baik dan support dari masyarakat	2	2	4	Dinas Lingkungan Hidup	1 hari	Programmer yang kompeten	Melakukan publikasi melalui sosial media terkait keunggulan waste station	1. User guide aplikasi REKOSISTEM 2. Video tutorial penggunaan aplikasi REKOSISTEM
6	Suprastruktur	Kelembagaan	Pengelolaan sampah dilakukan oleh pihak ketiga	Proses bisnis waste station lebih terstruktur	Kurangnya SDM yang dapat mengelola sampah	Meningkatkan relasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga	3	2	6	Dinas Lingkungan Hidup	1 hari	Programmer yang kompeten	Melakukan koordinasi terkait operasional waste station	MOU dengan pihak ketiga

5. Penutup

Buku Quickwins Smart City melengkapi dokumen perencanaan pembangunan Smart City Daerah yang berisi detail informasi profil program unggulan pembangunan Smart City yang dapat mempercepat peningkatan layanan serta kualitas hidup masyarakat. Sebagaimana makna dari kata Quickwins tersebut, dalam hal ini yang menjadi Quickwins Smart City adalah program-program yang dalam waktu pendek/cepat dilaksanakan, membawa dampak perbaikan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, kontribusi positif bagi masyarakat sehingga tentunya dalam hal perencanaan, kebermanfaatan, peluang pengembangan serta dalam hal kebutuhan sumber daya tidak memerlukan alokasi yang terlalu besar.

Demikian isi dari Buku IV Quickwins Smart City Kota Surabaya ini telah selesai disusun. Quickwins merupakan program terpilih jangka pendek yang diambil dari program-program pada Buku II. Buku IV ini merupakan seri buku terakhir dari buku masterplan smart city yang terdiri dari empat buku dan sekaligus menjadi buku lanjutan dari Buku 1 Analisis Strategi Smart City dan Buku II Maspterplan Smart City yang telah disusun sebelumnya. Adapun Buku IV Quickwins Smart City ini secara keseluruhan berisi profil quickwins dan manajemen risikonya. Selain berisi profil quickwin dan manajemen risiko quickwin, dalam Buku IV ini juga diulas kembali sasaran RPJMD dan sasaran smart city namun hanya mengulas sasaran jangka pendek. Hal ini sehubungan dengan karakteristik waktu pelaksanaan dari program quickwins smart city, yaitu program-program yang telah berjalan atau setidaknya yang akan dijalankan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Penyampaian kembali sasaran jangka pendek smart city sangat penting karena menjadi justifikasi dan dasar dalam menentukan pilihan program jangka pendek pembangunan smart city atau yang disebut dengan quickwins.

Akhir kata, kami menyadari bahwa isi dari Buku IV Quickwins Smart City Kota Surabaya ini masih membutuhkan banyak perbaikan terutama pada manajemen risiko quickwin yang seringkali belum tepat cara mengisinya.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI